



LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI TAHUN 2025

KEMENTERIAN PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

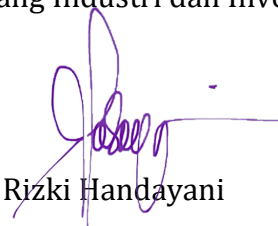


Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025 telah dapat diselesaikan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja. Hal ini sesuai dengan usaha untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat.

Laporan kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025 berisi informasi tentang capaian kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dan target yang telah ditetapkan untuk periode Tahun 2025 serta penyelenggaraan program dan anggaran serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pencapaian Deputy Industri dan Investasi tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi dari semua pihak, termasuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, Februari 2026
Deputy Bidang Industri dan Investasi



Rizki Handayani



PENYUSUN LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

Pengarah	Ir. RIZKI HANDAYANI, MBTM Deputi Bidang Industri dan Investasi
Penanggungjawab	ARI PRASETIO, S.Sos., M.P.P Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi
Anggota	FRANC ORLANDO Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha
	BUDI SUPRIYANTO Asisten Deputi Manajemen Industri
	FRANC ORLANDO Plt.Asisten Deputi Manajemen Investasi
	HANIFAH, S.Kom., M. Laws Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan
	AMNU FUADIY Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan
	Anggara Kusuma Pradoko Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan. Laporan kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025 memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis tahun pertama untuk periode 2025-2029 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, Deputy Bidang Industri dan Investasi merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Laporan kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi merupakan perwujudan tugas sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pengembangan industri dan investasi di bidang pariwisata. Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, Deputy Bidang Industri dan Investasi menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penjabaran Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025 terlihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas ¹ (Juta Rp)	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur-Yogyakarta- Prambanan 9 (Juta Rp)	22.023.561,06	24.845.280,00	112,81%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali (Juta Rp)	60.288.199,30	71.310.560,00	118,28%

		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau (Juta Rp)	6.947.814,54	7.457.570,00	107,34%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Greater Jakarta (Juta Rp)	211.658.892,86	244.991.900,00	115,75%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramen (Juta Rp)	2.432.513,02	2.691.880,00	110,66%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang (Juta Rp)	2.837.523,71	3.144.410,00	110,82%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung (Juta Rp)	3.614.153,73	3.918.900,00	108,43%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba (Juta Rp)	2.417.786,51	2.894.990,00	119,74%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat (Juta Rp)	18.196,50	19.260,00	105,84%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo (Juta Rp)	42.889,25	53.990,00	125,88%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru (Juta Rp)	19.273.275,88	21.028.400,00	109,11%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi (Juta Rp)	39.122,37	43.340,00	110,78%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai (Juta Rp)	2.849,87	3.000,00	105,27%
2	Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata ² (Juta Rp)	Nilai investasi sektor pariwisata Bali	11.588.448,83	16.052.380,42	138,52%
		Nilai investasi sektor pariwisata Greater Jakarta	16.240.176,28	23.744.721,75	146,21%

		Nilai investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau	1.538.191,03	2.011.716,61	130,78%
		Nilai investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta- Prambanan	806.249,89	1.363.228,87	169,08%
		Nilai investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	360.397,41	1.741.446,85	483,20%
		Nilai investasi sektor pariwisata Danau Toba	178.340,99	43.180,55	24,21%
		Nilai investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena	3.596.543,27	4.324.513,54	120,24%
		Nilai investasi sektor pariwisata Manado-Likupang	263.796,05	442.682,56	167,81%
		Nilai investasi sektor pariwisata Bangka Belitung	85.455,06	113.770,57	133,13%
		Nilai investasi sektor pariwisata Raja Ampat	29.723,50	81.815,43	275,26%
		Nilai investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	2.403.887,91	1.992.084,52	82,87%
		Nilai investasi sektor pariwisata Wakatobi	55.731,56	65.444,49	117,43%
		Nilai investasi sektor pariwisata Morotai	7.430,87	9.232,95	124,25%
3	Meningkatnya Kualitas Governans Deputy Bidang Industri dan Investasi ³	Indeks Kualitas Governans Pada Deputy Bidang Industri dan Investasi (nilai)	78,6	89,87	114,34%

Keterangan:

¹Data proyeksi yang diolah Kementerian Pariwisata

²Sumber data capaian: BKPM dan diolah kembali oleh Deputy Bidang Industri dan Investasi

³Capaian masih data sementara, masih terdapat komponen yang belum ada nilainya

Pada tahun 2025 Deputy Bidang Industri dan Investasi mendapat anggaran sebesar **Rp 30.596.871.000** (Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dan setelah *Automatic Adjustment* pagu yang dapat dimanfaatkan menjadi sebesar **Rp 29.844.628.000** (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan

Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dari pagu tersebut terealisasi sebesar **Rp 29.603.012.179** (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tiga Juta Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau **99,19 %** dari pagu yang dapat dimanfaatkan.

Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh aparatur Deputi Bidang Industri dan Investasi memfokuskan pemanfaatan sumber daya, dana dan organisasi dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan di Rencana Strategis 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025 serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan pariwisata merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PENYUSUN LAPORAN KINERJA DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI.....	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.3 MANDAT DAN PERAN STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA	8
1.4 SISTEMATIKA LAPORAN.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 RENCANA STRATEGIS	11
2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	22
2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2025.....	24
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	34
3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025	199
3.3 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	200
3.4 KINERJA LAIN-LAIN.....	201
3.5 EVALUASI INTERNAL.....	202
BAB IV PENUTUP	206
4.1 KESIMPULAN	206
4.2 REKOMENDASI.....	207

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata	12
Tabel 2. 2 Tujuan Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025-2029.....	15
Tabel 2. 3 Keterkaitan Tujuan dan Visi Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025-2029	17
Tabel 2. 4 Sasaran Strategis Deputy Bidang Industri dan Investasi 2025-2029.....	18
Tabel 2. 5 Rencana Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025.....	24
Tabel 3. 1 Tabel Capaian Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025	34
Tabel 3. 2 Capaian Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas	38
Tabel 3. 3 Data Akomodasi Airbnb yang sudah diawasi dan terdaftar	52
Tabel 3. 4 Jumlah Responden Monitoring Evaluasi Akomodasi Non-Resmi.....	53
Tabel 3. 5 Data Rincian Kendala Teknis Monitoring & Evaluasi.....	55
Tabel 3. 6 50 peserta FoodStartup Indonesia (FSI) Tahun 2025	90
Tabel 3. 7 Daftar Kerjasama Peserta Foodstartup Indonesia (FSI)	112
Tabel 3. 8 Kriteria dan Skema Penilaian Restoran	135
Tabel 3. 9 Capaian Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata	141
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025	199

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Industri dan Investasi.....	4
Gambar 2. 1 Prioritas Nasional Deputy Bidang Industri dan Investasi	23
Gambar 2. 2 Perubahan Pagu Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun Anggaran 2025	25
Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025	29
Gambar 3. 1 Data akomodasi Airbnb yang sudah diawasi	51
Gambar 3. 2 Data perbandingan akomodasi Airbnb yang terdaftar	52
Gambar 3. 3 Data Persentase Faktor Kendala Teknis Monev Akomodasi.....	54
Gambar 3. 4 Alur perkembangan penataan akomodasi OTA	57



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Pagu Setelah Automatic Adjustment Deputi Bidang Industri dan Investasi Tahun Anggaran 2025.....	26
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Negara Republik Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Saat ini RPJMN telah memasuki tahap ke I dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Perpres nomor 12 tahun 2025 menetapkan bahwa pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun mendatang akan difokuskan pada **pengentasan kemiskinan** melalui kebijakan sosial dan ekonomi, **peningkatan kualitas SDM** seperti pendidikan, kesehatan dan kompetensi tenaga kerja, **pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan** melalui pembangunan infrastruktur, industrialisasi dan proyek strategis, pembangunan wilayah yang merata dan inklusif.

Kementerian Pariwisata selaku kementerian yang berada di dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan pariwisata berkomitmen untuk mendukung pencapaian RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, Kementerian Pariwisata telah menyusun Rencana Strategis (Rencana Strategis) untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Disamping itu, penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dilakukan dengan berpedoman pada RPJMN Nasional serta tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata merupakan salah satu pedoman bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan

Kementerian Pariwisata dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2025-2029.

Capaian Rencana Strategis Kementerian Pariwisata sangat bergantung pada komitmen dan upaya bersama seluruh unit kerja yang berada dilingkungan Kementerian Pariwisata. Agar rencana strategis Kementerian Pariwisata dapat dipahami dan dieksekusi dengan baik, Rencana Strategis tersebut kemudian diterjemahkan dan dirumuskan ke dalam kegiatan operasional oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Deputy Bidang Industri dan Investasi selaku unit teknis di bawah Kemenpar berkomitmen untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis Kemenpar. Rencana Strategis Deputy Bidang Industri dan Investasi mengacu pada Rencana Strategis Kemenpar dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis, tugas, fungsi, serta wewenang Deputy Bidang Industri dan Investasi, sehingga keselarasan antara Rencana Strategis Deputy Bidang Industri dan Investasi dengan Rencana Strategis Kemenpar dapat dijaga dan dapat menjawab kebutuhan/permasalahan yang dihadapi. Rencana Strategis Deputy Bidang Industri dan Investasi juga akan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di bawahnya untuk dapat berkontribusi terhadap capaian Rencana Strategis Kemenpar dan juga menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional di unit masing-masing untuk periode 2025-2029.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025 disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025 merupakan penjelasan atas sasaran strategis Deputy Bidang Industri dan Investasi dan capaiannya, berdasarkan Rencana Strategis Deputy Bidang

Industri dan Investasi tahun 2025-2029, yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025 ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi semua pihak dan sebagai sumber informasi yang komperhensif dalam upaya menjaga transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

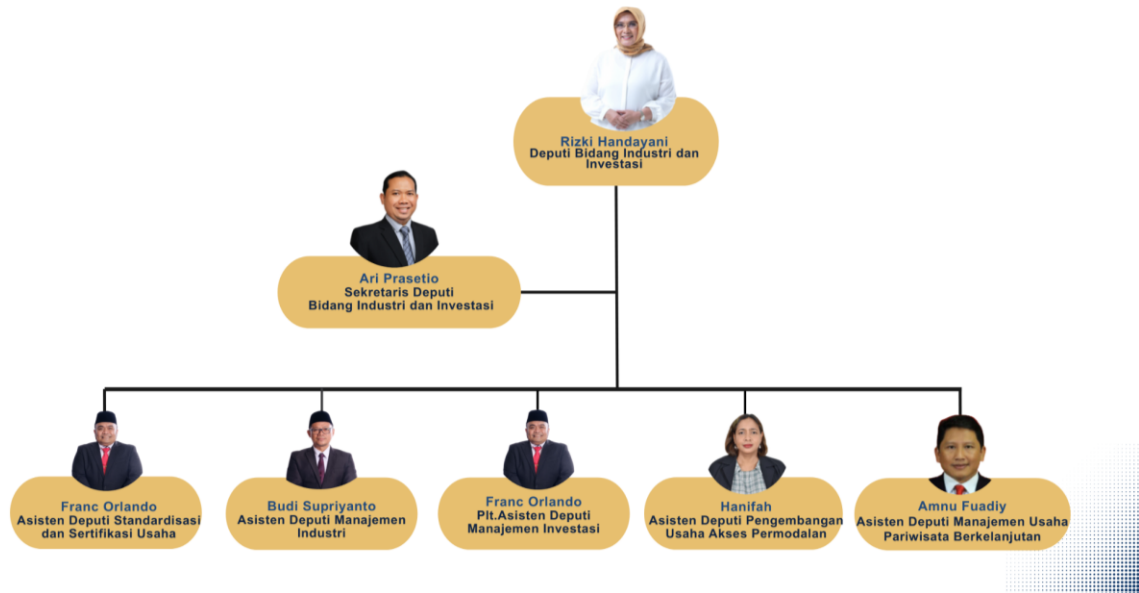
Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, Deputy Bidang Industri dan Investasi dipimpin oleh Deputy dan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

Deputy Bidang Industri dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan investasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas, Deputy Bidang Industri dan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan industri dan investasi pariwisata;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri dan investasi pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan industri dan investasi di bidang pariwisata;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan industri dan investasi pariwisata;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan kebijakan pengembangan industri dan investasi pariwisata;
- f. pelaksanaan administrasi Deputy; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Deputi Bidang Industri dan Investasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh unit-unit kerja di bawahnya. Unit-unit kerja tersebut dapat dilihat pada gambar struktur organisasi Deputi Bidang Industri dan Investasi di bawah ini:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Industri dan Investasi

Setiap unit kerja dibawah Deputi Bidang Industri dan Investasi memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

a. Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha

Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata. Sedangkan fungsi Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha yaitu:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;

- b) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata; dan
- e) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.

b. Asisten Deputy Manajemen Industri

Asisten Deputy Manajemen Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen industri pariwisata. Adapun fungsi Asisten Deputy Manajemen Industri yaitu:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, kemitraan, dan ketahanan industri pariwisata;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, kemitraan, dan ketahanan industri pariwisata;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola perizinan industri pariwisata;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola perizinan industri pariwisata; dan
- e) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola, kemitraan, dan ketahanan industri pariwisata.

c. Asisten Deputy Manajemen Investasi

Asisten Deputy Manajemen Investasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen investasi pariwisata dan

fasilitasi pembentukan kawasan ekonomi khusus di bidang pariwisata. Adapun fungsi Asisten Deputy Manajemen Investasi yaitu:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pendampingan, pengembangan jejaring, promosi investasi dan fasilitasi perizinan berusaha pariwisata serta fasilitasi pembentukan kawasan ekonomi khusus di bidang pariwisata;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pendampingan, pengembangan jejaring, promosi investasi dan fasilitasi perizinan berusaha pariwisata serta fasilitasi pembentukan kawasan ekonomi khusus di bidang pariwisata; dan
- c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pendampingan, pengembangan jejaring, promosi investasi dan fasilitasi perizinan berusaha pariwisata serta fasilitasi pembentukan kawasan ekonomi khusus di bidang pariwisata.

d. Asisten Deputy Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan

Asisten Deputy Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan akses permodalan pariwisata. Adapun fungsi Asisten Deputy Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan yaitu:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan manajemen keuangan usaha, akses permodalan berbasis perbankan dan non perbankan, serta fasilitasi akses pasar dalam dan luar negeri pariwisata;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan manajemen keuangan usaha, akses permodalan berbasis perbankan dan non perbankan, serta fasilitasi akses pasar dalam dan luar negeri pariwisata; dan

- c) penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan manajemen keuangan usaha, akses permodalan berbasis perbankan dan non perbankan, serta fasilitasi akses pasar dalam dan luar negeri pariwisata.

e. Asisten Deputy Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan

Asisten Deputy Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen usaha pariwisata berkelanjutan. Adapun fungsi Asisten Deputy Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan yaitu:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi insentif, pendampingan dan transformasi usaha pariwisata berkelanjutan;
- b) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi insentif, pendampingan dan transformasi usaha pariwisata berkelanjutan; dan
- c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi insentif, pendampingan dan transformasi usaha pariwisata berkelanjutan.

f. Sekretariat Deputy

Sekretariat Deputy mempunyai tugas memberikan dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi. Adapun fungsi Sekretariat Deputy yaitu:

- a) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis di lingkungan Deputy;
- c) pelaksanaan urusan keuangan;
- d) pelaksanaan urusan tata usaha, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, hukum, organisasi dan tata laksana, kearsipan, dan pengelolaan sistem informasi;
- e) penatausahaan barang milik negara;
- f) pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g) penyiapan koordinasi dan fasilitasi kerja sama;

- h) penyiapan koordinasi dan pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
- i) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Deputi.

1.3 MANDAT DAN PERAN STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Pembangunan bidang pariwisata harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap yang dimulai dari jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Dalam rangka menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan rencana pembangunan yang memiliki visi jauh kedepan, dengan didasari kondisi saat ini.

Kebijakan Pembangunan Pariwisata diarahkan untuk Memfasilitasi Peningkatan Produktivitas dengan Memperhatikan Aspek-aspek Inklusivitas dan Keberkelanjutan. Sesuai dengan misi Deputi Bidang Industri dan Investasi **“mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan industri pariwisata secara berkelanjutan dan berkualitas melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberdayaan pelaku usaha secara menyeluruh, dan penguatan struktur industri dari hulu ke hilir”**, berikut strategi pengembangan industri pariwisata:

- a. **Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha**
- b. **Pengembangan Manajemen Industri**
- c. **Pengembangan Manajemen Investasi**
- d. **Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan**
- e. **Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan**

Beberapa permasalahan utama terkait pengembangan industri dan investasi sektor pariwisata:

1. Belum optimalnya tata kelola usaha pariwisata, hal ini ditunjukkan dengan tingginya jumlah pelaku usaha pariwisata yang beroperasi tanpa legalitas usaha, perizinan, dan standar operasional yang memadai mencerminkan belum optimalnya tata kelola industri pariwisata serta rendahnya tingkat formalisasi usaha. Aktivitas ekonomi

yang tidak tercatat berdampak pada rendahnya akurasi data kinerja sektor pariwisata, termasuk kontribusi terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan produktivitas usaha.

2. Belum optimalnya penerapan standar keselamatan dan keamanan pada transportasi pariwisata disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan kepatuhan operator terhadap regulasi dan standar teknis, kondisi sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi standar keselamatan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu, masih banyak operator transportasi pariwisata yang beroperasi secara non-resmi, sehingga tidak tercakup dalam sistem pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan keselamatan yang memadai.
3. Keterbatasan akses pembiayaan dan belum optimalnya ekosistem pendanaan pariwisata menghambat peningkatan kapasitas dan skala usaha. Pelaku usaha pariwisata masih menghadapi kendala dalam memperoleh sumber permodalan yang sesuai dengan karakteristik industri pariwisata, termasuk pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan berbasis keberlanjutan, yang sangat dibutuhkan untuk mendorong investasi berkualitas dan berdaya saing.
4. Tingkat kepatuhan dan partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup dan mekanisme penilaian kinerja lingkungan masih belum optimal. Sebagian pelaku usaha, belum sepenuhnya memahami kewajiban dan manfaat penerapan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan skema Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan lingkungan di destinasi pariwisata serta terbatasnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki kinerja lingkungan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, tugas fungsi dan struktur organisasi, mandat dan peran strategis, permasalahan utama serta sistematika pelaporan.

- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab II Perencanaan Kinerja berisi rencana strategis, prioritas nasional tahun 2025, rencana kerja dan anggaran 2025 dan perjanjian kinerja tahun 2025.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran 2025, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain dan evaluasi internal.

- **BAB IV PENUTUP**

Bab IV Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi serta langkah-langkah untuk perbaikan yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Rencana Strategis) Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029.

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Deputy Bidang Industri dan Investasi merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Pariwisata yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029. Visi Kementerian Pariwisata tahun 2025 – 2029 adalah:

**“PARIWISATA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN DALAM
MENDUKUNG PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI MENUJU INDONESIA
EMAS 2045”**

Visi tersebut menyelaraskan antara mewujudkan pariwisata sebagai pengungkit transformasi struktural menuju ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan berkelanjutan dengan kelestarian alam, budaya, dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat dan pelaku pariwisata, serta nilai tambah dan daya saing pariwisata yang tinggi. Untuk mewujudkan visi tersebut, Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 juga telah menetapkan misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk lima tahun ke depan seperti yang tercantum di bawah ini.

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata

VISI KEMENTERIAN PARIWISATA	
Pariwisata yang Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045	
MISI KEMENTERIAN PARIWISATA	
1. Mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pariwisata.	2. Memperkuat tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pariwisata guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
TUJUAN KEMENTERIAN PARIWISATA	
1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata.	2. Meningkatkan kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur.
SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA	
1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan.	2. Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Pariwisata ini menjadi acuan utama dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Deputy Bidang Industri dan Investasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dalam hal ini tahun 2029. Visi Deputy Bidang Industri dan Investasi merupakan rumusan visi sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Industri dan Investasi. Visi deputy ini dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a. visi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029;
- b. misi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029;
- c. tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029;
- d. arah kebijakan terkait industri dan investasi pariwisata dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Kementerian Pariwisata memiliki enam arah kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia, yaitu: a) peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan pariwisata; b) pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan; c) pengembangan industri dan investasi pariwisata yang berkualitas; d) pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata berkualitas; e) pengembangan event pariwisata berkualitas; f) tata kelola Kementerian Pariwisata yang berkualitas dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Arah kebijakan yang terkait dengan Deputy Bidang Industri dan Investasi adalah **pengembangan industri dan investasi pariwisata yang berkualitas**. Dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan industri dan investasi pariwisata, maka visi Deputy Bidang Industri dan Investasi Pariwisata tahun 2025 – 2029 adalah:

**“MENJADI PENGGERAK TRANSFORMASI DAN KOLABORASI YANG ANDAL
DALAM MEWUJUDKAN INDUSTRI DAN INVESTASI PARIWISATA YANG
BERKUALITAS SECARA BERKELANJUTAN”**

Visi tersebut mengandung makna:

1. “Penggerak Transformasi”: Deputy Bidang Industri dan Investasi diharapkan dapat berperan menjadi agen perubahan melalui kebijakan, strategi, dan program-program inovatif dan kreatif yang berkesinambungan di bidang industri dan investasi pariwisata menuju pariwisata berkualitas di Indonesia.

2. “Penggerak Kolaborasi”: Deputy Bidang Industri dan Investasi diharapkan dapat menerapkan kepemimpinan kolaboratif yang andal dalam membangun industri dan investasi pariwisata yang berkualitas.
3. “Industri Pariwisata yang Berkualitas secara Berkelanjutan”: merupakan industri pariwisata yang selain berdaya saing dunia, kredibilitas tinggi, beridentitas kuat, dan tangguh, juga berkontribusi besar terhadap kelestarian lingkungan alam dan budaya, serta pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
4. “Investasi Pariwisata yang Berkualitas secara Berkelanjutan”: merupakan investasi pariwisata yang mampu membangun iklim dan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investor dalam membantu mewujudkan pariwisata berkualitas secara berkelanjutan di Indonesia.

Misi Deputy Bidang Industri dan Investasi dirumuskan dengan mempertimbangkan fokus pengembangan industri dan investasi pariwisata dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029, yaitu:

“mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan industri pariwisata secara berkelanjutan dan berkualitas melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberdayaan pelaku usaha secara menyeluruh, dan penguatan struktur industri dari hulu ke hilir”

Misi Deputy Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata 2025-2029 adalah mengembangkan:

1. industri pariwisata yang berkualitas melalui penguatan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata, pengelolaan pariwisata berkelanjutan pada usaha pariwisata, penguatan rantai nilai industri pariwisata yang mendorong perekonomian nasional dan daerah, serta perluasan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata berkualitas secara berkelanjutan;

2. investasi pariwisata yang berkualitas melalui penguatan iklim dan lingkungan bisnis yang kondusif serta keterpaduan investasi lintas sektor dan antara pusat-daerah secara berkelanjutan.
3. tata kelola kelembagaan Deputy Bidang Industri dan Investasi yang transformatif, didukung sumber daya manusia yang berintegritas tinggi, kreatif, dan inovatif sebagai penggerak dalam mewujudkan industri dan investasi pariwisata yang berkualitas secara berkelanjutan;

Tujuan merupakan penjabaran dari visi yang dilengkapi dengan rencana sasaran program yang hendak dicapai pada akhir masa perencanaan. Penyusunan tujuan dilakukan dengan berpedoman pada misi organisasi. Berikut adalah tujuan Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025-2029:

Tabel 2. 2 Tujuan Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	TUJUAN KEMENPAR YANG TERKAIT
1. Mengembangkan tata kelola kelembagaan Deputy Bidang Industri dan Investasi yang transformatif, didukung sumber daya manusia yang berintegritas tinggi, kreatif, dan inovatif sebagai penggerak dalam mewujudkan industri dan investasi pariwisata yang berkualitas secara berkelanjutan.	1. Transformasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program, kegiatan, anggaran, dan sumber daya manusia dalam membangun sinergi implementasi rencana di lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi.	Meningkatkan kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur
2. Mengembangkan industri pariwisata yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas industri pariwisata secara berkelanjutan	Meningkatkan nilai tambah pariwisata.

MISI	TUJUAN	TUJUAN KEMENPAR YANG TERKAIT
melalui penguatan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata, pengelolaan pariwisata berkelanjutan pada usaha pariwisata, penguatan rantai nilai industri pariwisata yang mendorong perekonomian nasional dan daerah, serta perluasan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.	melalui transformasi yang konsisten dan kolaborasi yang inklusif, termasuk di dalamnya penerapan standar usaha pariwisata yang lebih berkualitas. 2. Meningkatnya transformasi usaha pariwisata berkelanjutan.	
3. Mengembangkan investasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penguatan iklim dan lingkungan bisnis yang kondusif serta keterpaduan investasi lintas sektor dan antara pusat-daerah.	1. Meningkatnya realisasi investasi untuk pertumbuhan pariwisata berkualitas secara berkelanjutan.	Meningkatkan nilai tambah pariwisata.

Tujuan Deputy Bidang Industri dan Investasi juga mendukung pencapaian visi Deputy tahun 2025-2029. Keterkaitan tujuan Deputy dengan empat kata kunci visi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Keterkaitan Tujuan dan Visi Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN	KATA KUNCI VISI YANG TERKAIT
1.	Transformasi kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program, kegiatan, anggaran, dan sumber daya manusia dalam membangun sinergi implementasi rencana di lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi.	• PENGGERAK TRANSFORMASI • PENGGERAK KOLABORASI • INDUSTRI PARIWISATA BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN • INVESTASI PARIWISATA BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN
2.	Meningkatnya kualitas industri pariwisata secara berkelanjutan melalui transformasi yang konsisten dan kolaborasi yang inklusif, termasuk di dalamnya penerapan standar usaha pariwisata yang lebih berkualitas.	• INDUSTRI PARIWISATA BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN • PENGGERAK TRANSFORMASI • PENGGERAK KOLABORASI
3.	Meningkatnya transformasi usaha pariwisata berkelanjutan.	• INDUSTRI PARIWISATA BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN • PENGGERAK TRANSFORMASI • PENGGERAK KOLABORASI
4.	Meningkatnya realisasi investasi untuk pertumbuhan pariwisata berkualitas secara berkelanjutan.	• INVESTASI PARIWISATA BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN • PENGGERAK TRANSFORMASI • PENGGERAK KOLABORASI

2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Industri dan Investasi

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2025-2029 maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) untuk menggambarkan tingkat ketercapaian indikator sasaran strategis tersebut. Secara lebih rinci IKSP dan target Deputi Bidang Industri dan Investasi yang akan dicapai pada periode 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Sasaran Strategis Deputi Bidang Industri dan Investasi 2025-2029

No	Sasaran Program (SP) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas							
1	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta (Rp)	22.023.561,06	23.124.739,11	24.280.976,07	25.495.024,87	26.769.776,11
2	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali	Juta (Rp)	60.288.199,30	63.302.609,27	66.467.739,73	69.791.126,72	73.280.683,05
3	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau	Juta (Rp)	6.947.814,54	7.295.205,27	7.659.965,53	8.042.963,81	8.445.112,00
4	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Greater Jakarta	Juta (Rp)	211.658.892,86	222.241.837,50	233.353.929,38	245.021.625,84	257.272.707,14

5	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramena	Juta (Rp)	2.432.513,02	2.554.138,68	2.681.845,61	2.815.937,89	2.956.734,78
6	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang	Juta (Rp)	2.837.523,71	2.979.399,89	3.128.369,89	3.284.788,38	3.449.027,80
7	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung	Juta (Rp)	3.614.153,73	3.792.692,93	3.980.051,96	4.176.666,53	4.398.051,36
8	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba	Juta (Rp)	2.417.786,51	2.538.675,84	2.665.609,63	2.798.890,11	2.938.834,62
9	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat	Juta (Rp)	18.196,50	19.106,32	20.061,64	21.064,72	22.117,96
10	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo	Juta (Rp)	42.889,25	45.063,74	47.348,47	49.749,04	52.062,72
11	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru	Juta (Rp)	19.273.275,88	20.225.375,70	21.224.509,26	22.273.000,02	23.453.583,72
12	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi	Juta (Rp)	39.122,37	41.055,01	43.083,13	45.211,44	47.607,88
13	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan	Juta (Rp)	2.849,87	2.992,37	3.141,99	3.299,09	3.464,04

	Makan Minum Morotai						
Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata							
1	Nilai investasi sektor pariwisata Bali	Juta (Rp)	11.588.448,83	13.420.018,8	15.405.672,0	17.543.996,8	19.830.050,6
2	Nilai investasi sektor pariwisata Greater Jakarta	Juta (Rp)	16.240.176,28	16.963.402,5	17.670.612,7	18.361.695,1	19.035.844,2
3	Nilai investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau	Juta (Rp)	1.538.191,03	1.538.191,0	1.538.191,0	1.538.191,0	1.538.191,0
4	Nilai investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	Juta (Rp)	806.249,89	1.039.869,5	1.321.948,4	1.658.342,9	2.054.505,7
5	Nilai investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	Juta (Rp)	360.397,41	360.397,4	360.397,4	360.397,4	360.397,4
6	Nilai investasi sektor pariwisata Danau Toba	Juta (Rp)	178.340,99	178.341,0	178.341,0	178.341,0	178.341,0
7	Nilai investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramen	Juta (Rp)	3.596.543,27	4.718.338,4	6.096.085,3	7.765.922,4	9.762.936,0
8	Nilai investasi sektor pariwisata Manado-Likupang	Juta (Rp)	263.796,05	263.796,0	263.796,0	263.796,0	263.796,0
9	Nilai investasi sektor pariwisata Bangka Belitung	Juta (Rp)	85.455,06	85.455,1	85.455,1	85.455,1	85.455,1
10	Nilai investasi sektor pariwisata Raja Ampat	Juta (Rp)	29.723,50	56.095,3	102.688,1	182.700,0	316.340,4
11	Nilai investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	Juta (Rp)	2.403.887,91	2.791.350,6	3.212.544,5	3.667.280,7	4.154.606,7
12	Nilai investasi sektor pariwisata Wakatobi	Juta (Rp)	55.731,56	68.545,9	83.300,6	100.121,2	119.100,6

13	Nilai investasi sektor pariwisata Morotai	Juta (Rp)	7.430,87	15.759,6	32.295,9	64.085,2	123.303,7
Meningkatnya Kualitas Governans Deputy Bidang Industri dan Investasi							
1	Indeks Kualitas Governans Pada Deputy Bidang Industri dan Investasi (nilai)	Nilai	78,6	80	81,4	82,8	84,2

Definisi Indikator Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi:

➤ PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

- PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) dalam periode tertentu. Semakin besar dan tumbuh PDRB suatu daerah, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut.
- PDRB sektor pariwisata mencerminkan nilai tambah nyata yang dihasilkan dari aktivitas wisata. Kebijakan yang mendorong investasi berkualitas, standardisasi usaha, akses pembiayaan, dan akses pasar akan berdampak langsung pada peningkatan PDRB pariwisata.
- PDRB Akomodasi dan Makan Minum (AKMAMIN) di destinasi pariwisata adalah nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan dari seluruh aktivitas usaha penyediaan akomodasi dan makan minum seperti hotel, homestay, restoran, kafe, dan usaha sejenis yang beroperasi di suatu destinasi pariwisata dalam periode tertentu.

➤ Nilai investasi sektor pariwisata

- Nilai investasi adalah total nilai penanaman modal yang direalisasikan atau direncanakan dalam suatu wilayah, sektor, atau periode tertentu, baik oleh penanam modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

- Nilai investasi sektor pariwisata adalah total nilai penanaman modal yang ditanamkan pada usaha dan infrastruktur pariwisata dalam suatu wilayah dan periode tertentu, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), yang bertujuan untuk membangun, memperluas, atau meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pariwisata.

➤ **Indeks Kualitas Governans**

Indeks Kualitas Governans (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas tata kelola pemerintahan dan kelembagaan dalam suatu wilayah atau sektor, yang mencerminkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta kapasitas institusi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Indeks Kualitas Governans dalam hal ini merupakan hasil perhitungan dari 3 (tiga) Indikator Penilaian yang meliputi Nilai SAKIP, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI pada Deputi Bidang Industri dan Investasi.

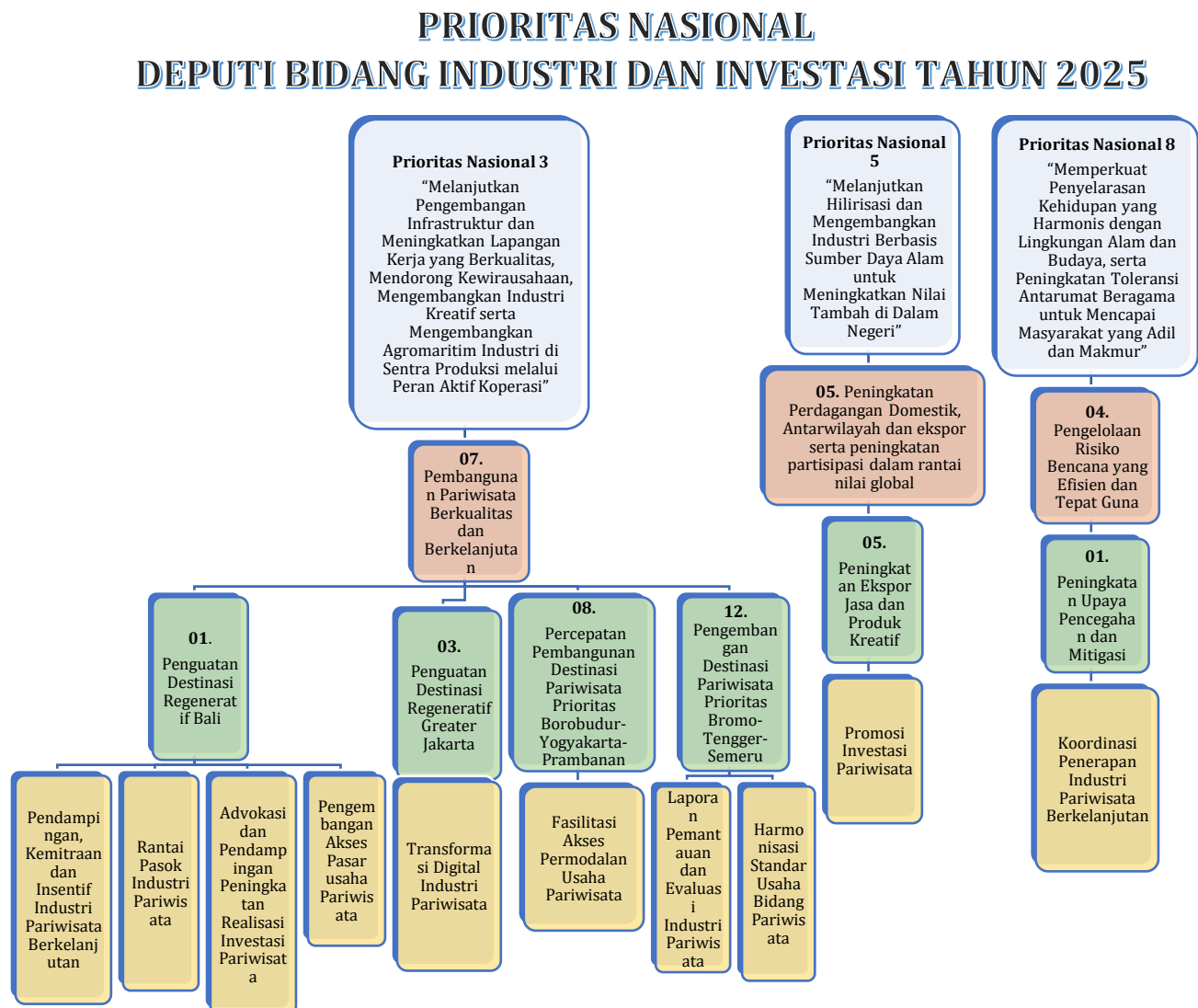
2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Kementerian PPN/Kepala Bappenas merumuskan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Selanjutnya dilakukan pembahasan melalui *multilateral meeting* yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Penyelenggaraan *multilateral meeting* oleh Kementerian PPN/Bappenas dilakukan secara terpisah dan paralel sesuai bidang Prioritas Nasional yang melibatkan Kementerian/ Lembaga (K/L) yang berkontribusi dalam Prioritas Nasional (PN).

Deputi Bidang Industri dan Investasi mendukung **Prioritas Nasional 3** “Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan

Agromaritima Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi”, **Prioritas Nasional 5** “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri” dan **Prioritas Nasional 8** “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”.

Berikut Program dan Kegiatan terkait Prioritas Nasional 2025 yang didukung Deputy Bidang Industri dan Investasi:



Gambar 2. 1 Prioritas Nasional Deputy Bidang Industri dan Investasi

2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2025

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025

Tabel 2. 5 Rencana Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025

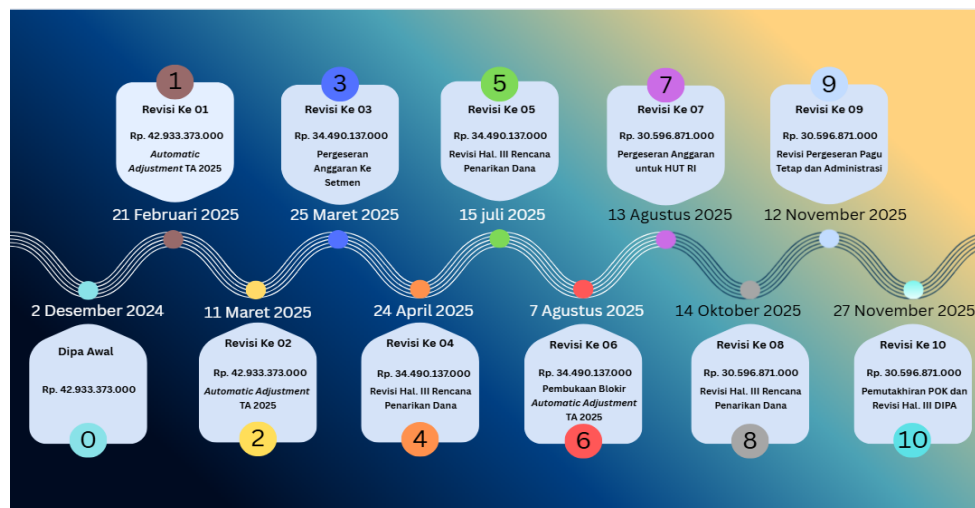
Kode	Nomenklatur Kegiatan/KRO/RO	Target	Satuan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI				29,844,628,000
7218	Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi			2,571,918,000
ADF	Sertifikasi Lembaga			200,000,000
ADF.001	Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	70	Lembaga	200,000,000
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			859,053,000
AFA.001	NSPK Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata	3	NSPK	859,053,000
BIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha			437,562,000
BIH.001	Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pariwisata	7	Badan Usaha	437,562,000
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan			199,800,000
FAB.001	Platform Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	2	Sistem Informasi	199,800,000
PDD	Standarisasi Lembaga			875,503,000
PDD.001	Harmonisasi Standar Usaha Bidang Pariwisata	100	Lembaga	875,503,000
7219	Pengembangan Manajemen Industri			3,122,932,000
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			797,346,000
AFA.001	Penyusunan NSPK Industri Pariwisata	1	NSPK	797,346,000
BMA	Data dan Informasi Publik			200,000,000
BMA.001	Data dan Informasi Industri Pariwisata	1	Data	200,000,000
QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri			1,574,440,000
QDI.001	Rantai Pasok Industri Pariwisata	40	Industri	1,150,000,000
QDI.002	Transformasi Digital Industri Pariwisata	5	Industri	424,440,000
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			551,146,000
UAE.001	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Industri Pariwisata	1	Laporan	551,146,000
7220	Peningkatan Manajemen Investasi			5,383,465,000
ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan			500,000,000
ABB.001	Rekomendasi Kebijakan Investasi Pariwisata	1	Rekomendasi Kebijakan	500,000,000
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri			993,053,000
BDI.001	Dukungan Teknis dan Pendampingan Investasi Pariwisata	30	Industri	993,053,000
PEH	Promosi			3,652,824,000
PEH.001	Promosi Investasi Pariwisata	3	Promosi	3,652,824,000
QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri			237,588,000
QDI.001	Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata	40	Industri	237,588,000
7222	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan			3,390,719,000
BDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			1,086,824,000
BDH.001	Peningkatan Kapasitas Manajemen Usaha	200	Badan Usaha	1,086,824,000
QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			2,303,895,000
QDH.001	Fasilitasi Akses Permodalan Usaha Pariwisata	200	Badan Usaha	1,842,834,000
QDH.002	Pengembangan Akses Pasar Usaha Pariwisata	25	Badan Usaha	461,061,000
7831	Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan			3,451,594,000
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			750,000,000
AFA.001	Penyusunan NSPK Usaha Pariwisata Berkelanjutan	3	NSPK	750,000,000
PEA	Koordinasi			340,000,000
PEA.001	Koordinasi Penerapan Industri Pariwisata Berkelanjutan	1	Kegiatan	340,000,000
QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			2,361,594,000
QDH.001	Pendampingan, Kemitraan dan Insentif Usaha Pariwisata Berkelanjutan	10	Badan Usaha	2,361,594,000
7243	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputy Bidang Industri dan Investasi			11,924,000,000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			8,769,562,000
EBA.994	Layanan Perkantoran Deputy Bidang Industri dan Investasi	1	Layanan	7,297,127,000
EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	888,879,000
EBA.957	Layanan Hukum	1	Dokumen	50,000,000
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Dokumen	213,405,000
EBA.960	Layanan Manajemen Organisasi	1	Laporan	176,951,000
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	143,200,000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			1,718,878,000
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	84	Dokumen	436,236,000
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	513,990,000
EBD.953	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Deputy Bidang Industri dan Investasi	2	Laporan	768,652,000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			150,000,000
EBB.971	Layanan Prasarana Internal Deputy Bidang Industri dan Investasi	1	Unit	150,000,000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			1,285,560,000
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1	Layanan	1,285,560,000

2. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

Alokasi anggaran Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025 mengalami beberapa kali perubahan dari DIPA Awal sampai dengan DIPA Akhir revisi ke-10. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelasnya mengenai *timeline* dan tujuan revisi DIPA dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Revisi DIPA ke-						
	0	1	2	3	4	5
Tanggal	2 Desember 2024	21 Februari 2025	11 Maret 2025	25 Maret 2025	24 April 2025	15 juli 2025
Peruntukan	Dipa Awal	<i>Automatic Adjustment</i> TA 2025	<i>Automatic Adjustment</i> TA 2025	Pergeseran Anggaran Ke Setmen	Revisi Hal. III Rencana Penarikan Dana	Revisi Hal. III Rencana Penarikan Dana
Anggaran	42,933,373,000	42,933,373,000	42,933,373,000	34,490,137,000	34,490,137,000	34,490,137,000

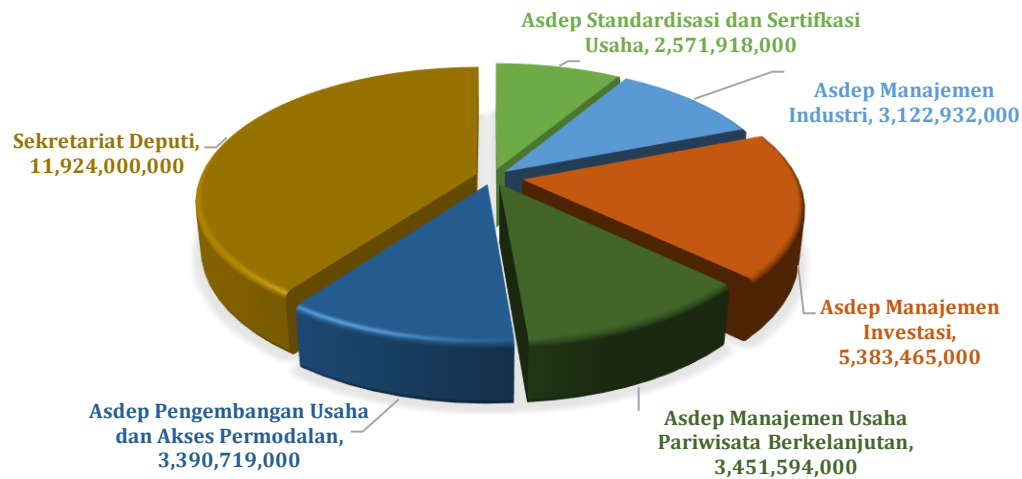
Revisi DIPA ke-					
	6	7	8	9	10
Tanggal	7 Agustus 2025	13 Agustus 2025	14 Oktober 2025	12 November 2025	27 November 2025
Peruntukan	Pembukaan Blokir <i>Automatic Adjustment</i> TA 2025	Pergeseran Anggaran untuk HUT RI	Revisi Hal. III Rencana Penarikan Dana	Revisi Pergeseran Pagu Tetap dan Administrasi	Pemutakhiran POK dan Revisi Hal. III DIPA
Anggaran	34,490,137,000	30,596,871,000	30,596,871,000	30,596,871,000	30,596,871,000



Gambar 2. 2 Perubahan Pagu Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun Anggaran 2025

Pembagian alokasi pagu akhir Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025 berdasarkan kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	PAGU DIPA	BLOKIR	PAGU YANG DAPAT DIMANFAATKAN	% ALOKASI
		(a)	(b)	(c)	(d)
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI		30,596,871,000	752,243,000	29,844,628,000	100%
1	Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	2,571,918,000	0	2,571,918,000	8.62%
2	Manajemen Industri	3,122,932,000	0	3,122,932,000	10.46%
3	Manajemen Investasi	5,383,465,000	0	5,383,465,000	18.04%
4	Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan	3,451,594,000	0	3,451,594,000	11.57%
5	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan	3,390,719,000	0	3,390,719,000	11.36%
6	Sekretariat Deputy	12,676,243,000	752,243,000	11,924,000,000	39.95%



Grafik 2. 1 Pagu Setelah *Automatic Adjustment* Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun Anggaran 2025

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Salah satu alat ukur keberhasilan Deputy Bidang Industri dan Investasi dalam mencapai Sasaran Strategis adalah penetapan Indikator Kinerja sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan perencanaan kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen penugasan dan komitmen kinerja antara pimpinan instansi/pejabat atasan dengan pimpinan unit kerja atau pejabat di bawahnya yang memuat target kinerja, indikator kinerja, dan sumber daya yang digunakan dalam satu periode tertentu. Deputy Bidang Industri dan Investasi mendukung secara langsung Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata yaitu **Sasaran Strategis 1** “Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Kepariwisata” dan **Sasaran Strategis 2** “Meningkatnya Kualitas Governansi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Aparatur” dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSK) sebagai berikut:

1. IKSS 1.1 Rasio PDB Pariwisata
2. IKSS 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Perjanjian kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan disebabkan karena perubahan sasaran dan indikator kinerja pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025-2029 yang menyesuaikan dengan RPJMN 2025-2029. Berikut adalah perjanjian kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025:

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Handayani

Jabatan : Deputy Bidang Industri dan Investasi

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widiyanti Putri

Jabatan : Menteri Pariwisata

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
	
Widiyanti Putri	Rizki Handayani

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah investasi dan kapasitas usaha pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Presentase usaha pariwisata yang berkualitas	43,53%
		2. Nilai realisasi investasi pariwisata	56,8 T
		3. Presentase usaha pariwisata yang memperoleh akses pasar dan permodalan	10%
2.	Transformasi Birokrasi Kemenpar yang berdampak pada kinerja strategis.	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	89
		2. Nilai Evaluasi SAKIP	78

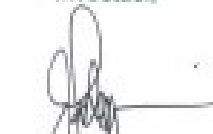
Kegiatan		Anggaran
1. Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha	Rp	4.000.000.000,-
2. Pengembangan Manajemen Industri	Rp	5.500.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Investasi	Rp	9.000.000.000,-
4. Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan	Rp	4.883.373.000,-
5. Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan	Rp	4.550.000.000,-
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Industri dan Investasi	Rp	15.000.000.000,-
Total	Rp	42.933.373.000,-

Jakarta, Januari 2025

Menteri Pariwisata,

Deputi Bidang Industri dan
Investasi,


 Widiyanti Putri


 Rizki Handayani

Perjanjian Kinerja Perubahan Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Handayani
Jabatan : Deputy Bidang Industri dan Investasi

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widiyanti Putri
Jabatan : Menteri Pariwisata

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
	
Widiyanti Putri	Rizki Handayani

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (dalam Jutaan Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif	1. Nilai PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif	331.596.778,60
		i. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur Yogyakarta-Prambanan (juta rupiah)	22.023.561,06
		ii. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali (juta rupiah)	60.288.199,30
		iii. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau (juta rupiah)	6.947.814,54
		iv. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Greater Jakarta (juta rupiah)	211.658.892,86
		v. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramen (juta rupiah)	2.432.513,02
		vi. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang (juta rupiah)	2.837.523,71
		vii. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung (juta rupiah)	3.614.153,73
		viii. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba (juta rupiah)	2.417.786,51
		ix. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat (juta rupiah)	18.196,50
		x. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo	42.889,25
		xi. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru (juta rupiah)	19.273.275,88
		xii. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi (juta rupiah)	39.122,37
		xiii. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai (juta rupiah)	2.849,87
2.	Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif	2. Nilai Investasi Sektor Pariwisata pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif	37.154.372,64
		i. Nilai investasi sektor pariwisata Bali	11.588.448,83

		ii.	Nilai investasi sektor pariwisata Greater Jakarta	16.240.176,28
		iii.	Nilai investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau	1.538.191,03
		iv.	Nilai investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	806.249,89
		v.	Nilai investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	360.397,41
		vi.	Nilai investasi sektor pariwisata Danau Toba	178.340,99
		vii.	Nilai investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramen	3.596.543,27
		viii.	Nilai investasi sektor pariwisata Manado-Likupang	263.796,05
		ix.	Nilai investasi sektor pariwisata Bangka Belitung	85.455,06
		x.	Nilai investasi sektor pariwisata Raja Ampat	29.723,50
		xi.	Nilai investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	2.403.887,91
		xii.	Nilai investasi sektor pariwisata Wakatobi	55.731,56
		xiii.	Nilai investasi sektor pariwisata Morotai	7.430,87
3	Meningkatnya Kualitas Governans Deputi Bidang Industri dan Investasi	Indeks Kualitas Governans Pada Deputi Bidang Industri dan Investasi (nilai)		78,6

Kegiatan	Anggaran	
1. Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi Usaha	Rp	2.571.918.000
2. Pengembangan Manajemen Industri	Rp	3.122.932.000
3. Peningkatan Manajemen Investasi	Rp	5.383.465.000
4. Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan	Rp	3.390.719.000
5. Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan	Rp	3.451.594.000
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Industri dan Investasi	Rp	12.676.243.000
Total	Rp	30.596.871.000

Jakarta, Desember 2025

Menteri Pariwisata,

Deputi Bidang Industri dan
Investasi,
Widiyanti Putri
Rizki Handayani

Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Deputi Bidang Industri dan Investasi tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil capaian kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi pada tahun 2025 dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Tabel Capaian Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas ¹	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur-Yogyakarta- Prambanan 9 (Juta Rp)	22.023.561,06	24.845.280,00	112,81%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali (Juta Rp)	60.288.199,30	71.310.560,00	118,28%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau (Juta Rp)	6.947.814,54	7.457.570,00	107,34%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Greater Jakarta (Juta Rp)	211.658.892,86	244.991.900,00	115,75%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramen (Juta Rp)	2.432.513,02	2.691.880,00	110,66%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang (Juta Rp)	2.837.523,71	3.144.410,00	110,82%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung (Juta Rp)	3.614.153,73	3.918.900,00	108,43%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba (Juta Rp)	2.417.786,51	2.894.990,00	119,74%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat (Juta Rp)	18.196,50	19.260,00	105,84%

		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo (Juta Rp)	42.889,25	53.990,00	125,88%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru (Juta Rp)	19.273.275,88	21.028.400,00	109,11%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi (Juta Rp)	39.122,37	43.340,00	110,78%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai (Juta Rp)	2.849,87	3.000,00	105,27%
2	Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata ²	Nilai investasi sektor pariwisata Bali (Juta Rp)	11.588.448,83	16.052.380,42	138,52%
		Nilai investasi sektor pariwisata Greater Jakarta (Juta Rp)	16.240.176,28	23.744.721,75	146,21%
		Nilai investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau (Juta Rp)	1.538.191,03	2.011.716,61	130,78%
		Nilai investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta- Prambanan (Juta Rp)	806.249,89	1.363.228,87	169,08%
		Nilai investasi sektor pariwisata Labuan Bajo (Juta Rp)	360.397,41	1.741.446,85	483,20%
		Nilai investasi sektor pariwisata Danau Toba (Juta Rp)	178.340,99	43.180,55	24,21%
		Nilai investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramen (Juta Rp)	3.596.543,27	4.324.513,54	120,24%
		Nilai investasi sektor pariwisata Manado-Likupang (Juta Rp)	263.796,05	442.682,56	167,81%
		Nilai investasi sektor pariwisata Bangka Belitung (Juta Rp)	85.455,06	113.770,57	133,13%
		Nilai investasi sektor pariwisata Raja Ampat (Juta Rp)	29.723,50	81.815,43	275,26%
		Nilai investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru (Juta Rp)	2.403.887,91	1.992.084,52	82,87%

		Nilai investasi sektor pariwisata Wakatobi (Juta Rp)	55.731,56	65.444,49	117,43%
		Nilai investasi sektor pariwisata Morotai (Juta Rp)	7.430,87	9.232,95	124,25%
3	Meningkatnya Kualitas Governansi Deputy Bidang Industri dan Investasi ³	Indeks Kualitas Governans Pada Deputy Bidang Industri dan Investasi (nilai)	78,6	89,87	114,34%

Keterangan:

¹Data proyeksi yang diolah Kementerian Pariwisata

²Sumber data capaian: BKPM dan diolah kembali oleh Deputy Bidang Industri dan Investasi

³Capaian masih data sementara, masih terdapat komponen yang belum ada nilainya

Berikut adalah peluang dan tantangan yang dimiliki oleh 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif, sebagai berikut:

NO	DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS DAN DESTINASI REGENERATIF	PELUANG STRATEGIS	TANTANGAN UTAMA
1	Borobudur - Yogyakarta - Prambanan	Daya tarik budaya kelas dunia dan pengembangan kawasan penyangga berbasis desa wisata, Warisan budaya dunia (UNESCO), pengembangan pariwisata budaya dan spiritual berkualitas, Daya tarik <i>heritage</i> dan event budaya, potensi integrasi paket wisata BYP	Pembatasan kunjungan di kawasan inti dan dominasi wisatawan harian, keterbatasan kapasitas destinasi, tekanan daya dukung, ketergantungan pada kunjungan musiman, skala usaha kecil, keterbatasan pembiayaan dan standarisasi
2	Bali	Ekosistem pariwisata matang; transformasi menuju pariwisata berkualitas dan regeneratif, pengembangan <i>wellness tourism</i> , ekonomi kreatif, dan MICE; konektivitas internasional kuat	Ketergantungan tinggi PDRB pada pariwisata; <i>carrying capacity</i> ; ketimpangan manfaat ekonomi
3	Kepulauan Riau	Kedekatan dengan pasar internasional (Singapura-Malaysia); KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) mendukung iklim usaha; potensi wisata bahari, belanja, dan MICE regional	Ketergantungan pada pasar mancanegara tertentu; daya saing regional;

NO	DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS DAN DESTINASI REGENERATIF	PELUANG STRATEGIS	TANTANGAN UTAMA
4	Jakarta	potensi pariwisata perkotaan, MICE, event internasional, dan ekonomi kreatif; konektivitas dan infrastruktur pendukung kuat	Pariwisata bukan sektor utama PDRB; daya tarik rekreasi terbatas; persaingan dengan kota global
5	Lombok - Gili Tramen	Wisata bahari dan alam kelas dunia, daya tarik wisata minat khusus, pengembangan kawasan Mandalika, Keberadaan KEK Pariwisata dan penyelenggaraan event internasional sebagai katalis ekonomi	Fluktuasi aktivitas ekonomi di luar periode penyelenggaraan event, Degradasi lingkungan laut dan pesisir, keterbatasan pembiayaan
6	Manado - Likupang	Penetapan KEK Pariwisata dan potensi pengembangan wisata bahari	Keterbatasan infrastruktur pendukung dan amenities pariwisata
7	Bangka Belitung	KEK Pariwisata sebagai instrumen diversifikasi ekonomi pascatambang	Keterbatasan variasi atraksi wisata dan rendahnya belanja wisatawan
8	Danau Toba	Peningkatan kualitas aksesibilitas dan penguatan UMKM pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi lokal	Permasalahan kualitas lingkungan dan rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan
9	Raja Ampat	Pengembangan wisata alam kelas dunia dengan segmentasi pasar premium	Biaya akses dan investasi tinggi serta keterbatasan infrastruktur dasar
10	Labuan Bajo	Pengembangan destinasi wisata premium dan peningkatan konektivitas transportasi	Keterbatasan daya dukung lingkungan dan kapasitas layanan dasar
11	Bromo-Tengger-Semeru	Tingginya minat kunjungan wisata dan kedekatan dengan pusat ekonomi regional	Pembatasan pembangunan akibat status kawasan konservasi dan risiko lingkungan
12	Wakatobi	Daya tarik wisata selam kelas dunia dan pengembangan pariwisata berbasis konservasi	Aksesibilitas yang terbatas serta tingginya biaya transportasi
13	Morotai	Potensi wisata bahari dan sejarah serta dukungan kebijakan pemerintah pusat	Aksesibilitas dan logistik yang mahal serta skala pasar terbatas

Hasil realisasi atas indikator kinerja dari setiap sasaran Deputy Bidang Industri dan Investasi diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

1. Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas

Tabel 3. 2 Capaian Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Juta Rp)	Realisasi ¹ (Juta Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Regeneratif dan Prioritas	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Borobudur- Yogyakarta- Prambanan 9 (Juta Rp)	22.023.561,06	24.845.280,00	112,81%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bali (Juta Rp)	60.288.199,30	71.310.560,00	118,28%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kepulauan Riau (Juta Rp)	6.947.814,54	7.457.570,00	107,34%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Greater Jakarta (Juta Rp)	211.658.892,86	244.991.900,00	115,75%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Lombok-Gili Tramen (Juta Rp)	2.432.513,02	2.691.880,00	110,66%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Manado-Likupang (Juta Rp)	2.837.523,71	3.144.410,00	110,82%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bangka Belitung (Juta Rp)	3.614.153,73	3.918.900,00	108,43%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Danau Toba (Juta Rp)	2.417.786,51	2.894.990,00	119,74%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Raja Ampat (Juta Rp)	18.196,50	19.260,00	105,84%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Labuan Bajo (Juta Rp)	42.889,25	53.990,00	125,88%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Bromo-Tengger-Semeru (Juta Rp)	19.273.275,88	21.028.400,00	109,11%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Wakatobi (Juta Rp)	39.122,37	43.340,00	110,78%
		PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Morotai (Juta Rp)	2.849,87	3.000,00	105,27%

Keterangan: ¹Data proyeksi yang diolah Kementerian Pariwisata

Target dan capaian indikator kinerja **Meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif** Tahun 2025 adalah sebagaimana data yang tertuang pada tabel diatas, capaian-capaian tersebut diperoleh melalui formula/cara hitung sebagai berikut:

1. Ambil data PDRB dari BPS Pusat/BPS Provinsi;
2. Identifikasi Deliniasi Kabupaten/Kota yang masuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif;
3. Identifikasi dan hitung data PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sesuai Deliniasi yang telah ditetapkan;
4. Lakukan validasi bersama Biro Data dan Sistem Informasi terhadap data PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Saat ini, Badan Pusat Statistik belum merilis data PDRB menurut Kabupaten/Kota secara tahunan, data tersebut baru tersedia pada bulan Maret 2026. Sehingga data capaian indikator kinerja PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Prioritas dan Regeneratif yang ditampilkan masih menggunakan data proyeksi yang diolah oleh Kementerian Pariwisata sampai dengan data capaian final tersedia pada bulan Maret 2026.

Berdasarkan hasil proyeksi, PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif secara keseluruhan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini tentu saja tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak dan kebijakan-kebijakan yang mendukung tercapainya target PDRB tersebut. Berikut adalah faktor-faktor dan program Kementerian Pariwisata yang mempengaruhi tercapainya target PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Regeneratif:

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan

Sebagian besar destinasi pariwisata prioritas dan destinasi regeneratif mengalami kenaikan jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan indikator kunjungan wisatawan pada tahun 2025 memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum (AKMAMIN). Kenaikan jumlah wisatawan, baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman), berdampak langsung pada peningkatan tingkat hunian kamar (*occupancy rate*), lama tinggal (*length of stay*), serta rata-rata pengeluaran wisatawan (*average spending*).

2. Masuknya investasi baru dan penguatan UMKM kuliner berbasis lokal
Bertambahnya hotel, restoran, café dan usaha kuliner lokal. Sektor akomodasi dan makanan dan minuman mencatat pertumbuhan sekitar 8-9% pada tahun 2025 di beberapa wilayah/klaster ekonomi utama Indonesia.
3. Koordinasi Penyiapan paket wisata libur panjang (Lebaran dan Natal 2025)
Kementerian Pariwisata telah berkoordinasi dengan para travel agent untuk menyiapkan paket wisata khusus libur panjang lebaran dan natal 2025
4. Surat Menteri Pariwisata kepada *Online Travel Agent* (OTA) terkait Penerapan Kebijakan Pemerintah atas Harga Tiket Angkutan Udara selama Natal 2025
5. Surat Edaran Menteri Pariwisata kepada Pemerintah Daerah, Asosiasi, dan Pelaku Usaha Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada libur Natal 2025
6. Kampanye pariwisata & promosi destinasi #DiIndonesiaAja
Kementerian Pariwisata meluncurkan kampanye promosi besar-besaran untuk periode libur panjang, seperti:
 - Kampanye #DiIndonesiaAja #BanggaBerwisatadiIndonesia untuk mendorong wisata domestik.
 - Kampanye liburan #MudikYuk dan #LebaranDiJakartaAja yang dirancang untuk mendistribusikan arus wisatawan dan meningkatkan kunjungan di berbagai destinasi.

Promosi ini dilakukan untuk meningkatkan *awareness* dan minat wisatawan nusantara terhadap berbagai destinasi prioritas Indonesia selama libur panjang.

Untuk mendukung pencapaian target meningkatnya PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Destinasi Prioritas dan Regeneratif, Deputy Bidang Industri dan Investasi melaksanakan berbagai strategi, antara lain:

a. Penguatan Kebijakan Industri Pariwisata

Program penguatan kebijakan industri pariwisata menjadi sangat penting sebagai fondasi, arah, dan peningkatan daya saing sektor pariwisata Indonesia. Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan utama yaitu:

1. Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 6 Tahun 2025 disusun sebagai bentuk turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang perlu dioperasionalkan di sektor Pariwisata. Diperlukan adanya pengaturan standar kegiatan usaha, tata cara pelaksanaan pengawasan dan sanksi administratif di sektor pariwisata sebagai bagian dari penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Berikut adalah timeline penyusunan Permenpar 6 Tahun 2025:



Dengan terbitnya Permenpar 6 Tahun 2025 ini diharapkan terwujudnya peningkatan standar usaha pariwisata terutama dari sisi pelayanan, kenyamanan, kebersihan dan keselamatan, yang ujungnya adalah peningkatan spending wisatawan dan tercapainya pariwisata berkualitas



Dokumentasi Penyusunan Permenpar 6 Tahun 2025



2. Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 tahun 2025

Setelah penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 sebagai regulasi baru yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko, Asisten Deputy Standardisasi dan Sertifikasi Usaha melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi di sejumlah daerah dalam rangka memberikan pemahaman kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah, baik melalui offline maupun online.

1) Jawa Barat

- Pada 11 November 2025, dilaksanakan sosialisasi Permenpar No 6 Tahun 2025 kepada LSPr melalui Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Sektor Pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat (bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional)

- Pada 13 November 2025, dilaksanakan Sosialisasi Permenpar Nomor 6 tahun 2025 melalui Kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat.



2) Wonosobo

Pada 19 November 2025, dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 melalui Workshop Standardisasi dan Sertifikasi Usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.



3. Penyusunan Rancangan Perpres IQTF

1) Konsinyering IQTF

Dalam rangka menindaklanjuti arahan pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mempercepat penyusunan dan pematangan Rancangan Peraturan Presiden tentang *Indonesia Quality Tourism Fund* (IQTF), telah dilaksanakan Rapat Konsinyering Penyusunan RPerpres IQTF. Rapat Konsinyering Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang *Indonesia Quality Tourism Fund* (IQTF) dilaksanakan pada Jumat, 16 Mei 2025, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Rapat ini bertujuan untuk menyusun naskah urgensi sebagai dasar percepatan pengesahan regulasi serta memastikan

kesiapan alokasi pendanaan pada tahun 2025 dan 2026. Pembahasan difokuskan pada penajaman substansi RPerpres, termasuk kerangka pendanaan dan tata kelola dana pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut disepakati perluasan tujuan pemanfaatan IQTF untuk mendukung penyelenggaraan event dan pengembangan pariwisata yang berdampak pada ekonomi lokal dan nasional. IQTF diusulkan memiliki empat pilar pendanaan, yaitu penguatan destinasi melalui peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, fasilitas dasar, dan MICE; pengembangan produk dan atraksi wisata termasuk subsidi transportasi wisata; pengembangan sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi dan *upskilling* mitigasi risiko kepariwisataan; serta pelaksanaan event yang mencakup pembiayaan *hosting fee*, *license fee*, *booking fee*, dan komponen pendukung lainnya. Skema pendanaan IQTF dapat berupa hibah, investasi, maupun pinjaman, dengan prioritas pada kegiatan yang memiliki nilai ekonomi dan berkelanjutan, termasuk pendanaan awal yang bersifat *non-bankable* sebagai pemantik pelaksanaan event.

Selain itu, dibahas pula potensi sumber pendanaan IQTF yang tidak hanya berasal dari APBN, melainkan juga dari kerja sama dengan lembaga internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank (ADB). Kementerian Pariwisata diharapkan berperan sebagai leading sector sekaligus hub dalam mengkoordinasikan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Dari aspek legal dan tata kelola, perlu dimasukkan pengaturan mengenai revolving fund, pengelolaan dana oleh lembaga profesional, serta mekanisme penyaluran dana melalui BPD LH dengan pencatatan pembukuan pada DIPA Kementerian Pariwisata. Pendanaan IQTF diarahkan untuk aspek strategis, sementara pembangunan fisik berskala besar tetap bersumber dari APBN, dengan ketentuan teknis yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan turunan.

Rapat juga menekankan pentingnya harmonisasi RPerpres IQTF dengan regulasi lain, termasuk penyesuaian definisi yang masih menunggu pembahasan RUU Pariwisata, serta mitigasi potensi tumpang tindih dengan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN). Lokus pendanaan diutamakan pada Destinasi Pariwisata Prioritas, daerah pariwisata regeneratif, dan Kawasan Ekonomi Khusus, dengan tetap membuka peluang pendanaan bagi proposal di luar lokus tersebut. Sebagai tindak lanjut, pembahasan DIM untuk ruang lingkup telah diselesaikan, sementara aspek tata kelola dan kelembagaan akan segera dimatangkan. Disepakati penyusunan timeline penyelesaian RPerpres dengan target selesai pada Juni 2025, penjadwalan rapat tingkat Eselon I untuk penetapan pemrakarsa dan cakupan IQTF, pelaksanaan benchmarking ke negara yang telah menerapkan skema serupa, serta pelaksanaan rapat teknis lanjutan pada 19 Mei 2025.



2) FGD Penyusunan Perpres IQTF

Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Pariwisata Berkualitas (*Indonesia Quality Tourism Fund / IQTF*) dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025 di Hotel Borobudur Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mematangkan substansi kebijakan, aspek kelembagaan, pendanaan, serta tata kelola IQTF sebagai instrumen pendanaan pariwisata berkelanjutan. FGD dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu rapat tingkat Eselon I dan rapat tim teknis, dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, BPD LH, serta kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pada sesi rapat tingkat Eselon I yang dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, disepakati bahwa IQTF perlu dirancang untuk memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ekosistem pariwisata, termasuk dukungan kepada UMKM. Dibahas pula opsi mekanisme penyampaian RPerpres IQTF kepada Presiden melalui rapat terbatas atau pengajuan izin prakarsa, dengan penekanan pada pentingnya pelaporan ruang lingkup baru dan progres penyusunan regulasi untuk memperoleh arahan Presiden, sehingga kesiapan anggaran dapat segera dilakukan. Aspek kelembagaan IQTF secara *ex-officio* berada di Kementerian Pariwisata, dengan catatan perlunya penguatan sumber daya manusia. Selain itu, disepakati bahwa Dewan Ekonomi Nasional dan Kementerian Ekonomi Kreatif berperan sebagai mitra strategis, bukan sebagai bagian dari Dewan Pengarah, serta perlunya penyesuaian narasi kebijakan agar sejalan dengan program prioritas Presiden yang berorientasi pada dampak langsung bagi masyarakat.

Sesi rapat tim teknis membahas secara mendalam aspek pengadaan barang dan jasa, struktur pengelolaan dana, serta ruang lingkup dan *legal drafting* RPerpres IQTF. Terkait pengadaan barang dan jasa, disepakati bahwa dana IQTF yang dikelola oleh BPD LH sebagai Badan Layanan Umum dikecualikan dari mekanisme pengadaan pemerintah pada umumnya, sehingga ketentuan pengadaan tidak perlu dimuat dalam batang tubuh RPerpres dan cukup diatur dalam peraturan turunan. Mekanisme bantuan pemerintah dalam bentuk hibah diposisikan sebagai penyaluran langsung berbasis proposal, dengan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian output. Dari sisi pengelolaan dana, dibahas pengaturan dana kelolaan, investasi dana abadi, mekanisme pengembalian dana hibah untuk

mencegah *moral hazard*, serta potensi keterlibatan pendanaan internasional melalui *pooling fund* yang dikelola BPD LH.

Pembahasan ruang lingkup dan perumusan pasal difokuskan pada penajaman definisi kegiatan pariwisata berkualitas, pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan, serta keberpihakan terhadap UMKM dan kelompok masyarakat berbadan hukum seperti pokdarwis. Kriteria pendanaan diarahkan tidak hanya pada dampak ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial budaya dan lingkungan dengan pendekatan ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Selain itu, disepakati perlunya pengaturan yang lebih rinci mengenai sumber dana dan kontribusi atau dana pengembalian dari penerima, termasuk pembagian kantong pendanaan antara hibah murni dan hibah dengan mekanisme pengembalian, yang secara operasional dikelola oleh BPD LH.

Sebagai tindak lanjut, disepakati untuk melakukan peninjauan kembali terhadap bab penyaluran dan sumber dana dalam RPerpres IQTF, melakukan simulasi pendanaan pada beberapa contoh kegiatan untuk mengidentifikasi implikasi regulasi, serta membagikan hasil rapat dan matriks Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna memastikan kesamaan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan dan langkah implementasi IQTF ke depan.



3) Konsultasi Publik dan Rapat Panitia Antar Kementerian tentang RPerpres Dana Pariwisata Berkualitas (IQTF)

Telah dilaksanakan Konsultasi Publik dan Rapat Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian (PAK) terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Pariwisata Berkualitas (Indonesia Quality Tourism Fund/IQTF) pada Jumat, 26 September 2025 secara hybrid dari Harris Hotel & Conventions Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, akademisi, serta pelaku industri. Konsultasi publik dibuka oleh Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Kemenko Perekonomian yang menekankan peran strategis pariwisata sebagai sektor dengan multiplier effect tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, pengentasan kemiskinan, serta penguatan soft diplomacy Indonesia, dengan target peningkatan kontribusi pariwisata hingga 8% terhadap PDB pada tahun 2030.

Dalam forum konsultasi publik, disampaikan bahwa pembentukan IQTF merupakan inisiatif strategis untuk menghadirkan mekanisme pendanaan khusus guna mendukung transformasi pariwisata berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. IQTF dirancang sebagai dana abadi yang dikelola oleh BPD LH, dengan prinsip bahwa dana pokok diinvestasikan untuk jangka panjang dan pemanfaatan dilakukan melalui hasil pengelolaan. Dana ini akan mendukung berbagai *window* pendanaan, antara lain pengembangan destinasi, penciptaan lapangan kerja, promosi pariwisata, serta pengembangan masyarakat dan budaya, dengan fokus pada *quality tourism* dan bukan pariwisata massal. Pemerintah daerah, asosiasi, dan akademisi menyampaikan berbagai masukan, antara lain pentingnya inklusivitas pemohon, dukungan bagi event berkelanjutan, pengembangan pasar, penguatan SDM dan pendidikan pariwisata, serta perlunya akuntabilitas, pengawasan, dan keterlibatan industri dalam *advisory board* IQTF. Selanjutnya, Rapat PAK IQTF membahas redaksi pasal demi pasal RPerpres dan secara umum telah mencapai kesepakatan, dengan beberapa catatan yang perlu disempurnakan, khususnya terkait pengaturan kontribusi pemohon dana program serta kelembagaan pengelola program. Mengingat keterbatasan waktu,

rapat PAK ini menjadi rapat terakhir sebelum RPerpres IQTF melanjutkan ke tahap harmonisasi. Sebagai tindak lanjut, Kemenko Perekonomian akan merevisi seluruh masukan pemangku kepentingan, menyempurnakan redaksi pasal yang masih terbuka, melaksanakan harmonisasi pada Oktober 2025, serta menyiapkan sosialisasi dan penyusunan aturan turunan guna mendukung implementasi IQTF secara efektif.



4) Rapat Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian (PAK) IQTF

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF), telah dilaksanakan rapat pembahasan muatan substansi RPerpres IQTF pada Senin, 1 September 2025 di Lune Ballroom, Mövenpick Hotel. Rapat ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, BPD LH, serta Tim Teknis dan Panitia Antarkementerian/Non-Kementerian IQTF. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan konsep, substansi, serta landasan hukum pembentukan Dana Pariwisata Berkualitas sebagai instrumen pendanaan pengembangan pariwisata nasional. Pembahasan utama rapat difokuskan pada perumusan konsep Dana Pariwisata Berkualitas, termasuk penegasan bahwa aspek keberlanjutan telah terintegrasi dalam definisi “pariwisata berkualitas” sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan umum, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam judul Peraturan Presiden. Selain itu, disepakati penggunaan istilah “pendanaan”

sebagai pengganti “pembiayaan” guna menegaskan karakter belanja negara, serta pengaturan Dana Abadi Pariwisata Berkualitas yang hanya dapat dimanfaatkan dari hasil kelolaan dana, dengan kemungkinan penggunaan dana pokok secara terbatas dalam kondisi darurat dan melalui mekanisme persetujuan yang ketat. Rapat juga menegaskan penguatan ekosistem pendanaan pariwisata melalui skema dana program, *catalytic fund*, dan *blended finance* yang diharapkan dapat menarik partisipasi donor serta mendukung pengembangan pariwisata berkualitas. Disepakati pula bahwa RPerpres IQTF berfokus pada aspek pengembangan pariwisata dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan pembahasan RUU Kepariwisata yang sedang berjalan. Sebagai tindak lanjut, pembahasan RPerpres IQTF akan dilanjutkan dengan penyempurnaan redaksional, penguatan aspek hukum melalui pelibatan Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengaturan prioritas pendanaan yang ditetapkan secara strategis oleh Dewan Pengarah setiap tahun.

b. Tata Kelola Usaha Pariwisata

Program Tata kelola usaha pariwisata penting karena menjadi fondasi terciptanya usaha pariwisata yang legal, berkualitas, berdaya saing, berkelanjutan, serta berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Program ini diimplementasikan melalui beberapa kegiatan utama yaitu:

1. Pendampingan dan Pembinaan Langsung Akomodasi Non-Resmi

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari upaya penataan industri pariwisata, khususnya di sektor akomodasi. Sasaran utama kegiatan ini adalah mengintegrasikan usaha akomodasi non resmi ke dalam kerangka regulasi yang sah. Upaya ini bertujuan untuk memberikan edukasi, memfasilitasi proses perizinan berusaha, serta mendorong peningkatan standar layanan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menciptakan kepatuhan regulasi, tetapi juga memperluas basis usaha pariwisata yang berkualitas, legal, dan berkontribusi optimal terhadap

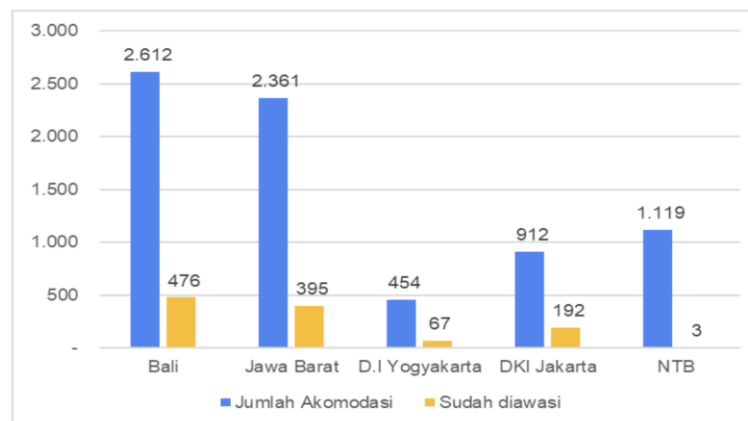
perekonomian daerah. Berikut Capaian Jumlah Akomodasi Airbnb yang telah diawasi pada 5 Provinsi.

Table 3.3 Data akomodasi Airbnb yang sudah diawasi

Provinsi	Jumlah Akomodasi	Sudah Diawasi	%
Bali	2.612	476	18%
Jawa Barat	2.361	395	17%
DI Yogyakarta	454	67	13%
DKI Jakarta	912	192	21%
NTB	1.119	3	0.3%
Total Data	7.458	1.133	15%

Sumber: Dashboard I-Par per 12 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, total Akomodasi Airbnb yang ada di aplikasi I-Par sebanyak **7.458 unit akomodasi** dan sebesar 15% atau 1.133 unit sudah dilakukan Pendataan & Pengawasan. Provinsi Bali dan Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah akomodasi Airbnb terbanyak berturut-turut yaitu: 2.612 Akomodasi di Bali; dan 2.361 Akomodasi di Jawa Barat.



Gambar 3. 1 Data akomodasi Airbnb yang sudah diawasi

Sumber: Dashboard I-Par

Berdasarkan Gambar 3.1, Jumlah akomodasi yang belum dapat diawasi masih signifikan di setiap daerah pengawasan. Khusus di Provinsi NTB, persentase

akomodasi yang sudah diawasi masih di bawah 1%, yang disebabkan oleh kegiatan pembinaan yang baru dimulai pada tanggal 28 November 2025.

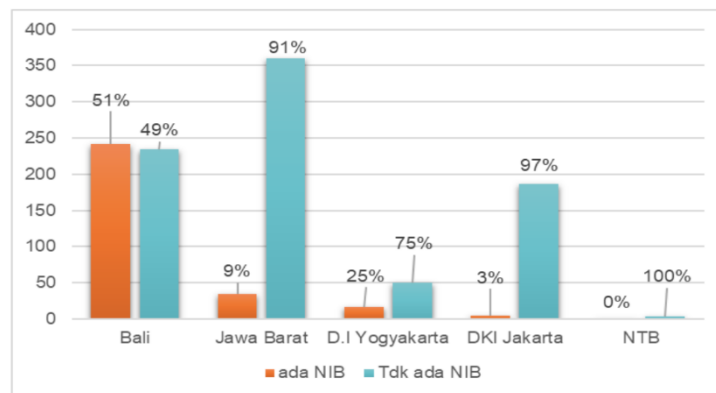
Tabel 3. 3 Data Akomodasi Airbnb yang sudah diawasi dan terdaftar

Provinsi	Sudah Diawasi	Ada NIB	Tidak ada NIB
Bali	476	242	234
Jawa Barat	395	35	358
DI Yogyakarta	67	17	50
DKI Jakarta	192	5	187
NTB	3	0	4
Total Data	1.133	299	834

Sumber: Dashboard I-Par

Berdasarkan Tabel 3.4. Dari total data 1.133 akomodasi yang sudah dilakukan pendataan pengawasan, terdapat:

- 299 unit memiliki NIB, dan
- 834 unit teridentifikasi belum memiliki NIB



Gambar 3. 2 Data perbandingan akomodasi Airbnb yang terdaftar

Sumber: Dashboard I-Par

Berdasarkan Gambar 3.2. Perbandingan antara data akomodasi dengan NIB dan tanpa NIB, yaitu:

- Bali : 51% ada NIB & 49% tanpa NIB

- Jawa Barat : 9% ada NIB & 91% tanpa ada NIB
- D.I.Y : 25% ada NIB & 75% tanpa ada NIB
- DKI Jakarta : 3% ada NIB & 97% tanpa ada NIB
- NTB : 100% ada NIB

Dari hasil pengawasan di dapati bahwa sebagian besar akomodasi teridentifikasi masih belum resmi atau belum memiliki NIB.

Kegiatan pendampingan dan pembinaan akomodasi non-resmi merupakan kegiatan yang sangat diperlukan, kegiatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini belum tercatat, sehingga aktivitas ekonomi tercatat dalam statistik PDRB dan menjadikan aktivitas ekonomi yang sebelumnya *invisible* menjadi kontributor nyata terhadap PDRB.

2. Monitoring Evaluasi Pendampingan dan Pembinaan Langsung Akomodasi Non-Resmi

Tabel 3. 4 Jumlah Responden Monitoring Evaluasi Akomodasi Non-Resmi

Tanggal Moneyv	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
24 Oktober 2025	DI Yogyakarta	5
11 November 2025	Bali	9
12 November 2024	Jawa Barat	10
TOTAL RESPONDEN		24

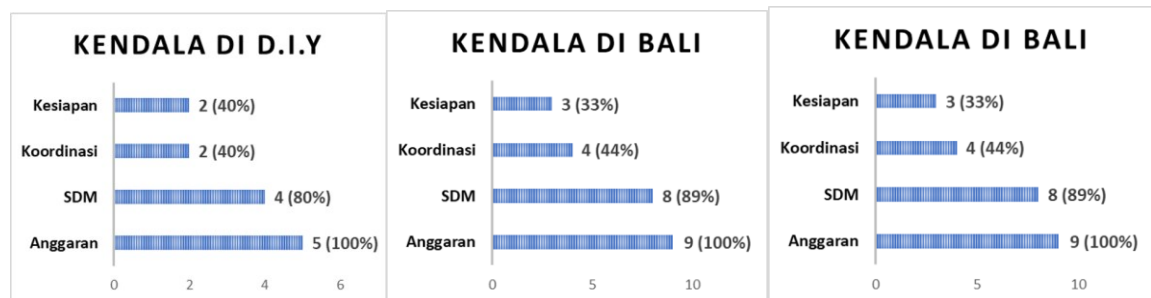
Sumber Data: Hasil Survey Pengawasan

Berdasarkan Tabel 3.5. Didapatkan 24 responden dalam pelaksanaan survey monitoring evaluasi pendampingan dan pembinaan langsung akomodasi non-resmi di 3 lokasi.

Kendala Teknis Pendampingan dan Pembinaan Langsung Akomodasi Non-Resmi

Secara Garis Besar, kendala Internal yang menyebabkan progress Pengawasan di 3 daerah ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kendala/faktor Utama yaitu:

- 1) Anggaran: Kendala yang berkaitan dengan anggaran daerah untuk melakukan kegiatan ini.
- 2) SDM: Kendala yang berkaitan dengan personel/petugas untuk pengawasan.
- 3) Koordinasi: Kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan lintas OPD
- 4) Kesiapan: Kesiapan daerah untuk melakukan kegiatan ini



Gambar 3. 3 Data Persentase Faktor Kendala Teknis Monev Akomodasi

Sumber Data: Hasil Survey Pengawasan

Berdasarkan Gambar diatas dari hasil monitoring & evaluasi yang sudah di lakukan di D.I Yogyakarta, Bali, dan Jawa Barat, diketahui:

- 1) Faktor utama yang mempengaruhi progress pengawasan akomodasi Non Resmi adalah Faktor Anggaran, dimana semua kab/kota yang berjumlah 24 daerah mengatakan Faktor Anggaran sebagai faktor utama progress pengawasan.
- 2) Disusul dengan faktor SDM dengan persentase 80-90% di setiap daerah.
- 3) Di Jawa Barat, Faktor Kesiapan menjadi faktor ketiga yang menghambat progress Pengawasan, dikarenakan banyak tupoksi lain.
- 4) Prov. Bali, faktor ketiga progress pengawasan berkaitan dengan koordinasi lintas OPD, beberapa daerah di Bali membutuhkan kolaborasi dengan OPD lain untuk melakukan kegiatan ini.

Data Kendala Teknis di lapangan adalah catatan terperinci mengenai kendala yang ditemukan saat melakukan pendataan dan pengawasan, yang diinput ke dalam aplikasi I-Par. Adapun data jumlah dan rincian kendala teknis di lapangan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Data Rincian Kendala Teknis Monitoring & Evaluasi

Provinsi	Sudah Diawasi	Kendala Teknis	Jumlah Kendala		%	
DI Yogyakarta	67	Sulit identifikasi hunian Apartemen	34	51%	20	59%
		Tidak bertemu dengan pemilik			8	24%
		Titik koordinat tidak sesuai			3	9%
		Dan lain - lainnya			3	9%
Bali	476	Tidak bertemu dengan pemilik	104	22%	51	49%
		Diluar area pengawasan			33	32%
		Lokasi tidak ada/tidak sesuai			11	11%
		Dan lain - lainnya			9	9%
Jawa Barat	395	Diluar area pengawasan	273	69%	222	81%
		Lokasi tidak ada/tidak sesuai			37	14%
		Tidak bertemu dengan pemilik			8	3%
		Dan lain - lainnya			6	2%
Total	938		411	44%		

Sumber Data: Hasil Survey Pengawasan

Berdasarkan tabel diatas, dari 3 lokasi (Bali, DIY, dan Jawa Barat) yang sudah dilakukan pengawasan, didapati ada sekitar 411 / sekitar 44% kendala teknis. Adapun catatan terkait kendala teknis pada 3 lokasi tersebut, antara lain:

1) D.I YOGYAKARTA

- Kendala yang paling banyak ditemukan saat melakukan pendataan dan pengawasan adalah petugas sulit melakukan identifikasi Hunian Apartemen,

karena data dari platform Airbnb tidak menyebutkan lokasi detail posisi akomodasi yang disewakan. disisi lain,

- Apartemen yang disewakan dalam platform OTA juga tidak termasuk dalam sektor Pariwisata yang diampu oleh Kemenpar, Kemenpar hanya mengampu Apartemen Hotel yang secara manajemen dikelola seperti Hotel.

2) BALI

- Kendala teknis yang paling banyak ditemukan adalah, sulit bertemu dengan pengelola atau Pemilik Akomodasi, dikarenakan Pengelola tidak memahami perihal regulasi dan Pemilik/owner berada/tinggal di lokasi lain
- Masih ada beberapa data akomodasi di luar area pengawasan.

3) JAWA BARAT

- Kendala teknis yang paling banyak ditemukan di Jawa Barat adalah masih ada banyak data akomodasi di luar area pengawasan, dan
- Beberapa lokasi akomodasi tidak ditemukan atau tidak sesuai.

3. Tata Kelola *Online Travel Agent* (OTA)

Perkembangan digitalisasi di sektor pariwisata membuka peluang munculnya model bisnis baru, termasuk platform *Online Travel Agent* (OTA) asing yang menyediakan layanan pemesanan akomodasi, tiket transportasi, dan paket wisata di Indonesia. Namun, sebagian besar OTA asing tersebut belum memenuhi persyaratan legalitas sesuai regulasi nasional. Kondisi ini menimbulkan sejumlah tantangan, antara lain:

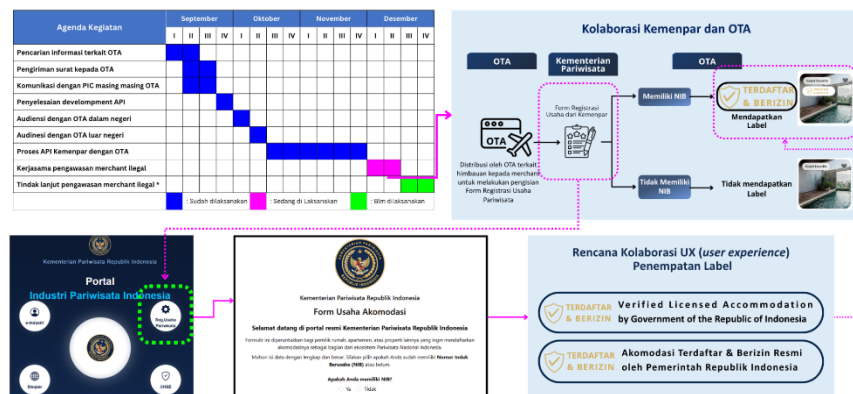
- 1) Kesenjangan persaingan usaha antara OTA asing yang belum memiliki izin dengan OTA domestik yang telah memenuhi ketentuan perizinan, perpajakan, dan kewajiban hukum.
- 2) Potensi kehilangan penerimaan negara, karena OTA asing tidak memiliki kewajiban membayar pajak secara proporsional.
- 3) Minimnya pengawasan dan integrasi data, mengingat OTA asing belum terhubung dengan sistem pelaporan industri pariwisata nasional, termasuk kontribusi terhadap data statistik sektor.



Audiensi Menteri Pariwisata dengan OTA

Oleh karena itu, seluruh mitra usaha yang terdaftar di platform OTA diwajibkan memiliki izin usaha yang lengkap. Ketentuan ini penting untuk memastikan keadilan dalam persaingan usaha, menjaga potensi penerimaan negara, serta melindungi konsumen dari risiko layanan akomodasi yang tidak resmi.

Sebagai langkah tindak lanjut, Deputy Bidang Industri dan Investasi telah berkoordinasi dengan seluruh OTA dan menyiapkan formulir registrasi ulang untuk pendataan pelaku usaha yang sudah tercatat pada masing-masing platform. Pendataan ini bertujuan mengidentifikasi pelaku usaha yang telah memiliki izin maupun yang belum berizin.



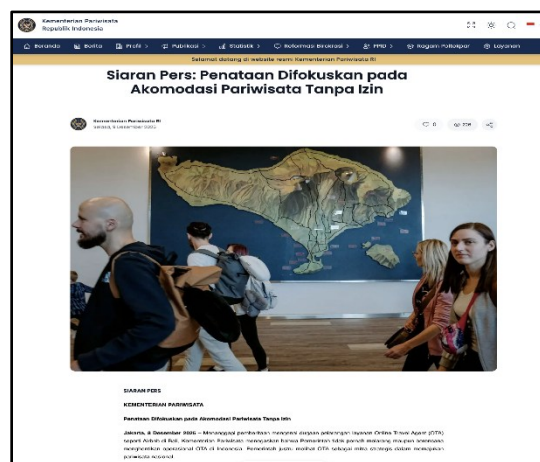
Gambar 3. 4 Alur perkembangan penataan akomodasi OTA

Setelah data terkumpul, Deputy Bidang Industri dan Investasi akan menyiapkan dashboard khusus yang digunakan oleh OTA untuk memberikan label “Terdaftar dan Berizin” bagi pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan. Sementara itu, pelaku

usaha yang belum berizin akan diberikan batas waktu tertentu untuk mengurus perizinan. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka pelaku usaha yang tidak berizin akan dikeluarkan (*takeout*) dari platform OTA.

Melalui Tata Kelola Online Travel Agent (OTA) akan semakin banyak pencantuman usaha akomodasi pariwisata yang legal dan berstandar. Sehingga dapat menghasilkan transaksi ekonomi pariwisata yang tercatat dan terkelola dengan baik.

4. Penerbitan Siaran Pers: Penataan Difokuskan pada Akomodasi Pariwisata Tanpa Izin



Siaran Pers Penataan Akomodasi Pariwisata

c. Penguatan Penerapan Standar Usaha Pariwisata

Program penguatan penerapan standar usaha pariwisata adalah upaya terintegrasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan standar usaha, tidak hanya sebagai bagian dari perizinan berusaha, tetapi juga sebagai upaya dalam peningkatan kualitas usaha pariwisata. Program ini diimplementasikan dalam beberapa kegiatan utama yaitu:

1. Forum Komunikasi Pengawasan Standar Usaha Pariwisata

Kegiatan ini merupakan wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, asosiasi dan mitra strategis lainnya untuk berbagi pengalaman dan ide,

serta memberikan solusi konkret dalam mewujudkan pariwisata Indonesia yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan.

Diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2025 secara *Hybrid* dengan kegiatan luring di Hotel Grand Mansion Menteng, Jakarta, kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Menyatukan pemahaman antar stakeholder (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, serta asosiasi mengenai pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 2) Mendorong harmonisasi kebijakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko lintas sektor;
- 3) Menyerap aspirasi stakeholder dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko lintas sektor;
- 4) Mengidentifikasi dan memetakan stakeholder dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- 5) Merumuskan rencana tindak lanjut dalam implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang efektif, adaptif dan berkelanjutan sesuai dinamika yang berkembang.

Kegiatan ini dihadiri oleh 150 peserta luring dan 476 peserta daring yang mewakili 51 Badan Usaha dan 34 Dinas Pariwisata.



Dokumentasi Kegiatan
Forum Komunikasi Pengawasan Standar Usaha Pariwisata

Melalui pengawasan dan pembinaan usaha pariwisata yang terkoordinasi dalam penerapan dan implementasi standar usaha pariwisata, harapannya dapat

meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan wisatawan terhadap pariwisata Indonesia, sehingga tingkat kunjungan wisatawan bertambah dan mendorong peningkatan omzet dan produktivitas usaha pariwisata.

2. *Coaching Clinic* Penerapan Standar Usaha Jasa Boga dan Bar

Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 Juli 2025 di Hotel Grand Mansion Jakarta, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha jasa boga dan bar, meningkatkan praktik pelaku pariwisata menjadi berdaya saing dan berkelanjutan serta meningkatkan kesiapan pelaku usaha untuk melakukan proses sertifikasi usaha. Kegiatan ini dihadiri oleh **75 peserta yang mewakili 38 Badan Usaha** (Asosiasi, Usaha Perseorangan, dan Lembaga Sertifikasi Usaha).



Dokumentasi Kegiatan Coaching Clinic Penerapan Standar Usaha Jasa Boga dan Bar

3. Pengawasan Penerapan Standar Usaha

Deputi Bidang Industri dan Investasi bekerjasama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, melaksanakan pengawasan rutin dan insidental untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan perizinan berusaha berbasis risiko

dan pengawasan penerapan standar usaha pariwisata. Pelaksanaan pengawasan dilakukan sebanyak 4 kali terhadap 6 badan usaha, selama periode tahun 2025:

- 1) Kabupaten Bogor (PTPN 1 Gunung Mas, Bobocabin Gunung Mas, Eiger Adventure Land)
- 2) DI Yogyakarta (ViaVia Resto)
- 3) DKI Jakarta (Shangri-La Jakarta, Hotel Mulia)

Dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Industri dan Investasi melakukan inspeksi lapangan dan verifikasi dokumen untuk memverifikasi pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, mengacu pada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (sebelum terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berikut detail dari pelaksanaan kegiatan pengawasan:

- 1) Pengawasan di Kabupaten Bogor pada 22 Maret 2025

Tim Kementerian Pariwisata melakukan kunjungan ke 3 usaha pariwisata yaitu PTPN 1 Gunung Mas, Bobocabin Gunung Mas, Eiger Adventure Land. Tujuan dari dilaksanakannya kunjungan ini adalah melaksanakan Pembahasan terkait penyegelan Bobocabin Gunung Mas dan Eiger Adventure Land. Dalam kunjungannya, tim Kementerian Pariwisata didampingi oleh sejumlah perwakilan dari PTPN, perwakilan dari PT Eiger Adventure Land, dan Perwakilan dari Bobobox Group.

Hasil pengawasan ini menyimpulkan:

- PTPN 1 akan mengambil langkah-langkah, antara lain menunjuk konsultan individu untuk audit lingkungan terhadap 33 mitra kerja sama, mengeluarkan surat edaran kepada seluruh mitra, melakukan penanaman/ penghijauan, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk penyesuaian tata ruang, melakukan revisi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), dan melakukan monitoring periodik atas aktivitas bisnis mitra dari konstruksi hingga operasional.

- Kementerian Pariwisata akan mengumpulkan data yang untuk dijadikan bahan bagi Menteri Pariwisata saat bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup, guna menemukan solusi atas penyegehan yang terjadi di Kawasan Puncak, Bogor.



Dokumentasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Rutin dan Insidental di Kawasan Puncak, Bogor

2) Pengawasan di Kota Yogyakarta pada 9 Mei 2025

Tim Kementerian Pariwisata bersama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM didampingi oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, dan DPMPTSP Prov. DI Yogyakarta melaksanakan kunjungan ke ViaVia Resto di Kota Yogyakarta. Pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk memastikan tingkat kesesuaian dan kepatuhan pelaku usaha hotel terkait kriteria pelaksanaan standar usaha restoran dengan tingkat risiko menengah rendah dengan sumber penanaman modal PMA.

Berdasarkan pengamatan pada pelaksanaan pengawasan rutin tanggal 9 Mei 2025, PT Bumi Hidup Jogja (PT BHJ) / ViaVia Restoran Jogja, Kota. Yogyakarta telah menerapkan standar usaha restoran berbasis risiko dengan tingkat risiko menengah rendah, dan telah memenuhi 16 dari 21 kriteria standar usaha restoran berisiko menengah rendah sesuai Permen Parekraf No. 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, dengan skor penilaian kepatuhan aspek teknis

pelaksanaan standar usaha restoran risiko menengah rendah, sebesar 83,54 dengan predikat penilaian Baik.



*Dokumentasi Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko secara Rutin dan Insidental di Yogyakarta*

3) Pengawasan di DKI Jakarta pada 11 November 2025

Tim Kementerian Pariwisata melakukan wawancara dan verifikasi dokumen dan observasi lapangan dengan didampingi oleh sejumlah pihak pengelola Hotel Shangri la yaitu Mrs. Claudia Lee (Resident Manager), Mr. Ai Nium Ngoh, Financial Controller dan tim, Mrs. Tiur Uly Meryana, Director of Human Resources dan tim, Mrs. Lucy Thurana, Director of Sales & Marketing dan tim, Mr. Nirmal Singh Dir. Of Engineering dan tim, Mr. Thomas Kresse, Director of F&B dan tim, Mr. Ashok Bandaru, Executive Chef dan tim, Mr. Robert Greijmans, Dir. of Rooms dan tim. Dari hasil pengawasan, diperoleh catatan bahwa Hotel Shangri-La Jakarta telah memenuhi seluruh kriteria Standar Usaha Hotel yang berjumlah 35 kriteria dengan tingkat risiko tinggi, yang meliputi unsur sarana usaha, organisasi dan SDM, pelayanan, dan pengelolaan. Berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap aspek teknis pelaksanaan standar usaha, hotel Shangri-La Jakarta memperoleh skor 100,00 dengan predikat “Sangat Baik”, yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penerapan standar yang optimal dalam mendukung penyelenggaraan usaha pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tim Kementerian Pariwisata memberikan rekomendasi agar Hotel Shangrila dapat tetap menjaga konsistensi dalam pelaksanaan Standar Usaha Hotel Berbasis Risiko yang telah diterapkan dengan baik. Komitmen terhadap pemenuhan standar perlu terus dipertahankan guna memastikan keberlanjutan mutu pelayanan, keselamatan tamu, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pariwisata.

4) Pengawasan di DKI Jakarta pada 18 November 2025

Tim Kementerian Pariwisata melaksanakan pengawasan bersama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melaksanakan wawancara, inspeksi lapangan dan verifikasi dokumen terhadap pemenuhan persyaratan dengan didampingi oleh sejumlah pihak pengelola Hotel Mulia. Rangkaian Kegiatan Pengawasan pada Hotel Mulia Senayan sama dengan Pengawasan pada Hotel Shangri-la, terdiri dari Pembukaan meeting, Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, wawancara dengan perwakilan hotel, observasi lapangan, Penyusunan catatan hasil pengawasan berupa Berita Acara Pengawasan (BAP) dan rekomendasi pembinaan dan *closing meeting*.

Dari hasil pengawasan, diperoleh hasil bahwa tidak ditemukan permasalahan signifikan karena izin fiktif positif PT. Mulia Intan Lestari merupakan updating dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebelumnya yang sudah terbit dan berlaku efektif pada tanggal 18 September 2018 yang diterbitkan sistem OSS 1.0 dan melakukan updating untuk keperluan tender. Seluruh kewajiban teknis dan administratif telah dipenuhi sesuai ketentuan.

Tim Kementerian Pariwisata dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memberikan beberapa catatan rekomendasi mengurus izin lingkungan berupa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pengawasan, melakukan pelaporan berkala melalui LKPM, melakukan inovasi berkelanjutan dengan teknologi ramah lingkungan, menyelesaikan proses perpanjangan PB UMKU Surat Keterangan

Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (SKPL), melakukan pemenuhan atas kriteria standar usaha hotel bintang berbasis risiko tinggi, dan mendaftarkan sejumlah KBLI yang diyakini merupakan aktivitas usaha lain yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan namun belum memiliki izin atau memiliki izin kurang sesuai dengan peruntukannya.



Dokumentasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Rutin dan Insidental di Hotel Sangri-La dan Hotel Mulia Senayan Jakarta

4. Literasi Penerapan Standar Usaha Pariwisata

Kegiatan ini dilaksanakan di dua daerah, yaitu di Kota Bogor pada 24 Maret 2025 dan Kota Medan pada 18 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan manifestasi nyata dari upaya Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas usaha pariwisata.



Dokumentasi Literasi Penerapan Standar Usaha Pariwisata

d. Penguatan Rantai Pasok dan Jejaring Usaha Pariwisata

Program penguatan rantai pasok dan jejaring usaha pariwisata merupakan upaya membangun sistem distribusi barang dan jasa yang terintegrasi, efisien dan berbasis kelokalan untuk mendukung operasional sektor pariwisata agar meningkatkan dampak ekonomi lokal, meningkatkan kualitas layanan wisata dan memperkuat ketahanan industri. Program ini diimplementasikan oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi melalui kegiatan:

Forum Sinergi Mitra Industri Pariwisata Tematik Indonesia (SIMPATI)

Forum Sinergi Mitra Industri Pariwisata Tematik Indonesia (SIMPATI) diselenggarakan sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola dan ekosistem nasional *wellness tourism*, serta menjadi wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri *wellness* yang berdaya saing dan berkelanjutan. Melalui forum ini, Kementerian Pariwisata berdiskusi dengan industri, kunjungan lapangan, perumusan rencana kolaborasi strategis industri *wellness tourism* Indonesia, memperkenalkan delapan pilar industri *wellness* sebagai kerangka pengembangan dan arah kebijakan pariwisata berbasis kebugaran, dan menghimpun profil industri *wellness* sebagai dasar penyusunan Profiling Nasional *Wellness Tourism* Indonesia untuk menjadi referensi dalam perencanaan program, kebijakan, dan promosi sektor *wellness tourism*.



Dokumentasi Kegiatan SIMPATI 2025

e. Peningkatan Skala Usaha UMKM

Program yang dirancang sebagai inkubator komprehensif bagi pelaku usaha pariwisata untuk naik kelas, dari skala lokal menuju standar global. Melalui fasilitasi pengembangan bisnis, perluasan akses pasar dan pendanaan hijau sehingga terbangun ketangguhan bisnis yang berkelanjutan. Program ini diimplementasikan melalui kegiatan:

1. Literasi Keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata

Sektor pariwisata di Indonesia tidak hanya menjadi tulang punggung dalam peningkatan devisa negara, tetapi juga menjadi motor penggerak utama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan pelaku usaha skala kecil dan menengah. Dalam ekosistem tersebut, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai fondasi ekonomi nasional. UMKM mengambil peran vital mulai dari jasa akomodasi, kuliner, transportasi lokal, hingga penyediaan cinderamata dan atraksi budaya. Namun UMKM mendapat tantangan utama, salah satunya adalah minimnya literasi keuangan dan lemahnya manajemen keuangan usaha.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Deputi Bidang Industri dan Investasi, mengambil peran strategis dalam mendorong kapasitas pelaku usaha pariwisata di daerah. Kegiatan literasi keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang merupakan salah satu bentuk konkret intervensi pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Tujuan atau sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan literasi keuangan bagi pelaku usaha pariwisata ini adalah:

- 1) Memberikan informasi dan wawasan kepada pelaku usaha pariwisata terkait pengelolaan keuangan agar layak memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan;
- 2) Memberikan *sharing session* terkait perkembangan bisnis usaha pariwisata.

Pada periode tahun 2025 kegiatan Literasi Keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata dilaksanakan di dua lokasi yaitu di Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang, keduanya berlokasi di Jawa Tengah.

- **Kota Pekalongan**

Kegiatan Literasi Keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kota Pekalongan, Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2025. Peserta kegiatan adalah 75 orang pelaku usaha pariwisata lokal serta pelaku UMKM binaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Parbudpora) Kota Pekalongan.

Poin materi pembahasan pada kegiatan tersebut adalah terkait:

- Kegiatan literasi keuangan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan sektor pariwisata melalui pendekatan ekonomi inklusif;
- Pentingnya pengelolaan keuangan dalam pengembangan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor pariwisata;
- Salah satu masalah utama adalah banyaknya pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mencatat transaksi keuangan secara terstruktur;
- Sekitar 80% pelaku usaha belum memiliki laporan keuangan yang memadai, sebagian besar disebabkan oleh tidak adanya SDM yang menguasai akuntansi;
- Menjadikan literasi keuangan sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- Kegiatan literasi keuangan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung penguatan sektor pariwisata melalui pendekatan ekonomi inklusif;

- Lahirnya pelaku usaha pariwisata yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai Permodalan untuk menunjang keberlanjutan usahanya.



Dokumentasi Kegiatan
Literasi Keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kota Pekalongan

- **Kabupaten Batang**

Kegiatan Literasi Keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025. Peserta kegiatan adalah 75 orang pelaku usaha pariwisata lokal serta pelaku UMKM binaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Parbudpora) Kabupaten Batang.

Poin materi pembahasan pada kegiatan tersebut adalah terkait:

- Kegiatan literasi keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan wawasan terkait pengelolaan keuangan agar layak memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan;
- Dialog langsung dan menyampaikan aspirasi serta pengalaman para pelaku usaha terutama terkait tantangan permodalan dalam menjalankan bisnis pariwisata;
- Pentingnya pelaku usaha untuk mulai memahami bahasa keuangan (akuntansi) sebagai alat komunikasi bisnis;
- Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Conditions, dan Collateral) dari lembaga keuangan dalam menilai kelayakan kredit calon peminjam;

- Pengenalan berbagai sumber pendanaan usaha yang kreatif, tidak hanya terbatas pada pinjaman bank atau *fintech*.

Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- Pelaku usaha mendapatkan informasi dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan agar mereka layak memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan;
- Pelaku usaha dapat saling bertukar pengalaman, membangun jejaring, dan memperluas wawasan mereka dalam pengelolaan bisnis yang profesional.



Dokumentasi Kegiatan
Literasi Keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kabupaten Batang

Kegiatan peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha pariwisata akan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan secara efisien, tertib, dan berkelanjutan, termasuk dalam perencanaan usaha dan akses pembiayaan. Sehingga dapat meningkatkan kinerja dan nilai tambah usaha tersebut serta mendorong naiknya omzet dan produktivitas usaha yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB sektor Akmamin.

2. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan di Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil kreativitas masyarakat yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. pengembangan desa wisata di Indonesia menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan, namun pengembangan tersebut tidak dapat berlangsung optimal tanpa peningkatan kapasitas usaha dan perluasan akses permodalan bagi masyarakat desa. Kegiatan peningkatan kapasitas usaha dan perluasan akses permodalan diselenggarakan oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi, sebagai upaya meningkatkan daya saing usaha, memperkuat ekosistem desa wisata, serta memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha pariwisata. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi katalis dalam mendorong desa wisata menuju desa wisata maju dan mandiri.

Kegiatan peningkatan kapasitas usaha dan perluasan akses permodalan di Desa Wisata bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kapasitas pelaku usaha desa wisata;
- 2) Mendorong kolaborasi dan diferensiasi produk desa wisata;
- 3) Memberikan edukasi pengelolaan keuangan dan kesiapan SDM;
- 4) Memperluas akses permodalan UMKM melalui perbankan; dan
- 5) Meningkatkan literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap pinjaman ilegal.

Kegiatan tersebut berupa kegiatan bimbingan teknis dengan melibatkan narasumber yang akan menyampaikan materi terkait pengembangan usaha dan akses permodalan. Peserta kegiatan ini adalah pelaku usaha pariwisata yang berlokasi di Desa Wisata tersebut. Pada periode tahun 2025 kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di Desa Lebakmuncang, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Desa Wisata Cempaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, serta Desa Wisata Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

- **Desa Wisata Lebakmuncang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan di Desa Wisata Lebakmuncang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2025.

Peserta kegiatan adalah 50 orang pelaku usaha di Desa Wisata Lebakmuncang. Kegiatan dibuka oleh Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, ASITA Jawa Barat, Local Champion Desa Alamendah dan BRI.

Poin materi pembahasan pada kegiatan tersebut adalah terkait:

- Peningkatan daya saing usaha dan penguatan desa wisata sebagai target pembangunan pariwisata Jawa Barat.
- Kolaborasi desa wisata, diferensiasi produk, pencatatan keuangan profesional dan akses permodalan BRI.
- Penekanan pentingnya SDM berkualitas, konsep 3A (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi), serta inovasi yang tetap menjaga identitas desa.
- Sharing keberhasilan Desa Alamendah (omzet > Rp. 1 miliar/tahun) melalui perencanaan akademik, sertifikasi SDM, lomba desa wisata dan kolaborasi bisnis.
- Kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan paket wisata.
- Sosialisasi KUR, QRIS dan layanan digital banking.

Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan di desa wisata tersebut adalah:

- Peningkatan wawasan pelaku usaha mengenai kolaborasi, inovasi produk dan akses ke lembaga pembiayaan.
- Terbangunnya kesadaran pentingnya pencatatan keuangan dan profesionalisasi desa wisata.



Dokumentasi

Literasi Keuangan bagi Pelaku Usaha Pariwisata di Kabupaten Batang

- **Desa Wisata Cempaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan di Desa Wisata Cempaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025.

Peserta kegiatan adalah 30 orang pelaku usaha di Desa Wisata Cempaka. Kegiatan dibuka oleh Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal, OJK, BRI dan Local Champion Desa Pekunden.

Poin materi pembahasan pada kegiatan tersebut adalah terkait:

- Kolaborasi desa wisata, pengelolaan keuangan sederhana, dan akses permodalan melalui BRI.
- Edukasi bahaya pinjaman online ilegal, risiko penyalahgunaan data dan materi SLIK.
- Dorongan untuk mengembangkan potensi lokal sebagai produk unggulan desa wisata.
- Sharing Desa Pekunden tentang strategi membangun ekosistem desa wisata, pengembangan daya tarik, dan kolaborasi Pentahelix.

- Pelatihan pencatatan keuangan harian/bulanan serta sosialisasi QRIS, digital banking dan KUR.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan di desa wisata tersebut adalah:

- Meningkatnya literasi keuangan masyarakat desa wisata.
- Meningkatnya kewaspadaan terhadap pinjaman ilegal.
- Pelaku usaha memahami akses permodalan formal dan dasar pembukuan usaha.



Dokumentasi Kegiatan
Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan
di Desa Wisata Cempaka, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

- **Desa Wisata Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan di Desa Wisata Lapeo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat diselenggarakan pada hari Rabu, 24 September 2025. Peserta kegiatan adalah 75 orang pelaku usaha di Desa Wisata Lapeo. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah dari Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Andi Hizbullah Mastar, S.K.M., M.Kes. Desa Lapeo merupakan salah satu Desa di Polewali Mandar dengan tipologi perikanan dan kelautan. Selain itu juga Desa Lapeo merupakan 50 Desa Wisata Terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2024.

Poin materi pembahasan pada kegiatan tersebut adalah terkait pengelolaan keuangan sederhana, pemisahan dana usaha dan pribadi, serta pemahaman sumber permodalan alternatif.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan di desa wisata tersebut adalah meningkatkan kapasitas usaha dan mendorong keberlanjutan bisnis pariwisata.

Adapun **permasalahan yang dihadapi** pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Perluasan Akses Permodalan di Desa Wisata tersebut adalah:

- Kegiatan ini ditujukan bagi pelaku usaha pariwisata, namun pada pelaksanaannya terdapat peserta yang bukan berasal dari sektor tersebut.
- Rendahnya literasi keuangan pelaku usaha.
 - Pelaku usaha belum terbiasa membuat pembukuan sederhana.
 - Pencampuran keuangan pribadi dan usaha masih umum terjadi.
 - Banyak peserta tidak memiliki laporan keuangan yang menjadi syarat akses KUR.
 - Materi teknis tidak dapat diperdalam secara menyeluruh.
- Kesiapan SDM Pengelola Desa Wisata belum merata.
 - Kompetensi berbeda-beda antara pengurus dan pelaku usaha.
 - Minimnya pelatihan formal dan sertifikasi terkait wisata.
- Minimnya kolaborasi lintas sektor (Pentahelix).
 - Pokdarwis dan pelaku usaha belum terbiasa bekerja sama dengan travel. agent, komunitas, akademisi dan swasta.
 - Paket wisata belum terintegrasi.
- Keterbatasan infrastruktur digital dan pemasaran online.
 - Jaringan internet di beberapa titik desa tidak stabil.

- Minimnya pemahaman penggunaan QRIS, digital banking dan media sosial.
- Dokumentasi foto/video tidak standar promosi, pemasaran digital belum optimal.
- Legalitas usaha dan dokumen pendukung tidak lengkap.
 - Banyak pelaku usaha belum memiliki NIB, SKU, atau izin dasar lainnya.
 - Menjadi kendala untuk mengajukan akses permodalan resmi.
- Masifnya pinjaman online ilegal di masyarakat.
 - Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pinjol legal maupun ilegal.
 - Minimnya pemahaman SLIK OJK.

Rekomendasi solusi terhadap permasalahan tersebut adalah:

- Untuk mengatasi ketidaksesuaian peserta, diperlukan pengetatan seleksi dan verifikasi pendataan, peningkatan koordinasi dengan pihak pendata atau pengirim peserta, serta penyampaian kriteria sasaran yang lebih tegas agar peserta yang hadir benar-benar berasal dari sektor pariwisata.
- Pendampingan lanjutan. Fokus pada pembukuan sederhana, legalitas usaha, pemasaran digital, dan pengembangan paket wisata. Pendampingan dilakukan oleh pemerintah daerah, akademisi atau local champion.
- Pelatihan berjenjang dan terstruktur dengan materi terkait manajemen usaha, hospitality, pemasaran digital, *storytelling*, hingga sertifikasi profesi.
- Penguatan kolaborasi Pentahelix melalui pembentukan Forum Kolaborasi Desa Wisata dengan melibatkan Pokdarwis, akademisi, pemuda, pelaku usaha, perbankan, OJK dan media lokal, serta mengadakan business matching dan workshop dengan ASITA atau mitra swasta.

- Digitalisasi desa wisata melalui optimalisasi QRIS untuk transaksi, pelatihan konten kreatif untuk promosi media sosial desa wisata, pembuatan katalog digital/paket wisata berformat standar industri serta meningkatkan koordinasi dengan provider internet untuk perbaikan sinyal.
- Fasilitasi legalitas usaha secara kolektif melalui pendampingan pembuatan NIB, SKU, sertifikasi halal dasar, dan perizinan lain bersama pemerintah desa, serta penataan database pelaku usaha untuk syarat pengajuan KUR.
- Penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.

Pelaksanaan kegiatan di tiga desa wisata berjalan dengan baik dan memberikan peningkatan kapasitas signifikan bagi pelaku usaha, khususnya dalam manajemen usaha, pemahaman kolaborasi, literasi keuangan, serta akses permodalan. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan terkait SDM, pencatatan keuangan, legalitas usaha, dan digitalisasi yang perlu tindak lanjut melalui pendampingan lanjutan dan penguatan kolaborasi pentahelix. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan desa wisata maju dan mandiri. Pertumbuhan aktivitas ekonomi di desa wisata tersebut diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan sektor pendukung terhadap nilai tambah daerah, yang pada akhirnya meningkatkan PDRB daerah secara berkelanjutan.

3. Sosialisasi Pengenalan Alternatif Sumber Permodalan Bagi Usaha Pariwisata

Sektor pariwisata nasional masih menghadapi tantangan seperti rendahnya daya saing, minimnya diversifikasi produk, terbatasnya akses pasar dan permodalan. Banyak pelaku usaha pariwisata terkendala pembiayaan akibat kurangnya agunan, prosedur rumit, dan minimnya literasi keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 24 mewajibkan Pemerintah memfasilitasi pengembangan usaha pariwisata, termasuk Akses Permodalan. Untuk itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi menyelenggarakan kegiatan “**Sosialisasi**

Alternatif Sumber Permodalan Bagi Usaha Pariwisata” yang mempertemukan pelaku usaha dan asosiasi pariwisata dengan lembaga pembiayaan untuk membahas sumber-sumber permodalan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha pariwisata. Tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan gambaran mengenai isu-isu yang berkembang saat ini, sehingga dapat diperoleh:

- 1) Pemahaman mengenai kebutuhan dalam mengakses permodalan melalui berbagai skema bagi usaha pariwisata, dan
- 2) Mendapatkan wawasan bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan potensi pengembangan usaha melalui permodalan.

Kegiatan Sosialisasi ini diselenggarakan secara daring melalui *zoom meeting* dengan mengundang berbagai Asosiasi dari 13 bidang usaha pariwisata dan berlangsung beberapa kali dalam rentang waktu bulan September - Oktober 2025. Format kegiatan ini adalah berupa sesi diskusi panel sebanyak empat sesi yang membahas mekanisme pembiayaan yaitu **Urun Dana, Pasar Modal, Modal Ventura dan Perbankan** dari lembaga pembiayaan terkait, serta contoh *success story* dari pelaku usaha yang telah menerima manfaatnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha pariwisata dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan permodalannya serta cara memanfaatkan potensi permodalan tersebut untuk pengembangan dan peningkatan skala usaha untuk menciptakan industri Pariwisata yang tumbuh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

- 1) Sosialisasi sesi pertama dengan **materi Pembiayaan Urun Dana** dilaksanakan pada tanggal 18 September 2025, dengan pembicara dari **Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI)** dan perwakilan dari **Bobobox** sebagai pelaku usaha penerima manfaat. Sesi ini memperkenalkan konsep Pembiayaan Urun Dana (Crowdfunding) sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan pembiayaan bagi usaha pariwisata di Indonesia. Urun dana memungkinkan pelaku usaha pariwisata untuk mengumpulkan modal dari masyarakat luas, tidak hanya untuk

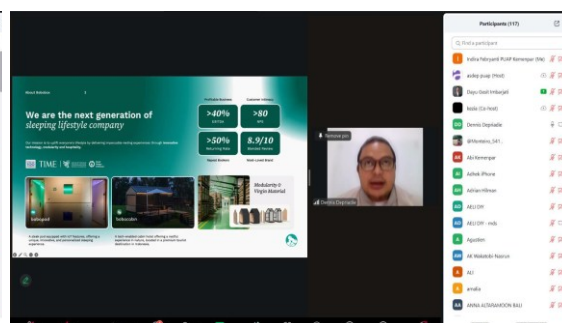
mengembangkan usaha, tetapi juga untuk menciptakan produk wisata yang berkelanjutan.

Dalam sesi paparan, pembicara dari ALUDI menjelaskan bahwa *Securities Crowdfunding* adalah layanan penawaran efek (saham, efek bersifat utang, atau sukuk) yang dilakukan penerbit kepada pemodal melalui sistem elektronik yang terbuka. *Crowdfunding* ini berfungsi sebagai layanan pendanaan alternatif bagi penerbit dan juga sebagai layanan inklusi keuangan bagi pemodal untuk mendanai berbagai usaha, termasuk UMKM.

Sementara itu perwakilan dari Bobobox selaku penerima manfaat, berbagi pengalaman praktisi yang didapat selama mengelola usaha dengan membangun *networking Crowdfunding* serta peluang serta tantangan dalam implementasinya. Ia berharap semakin banyak pelaku usaha UMKM yang tertarik untuk mencoba pembiayaan menggunakan sistem ini.



Sesi Paparan Pembiayaan Urun Dana
dari ALUDI

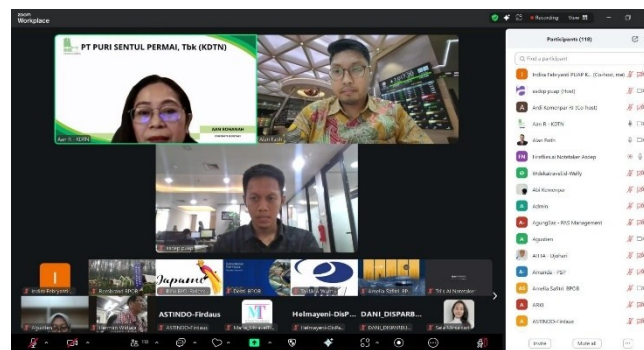


Sesi Sharing Pembiayaan Urun Dana
dari Bobobox

- 2) Sosialisasi sesi dua dengan materi **Pembiayaan Pasar Modal** dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025, dengan pembicara dari **Indonesia Exchange (IDX)** dan perwakilan dari **PT Puri Sentul Permai** sebagai pelaku usaha penerima manfaat. Sesi ini memperkenalkan konsep Pembiayaan Pasar Modal, yang memungkinkan pelaku usaha pariwisata mengakses berbagai instrumen seperti obligasi, sukuk dan saham, tidak hanya sebagai akses pendanaan yang fleksibel

tetapi juga membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan sektor pariwisata.

Pembicara dari IDX menjelaskan berbagai instrumen, persyaratan, keuntungan, risiko, strategi permodalan optimal, dan *best practice* dari pelaku usaha yang sukses memanfaatkan pasar modal. Ia menjelaskan bahwa pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan saran investasi. Perwakilan dari PT Puri Sentul Permai, Tbk, membagikan pengalaman usaha mereka yang berhasil IPO pada November 2022 setelah mengalami tantangan keterbatasan modal di tengah banyaknya ide pengembangan usaha. Langkah strategis yang dilakukan untuk melangkah ke pasar modal bertujuan memperoleh sumber pendanaan jangka panjang untuk ekspansi, meningkatkan transparansi dan tata kelola, serta memberikan nilai tambah berkelanjutan.



Sesi Paparan Pembiayaan Pasar Modal
dari IDX

- 3) Sosialisasi sesi tiga dengan materi **Pembiayaan Modal Ventura** dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2025, dengan pembicara dari **Amvesindo & Partner Kejora Capital** dan perwakilan dari **Vilo Gelato** sebagai pelaku usaha penerima manfaat. Sesi ini memperkenalkan Pembiayaan Modal Ventura, yang memungkinkan pelaku usaha pariwisata dapat mengakses pembiayaan seperti penyertaan saham, obligasi konversi, dan surat utang. Alternatif ini tidak hanya

memberikan akses permodalan fleksibel, tetapi juga peluang untuk mengembangkan manajemen perusahaan di bawah bimbingan Modal Ventura.

Bapak Andreas Surya dari Amvesindo menjelaskan pemetaan model bisnis anggota perusahaan modal ventura, yang terbagi menjadi empat jenis utama: Venture Capital Corporation (VCC), yang memiliki karakteristik penyertaan modal (ekuitas) pada perusahaan rintisan berpotensi tinggi; Venture Debt Corporation (VDC), yang memberikan pembiayaan berbasis utang kepada UMKM atau perusahaan inovatif; Micro Financing, yang menawarkan pembiayaan berskala kecil tanpa agunan dengan pendekatan pendampingan; dan PMV Syariah, yang menggunakan prinsip syariah tanpa unsur bunga. Kemudian perwakilan dari Vilo Gelato membagikan pengalamannya mendapatkan pendanaan dari Sweef Capital dan OCBC NISP Ventura (Venture Debt) pada tahun 2023. Pendanaan eksternal modal ventura terbukti dapat membantu perusahaan rintisan berkembang pesat dan memberikan akses ke jaringan luas investor.

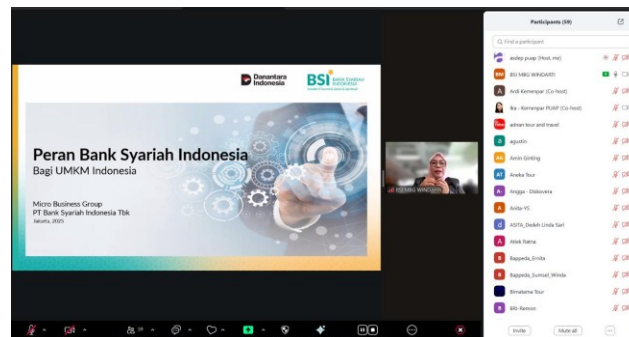
Unit Bisnis	Karakteristik Produk	Segmen Utama	Jumlah Portofolio	Catatan Khusus
Venture Capital Corporation (VCC) *Termasuk VC-Tech	Penyertaan modal (equity) partisipatif ke perusahaan rintisan atau skala kecil-meningkat dengan potensi pertumbuhan tinggi	Startup, perusahaan inovatif dan perusahaan teknologi	> 10 VCC	Urutannya masuk di sektor digital, fintech, healthtech, dan sektor disruptif lainnya
Venture Debt Corporation (VDC)	Pembiayaan berbasis utang (debt financing) kepada pasangan usaha, biasanya dengan struktur pinjaman yang disesuaikan dengan profil bisnis	UMKM atau perusahaan inovatif	> 35 VDC	Cocok untuk mitra usaha yang membutuhkan modal kerja atau ekspansi tanpa melepas saham
Micro Financing	Pembiayaan berskala kecil tanpa agunan dengan pendekatan pemberdayaan dan pendampingan	Pelaku usaha mikro dan ultra mikro	> 5 PMV	Identik dengan pendekatan sistem tanggap rentang
PMV Syariah	Pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, tanpa unsur bunga (riba)	Usaha halal dan syariah	> 6 PMV Syariah	Dikawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengacu pada fatwa khusus dengan prinsip aila

Sesi Paparan Pembiayaan Modal Ventura dari Amvesindo

- 4) Sosialisasi sesi terakhir dengan materi **Pembiayaan Perbankan** dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025, dengan pembicara dari **Bank Rakyat Indonesia (BRI)** dan **Bank Syariah Indonesia (BSI)**.

Sesi ini memperkenalkan Pembiayaan Perbankan serta memberikan pemahaman komprehensif kepada pelaku usaha mengenai berbagai instrumen pembiayaan

Perwakilan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) menyoroti kontribusi UMKM lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. BSI menawarkan produk pembiayaan syariah seperti BSI KUR (Super Mikro, Mikro, Kecil) dan BSI BUM (Sejahtera), serta memiliki program pemberdayaan melalui BSI UMKM Center dan platform digital Portal Go UMKM dan Portal Salam Digital, yang berfungsi sebagai fasilitas pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan syariah.



Adapun hasil dari kegiatan Sosialisasi ini adalah:

- Mengenalkan berbagai alternatif sumber permodalan bagi pelaku usaha pariwisata, seperti urun dana, pasar modal, modal ventura, dan perbankan.

- Teridentifikasinya kebutuhan, tantangan dan peluang pengembangan usaha pariwisata.
- Penguatan jejaring kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi dan pelaku usaha.

Kemudian, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sosialisasi ini adalah:

- Data kebutuhan akses permodalan per jenis usaha pariwisata masih belum lengkap, sehingga dibutuhkan survei melalui penyebaran kuesioner.
- Peserta memiliki keterbatasan dalam menyerap sosialisasi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai produk dan model pembiayaan yang tepat.
- Banyak pelaku usaha yang kurang cocok dengan alternatif pembiayaan yang dihadirkan karena tidak tersedia di daerahnya.
- Pelaksanaan sosialisasi melalui online dirasa belum optimal karena keterbatasan interaksi.

Sehingga rekomendasi solusi terhadap permasalahan tersebut adalah:

- Melengkapi data kebutuhan akses permodalan per sub-sektor untuk mempermudah pemilihan alternatif permodalan untuk sosialisasi berikutnya.
- Mengadakan sosialisasi secara berkala untuk literasi dan inklusi keuangan bagi para pelaku usaha pariwisata.
- Mengadakan kerja sama dengan lembaga pembiayaan untuk melakukan sosialisasi luring di daerah-daerah wisata yang membutuhkan.
- Mempertemukan pelaku usaha pariwisata dengan lembaga pembiayaan secara langsung.

Kegiatan sosialisasi berhasil memberikan pemahaman komprehensif mengenai empat alternatif sumber permodalan utama bagi usaha pariwisata. Setiap alternatif menawarkan instrumen unik, mulai dari ekuitas dan obligasi di pasar modal dan VC, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan mikro syariah

dari perbankan. Secara keseluruhan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan dan mendorong pelaku usaha pariwisata beralih dari keterbatasan modal ke sumber pendanaan yang lebih fleksibel, berkelanjutan, dan didukung oleh sistem digital maupun jaringan kemitraan bank yang luas. Pemahaman atas berbagai opsi ini diharapkan dapat mengoptimalkan struktur permodalan dan mendorong pertumbuhan usaha pariwisata di Indonesia.

4. Foodstartup Indonesia (FSI)

FoodStartup Indonesia merupakan platform transformatif bagi pelaku usaha makanan dan minuman, yang menawarkan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Bank Indonesia, Smesco Indonesia, Indonesia Gastronomy Network, dan Ultra (PT Ultima Rasa Akselerasi). FoodStartup Indonesia dilaksanakan setiap tahun, sejak tahun 2016. Pada tahun 2025, FoodStartup Indonesia kembali dilaksanakan dengan tujuan mengintegrasikan FSI ke ekosistem Jakarta sebagai Global City Hub sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas dan memaksimalkan potensi bagi para pelaku foodstartup subsektor kuliner, serta membuka akses pasar dan dukungan akses pendanaan secara komprehensif.

Pada tahun 2025, Deputy Bidang Industri dan Investasi kembali menyelenggarakan FSI sebagai program berkelanjutan yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha makanan dan minuman untuk “Naik Kelas” melalui pengembangan kualitas produk serta perluasan akses pasar dan pembiayaan.

Tujuan FSI adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan industri makanan dan minuman:
FSI bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia.
- 2) Memberdayakan pelaku usaha di bidang makanan dan minuman:
FSI membantu UMKM makanan minuman untuk berkembang dengan memberikan akses ke pendanaan, pasar, dan tenaga ahli.

3) Mencari talenta kuliner:

FSI juga berperan dalam mencari dan menjaring pengusaha kuliner berbakat di Indonesia.

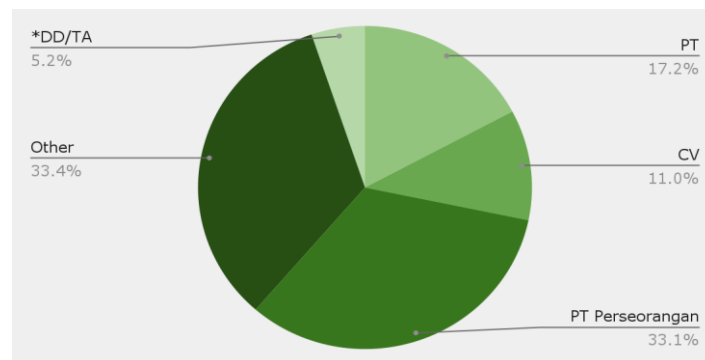
4) Mewujudkan ekosistem startup makanan dan minuman unggul:

FSI berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan startup makanan dan minuman di Indonesia.

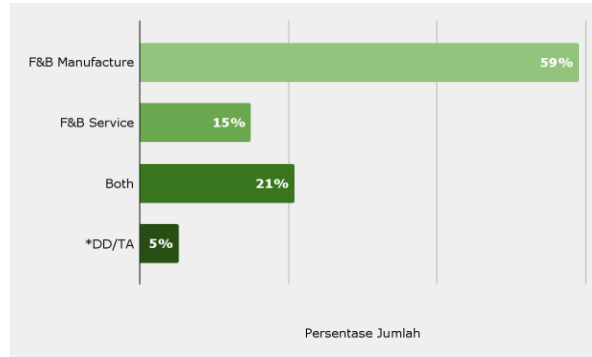
Program FSI dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu *open call*, proses kurasi, Business Incubation, *Business Forum* dan *Demo Day*.

1) *Open Call*

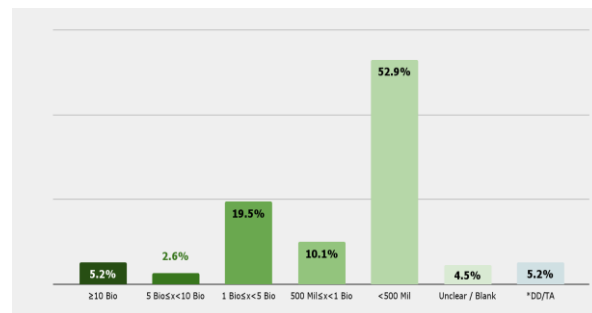
Open Call melalui publikasi, sosialisasi, dan registrasi untuk pelaku usaha di bidang makanan dan minuman. Diperoleh sebanyak 308 pendaftar dengan lokasi terbanyak berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Sebanyak 17% Pendaftar memiliki badan usaha Perseroan Terbatas (PT), 11% Persekutuan Komanditer (CV), dan sisanya dengan bentuk badan usaha lainnya.



Sebanyak 59% merupakan usaha makanan dan minuman dengan model bisnis manufaktur, 15% servis, dan 21% keduanya.

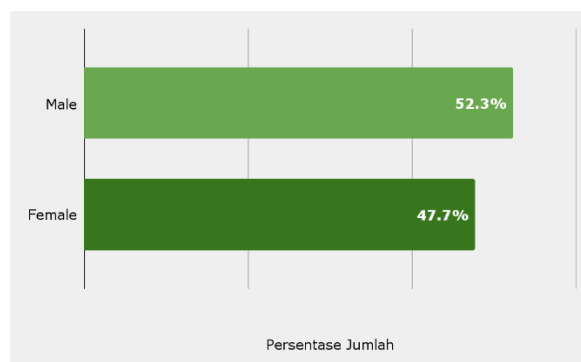


Sebanyak 5,2% memiliki omzet bisnis di atas sepuluh miliar rupiah, 2,6% memiliki omzet lima hingga sepuluh miliar rupiah, 19,5% satu hingga lima miliar rupiah, 10,1% 500 juta hingga satu miliar rupiah, dan 52,9% memiliki omzet di bawah 500 juta rupiah.



Dari total 308 Pendaftar tersebut, disaring sebanyak 109 Pendaftar dengan omzet di atas 500 juta rupiah dan yang memenuhi kelengkapan data administrasi pendaftaran FoodStartup Indonesia. Dari 109 Pendaftar tersebut, didapati data seperti berikut.

Persentase jenis kelamin Pendaftar: Sebanyak 52,3% pendaftar merupakan laki-laki dan 47,7% Pendaftar merupakan perempuan.

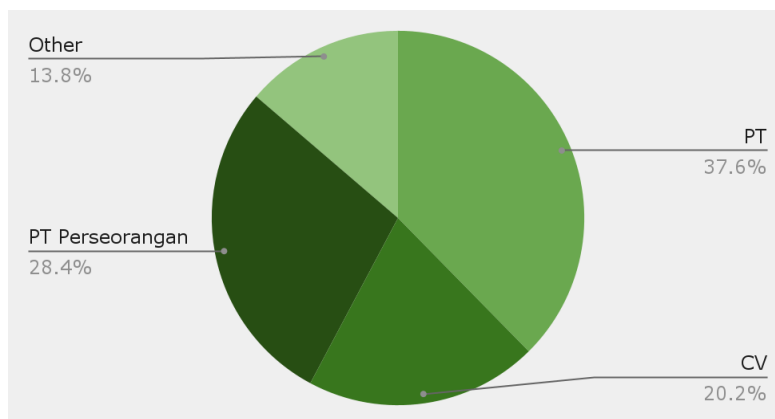


Domisili Pendaftar:

No	Provinsi	Jumlah	%
1	Jawa Timur	19	17.4%
2	Jawa Barat	18	16.5%
3	DKI Jakarta	17	15.6%
4	Banten	10	9.2%
5	Jawa Tengah	9	8.3%
6	DI Yogyakarta	8	7.3%
7	Sumatra Utara	4	3.7%
8	Sumatra Barat	3	2.8%
9	Sulawesi Selatan	2	1.8%
10	Aceh	2	1.8%
11	Sulawesi Utara	2	1.8%
12	Kepulauan Riau	2	1.8%
13	Papua	2	1.8%
14	Jambi	2	1.8%
15	Kalimantan Timur	1	0.9%
16	Lampung	1	0.9%
17	NTB	1	0.9%
18	Bali	1	0.9%
19	Bangka Belitung	1	0.9%
20	Kalimantan Timur	1	0.9%
21	Gorontalo	1	0.9%
22	Maluku Utara	1	0.9%
23	NTT	1	0.9%
	Grand Total	109	100%

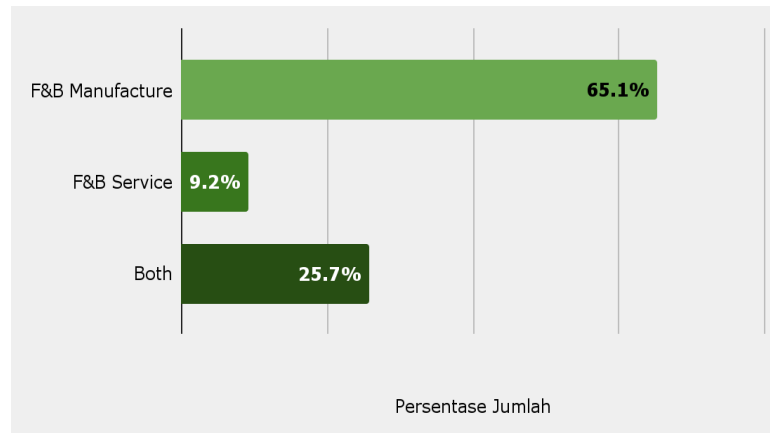
Tiga lokasi dengan Pendaftar terbanyak, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Bentuk badan usaha:

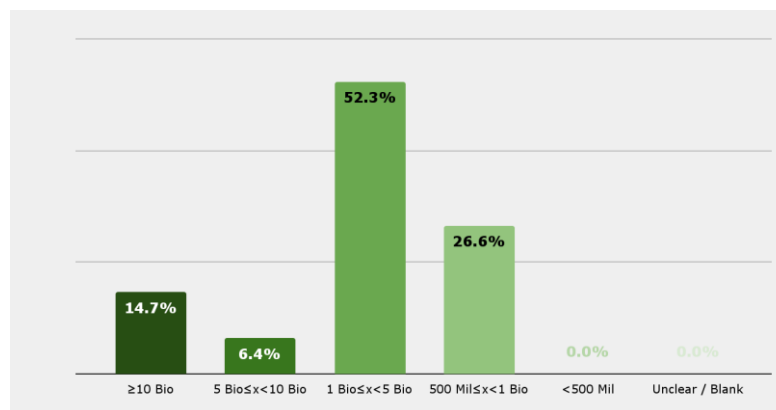


Sebanyak 37,6% Pendaftar memiliki badan usaha Perseroan Terbatas (PT), 20,2% Persekutuan Komanditer (CV), dan sisanya dengan bentuk badan usaha lainnya.

Kategori bisnis:

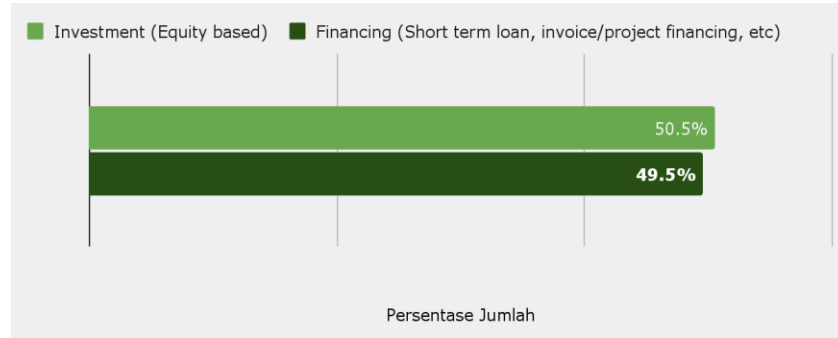


Sebanyak 65,1% merupakan usaha makanan dan minuman dengan model bisnis manufaktur, 9,2% servis, dan 25,7% keduanya.



Sebanyak 14,7% memiliki omzet bisnis di atas sepuluh miliar rupiah, 6,4% memiliki omzet lima hingga sepuluh miliar rupiah, 52,3% satu hingga lima miliar rupiah, dan 26,6% 500 juta hingga satu miliar rupiah.

Ketertarikan model pembiayaan:



Sebanyak 50,5% tertarik dengan investasi berbasis ekuitas, dan 49,5% tertarik dengan pembiayaan dengan bentuk pinjaman jangka pendek, invoice/project financing, dan lainnya.

2) Proses Kurasi

Dalam mendukung penyelenggaraan *Demoday FoodStartup Indonesia*, maka dibutuhkan kegiatan kurasi untuk menyaring dan menentukan 50 peserta *Demoday FoodStartup Indonesia 2025*. Kegiatan kurasi ini dilakukan secara offline, pada hari Kamis-Jumat, tanggal 15 sampai dengan 16 Mei 2025, berlokasi di Hotel Vertu Harmoni Jakarta, dengan melibatkan lima kurator, yaitu:

- Bonnie Susilo (CEO, PT Ultima Rasa Akselerasi)
- Vincent Kusuma (Co-Founder & CEO, Vilo Gelato)
- Amiyandra (Principal, 1982 Ventures)
- Jesslyn Gunawan (Value Creation, Trihill Capital)
- Vita Datau (Founder, Indonesia Gastronomy Network)



Dokumentasi
Proses Kurasi FSI 2025

Sejumlah 109 pendaftar yang telah di kurasi tahap pertama memasuki tahap kurasi akhir oleh para kurator dan menghasilkan data peserta FoodStartup Indonesia 2025 terkurasi sebagai berikut:

Tabel 3. 6 50 peserta FoodStartup Indonesia (FSI) Tahun 2025

No	Nama UKM	Nama Peserta	Provinsi	Kategori
1	APB SAMBAL	Erna Sari	DKI Jakarta	F&B Manufacture
2	APRILSWEETH	Aprilline Felicia Gunawan	Jawa Barat	keduanya
3	ARAMU	Agustine Johanes	Sumatra Utara	keduanya
4	ARANASPICE	Sri Astutik	Jawa Timur	F&B Manufacture
5	AYAM ASOGU	Yulyanto	DKI Jakarta	keduanya
6	BANANANIA	Sofyani Mirah	DI Yogyakarta	F&B Manufacture
7	BARA BUTTER INDONESIA	Ridho Nurfebrianto Baskandar	Jawa Barat	keduanya
8	CASA GRATA	Jane Tanuwijaya	DKI Jakarta	F&B Manufacture
9	CHICK CHICK	Frans Samuel	Jawa Barat	F&B Service
10	DAMORY	Mori Satria	Banten	F&B Manufacture
11	DOUGHZEN	Hansni Nankani	DKI Jakarta	F&B Service
12	FISNACK	Wiko Puji Susanto	Jawa Barat	F&B Manufacture
13	GOGOFIELD	Kristian Tirto Lukito	DKI Jakarta	F&B Manufacture
14	JAPAMO	Rini Eko Setiani	Papua	F&B Manufacture
15	JUICIBLE BY SURPLUS	Muh Agung Saputra	DKI Jakarta	F&B Service
16	KEBAB N ME	Maruf Kamala Rizki	DI Yogyakarta	F&B Service
17	KEBUN INKGUNG	Dwi Rani Oktaviana	Jawa Tengah	keduanya
18	KOFFIKU	Lidia Silvi Listio	Jawa Timur	F&B Manufacture
19	KYLAFOOD	Galih Ruslan	Jawa Barat	F&B Manufacture
20	LA MORINGA INDONESIA	Andree Hartanto	NTT	keduanya
21	MINANG KAKAO	Arsil Aliasar	DKI Jakarta	F&B Manufacture
22	MUSTOFA IBU EMI	Nurhayati Pratama Andreyansah	Jawa Barat	F&B Manufacture
23	NARASI VANILLA	Rommy Senduk	Sulawesi Utara	F&B Manufacture
24	NIAT BAIK BAKERY	Novita Dewi Aryani	NTB	F&B Service
25	ODDITY COFFEE	Ezra Bryan Justin	DKI Jakarta	keduanya
26	PALA PAPUA	Sofia Ekawati	Papua	F&B Manufacture
27	PASKALI	Fariz Widjaja	Jawa Barat	F&B Manufacture
28	RENDANG GADIH	Dedy Syandera Putera	Sumatra Barat	F&B Manufacture
29	SANFOOD BRILIAN	Eka Risky Septiani	Banten	F&B Manufacture
30	SOPONGIRO	Wak Leman	Jawa Timur	F&B Manufacture
31	STREET SUSHI	Ria Andriana	DKI Jakarta	F&B Service
32	TAMAMIE	Luqman Adhitya	Banten	F&B Service

No	Nama UKM	Nama Peserta	Provinsi	Kategori
33	YORRI EATERY	Yessie Natasia Mareti	Jawa Timur	keduanya
34	ZUMAMI	Iqbal Akbarudhin	Jawa Timur	F&B Manufacture
35	MBOWIS	Fariz Chamim Udien	Jawa Timur	F&B Manufacture
36	HYGREEN & HYCRUNCH	Kartika Anggraeni	Jawa Timur	F&B Manufacture
37	BALI HONEY	Ismail Marzuki	Bali	F&B Manufacture
38	NARATA SNACK	Rosmaini Alesha Az Zahra	Kepulauan Riau	F&B Manufacture
39	TOTELES BAKE HOUSE	Risyanto	Kepulauan Riau	F&B Manufacture
40	UNIKAYO	Laurencia De Richo	Sumatra Barat	F&B Manufacture
41	BOXMIE	Kevin Anggoro Kasih	DKI Jakarta	keduanya
42	KAMPOENG TIMOER	Gilang Maruf Fauji	Kalimantan Timur	F&B Manufacture
43	PAYUAN	Doni Naufan	Banten	F&B Manufacture
44	RASAPRIMA	Eko Pratam Saputra	DKI Jakarta	F&B Manufacture
45	BEERU	Astri Elisa	Banten	F&B Manufacture
46	KESU	Adhitiya Wicaksana Saputra	Sumatra Utara	keduanya
47	BATTENBERG TIGA INDONESIA	Nuraini Wulandari	Jawa Barat	F&B Manufacture
48	RENDANG JAMBI BY CAHAYA MINANG	Herdika Daksabrata	Jambi	keduanya
49	BONAPPETITO	Jacky Williawan	Banten	keduanya
50	BILLITON SPICE	Vivi Widyana	Bangka Belitung	F&B Manufacture

3) *Business Incubation*

Inkubasi bisnis dilakukan dengan melaksanakan Proses *Due Diligence*, yaitu melalui kunjungan fisik kepada 50 peserta yang terkurasi di FSI 2025 untuk memastikan dan mengidentifikasi:

- Potensi kemitraan strategis antara peserta terkurasi dengan ekosistem FSI;
- Potensi pengembangan produk dan model bisnis untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan di Jakarta;
- Kelemahan dan kekuatan peserta dari sisi bisnis, produk, dan pasar.

Temuan pada proses ini yang akan menjadi dasar pengembangan bisnis dan produk pada proses *Business Forum. Due diligence* (Uji tuntas) FoodStartup Indonesia merupakan proses audit menyeluruh yang menjadi kunci utama untuk meminimalkan risiko investasi sekaligus mengidentifikasi potensi pertumbuhan

food startup. Proses ini tidak hanya penting bagi investor, tetapi juga bagi pengembangan ekosistem startup yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Due Diligence dalam konteks rintisan (*startup*) didefinisikan sebagai proses audit komprehensif yang dilakukan oleh angel investor dan pemodal ventura sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Proses ini merupakan praktik vital bagi kemampuan *startup* dalam menggalang dana dan menjadi faktor penentu keberhasilannya. Menurut penelitian terbaru, uji tuntas memiliki tujuan multifaset yang membantu calon investor membuat keputusan yang tepat, mitigasi potensi risiko, dan menetapkan nilai investasi yang sebenarnya. Melalui analisis sistematis terhadap kondisi keuangan, posisi pasar, dan tim kepemimpinan perusahaan, pemodal ventura dapat mengidentifikasi peluang maupun sinyal bahaya.

Tujuan *Due Diligence*:

- **Tujuan Umum**

Melakukan validasi dan evaluasi yang komprehensif terhadap peserta terkurasi FoodStartup Indonesia untuk mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan di sektor industri pengolahan pangan.

- **Tujuan Khusus**

- Mengidentifikasi indikator-indikator kunci yang menentukan kelayakan dan potensi pengembangan peserta terpilih FoodStartup Indonesia.
- Menganalisis metode penilaian risiko dan evaluasi kinerja peserta terpilih FoodStartup Indonesia yang objektif dan terukur.
- Mengevaluasi efektivitas program-program pengembangan peserta terpilih FoodStartup Indonesia yang telah ada.
- Merumuskan rekomendasi strategis untuk peningkatan daya saing dan perkembangan peserta terpilih FoodStartup Indonesia.

Kerangka Kerja *Due Diligence* untuk *Food Startup*:

Berdasarkan tinjauan literatur, kerangka kerja *due diligence* untuk *food startup* mencakup beberapa aspek kritis:

- *Due Diligence* Keuangan:
 - Analisis laporan keuangan historis,
 - Proyeksi keuangan dan asumsi yang mendasarinya,
 - Struktur modal dan kebutuhan pendanaan
- *Due Diligence* Operasional
 - Kapasitas produksi dan rantai pasok.
 - Sertifikasi dan kepatuhan regulasi
 - Teknologi dan sistem informasi
- *Due Diligence* Pasar
 - Analisis pasar dan kompetisi
 - *Positioning* produk dan proposisi nilai
 - Strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan
 - Saluran distribusi dan kemitraan
- *Due Diligence* Hukum
 - Struktur perusahaan dan kepemilikan
 - Hak kekayaan intelektual
 - Kontrak dan perjanjian
 - Kepatuhan regulasi
- *Due Diligence* Manajemen
 - Rekam jejak dan kompetensi tim
 - Struktur organisasi dan tata kelola
 - Kemampuan kepemimpinan dan keselarasan visi
 - Sumber daya manusia dan manajemen talenta
- *Due Diligence* kesiapan ekspor

- Kesiapan dari aspek teknis (kapasitas, legalitas, keamanan pangan, dan lain-lain)
- Kesiapan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan (omzet, modal, pengolahan limbah)
- Kesiapan dari aspek sumber daya manusia (tenaga kerja, upah, kemampuan bahasa asing, dan lain-lain)

4) **Business Forum**

Tahapan pencocokan pasar dan bisnis serta pertemuan pra investasi untuk kemungkinan investasi yang lebih besar, sesuai dengan kebutuhan industri dan pelaku pembiayaan.

- Pada tahap ini, selama dua bulan, masing-masing peserta akan mendapatkan kesempatan untuk:
 - Market Validation** - untuk mendapatkan *feedback* pasar dan kesempatan untuk bertemu dengan potensial akses pembiayaan dan pasar.
- **Group Mentoring** - untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam ketajaman bisnis, mengembangkan produk, memberikan narasi tambahan, dan integrasi rantai pasok.
- **One on one mentoring** - untuk menajamkan potensi pembiayaan atau kemitraan strategis berdasarkan insight dari pelaku investasi dan pasar.

Dalam mendukung pengembangan kapasitas peserta sekaligus sebagai persiapan peserta dalam mengikuti Demoday FoodStartup Indonesia, maka diselenggarakan sesi pembekalan secara daring untuk peserta dengan menghadirkan mentor dengan berbagai keahlian. Mentor berkewajiban untuk memperdalam strategi pengembangan bisnis, baik dari sisi perencanaan investasi, akses pasar, atau mempertajam *business model* maupun produk peserta.

Mentor yang terlibat dalam sesi *business development* adalah:

- Faye Wongso, *Founder & Chairperson* KUMPUL
- Ermey Trisniarty, *Founder* Dapur Cokelat

- Inez Stefanie, *Co-Founder & Partner* Supernova Equatora Capital
- Nilamsari, CEO PT Nava Sari Kreasi
- Jesslyn Gunawan, *Value Creation & PR Community* Trihill Capital
- Erdi Rulianto, *Co-Founder* Timurasa
- Wednes Yuda, *Co-Founder* Cokelat nDalem Yogyakarta
- Vita Datau, *Founder* Indonesia Gastronomy Network
- Yan Rezky Fahza, *Director* Bhavana Capital
- Vincent Kusuma, *Co-Founder & CEO* Vilo Gelato
- Ahmad Fajar, *Managing Director* PT Berkah Ventura Investama
- Samantha Tedjosugondo, *Vice President* Sweef Capital
- Mariko Yoshihara, *Founder & CEO* ANGO Ventures

Peserta FoodStartup Indonesia 2025 dibagi ke 4 kategori sesuai fokus bisnis mereka, yaitu:

- Fokus pada pasar ekspor
- Fokus pada pasar B2C / B2B / Horeca
- Fokus pada pengembangan dengan model kemitraan
- Fokus pada pengembangan pada sisi impact / destination / value

Pembagian kategori peserta:

Brand	Mentor
RASAPRIMA	Faye Wongso, Erdi Rulianto, Yan Rezky
HYGREEN & HYCRUNCH	
KAMPOENG TIMOER	
NARASI VANILLA	
PAYUAN	
RENDANG JAMBI BY CAHAYA MINANG	
BANANANIA	
BILLITON SPICE	
MINANG KAKAO	
MUSTOFA IBU EMI	
ARANA	

Grup 1: Fokus pada pasar ekspor

Brand	Mentor
APB SAMBAL	Jesslyn Gunawan, Wednes Yuda, Ahmad Fajar
BEERU	
CASA GRATA	
ARAMU	
KOFFIKU	
RENDANG GADIH	
GOGOFIELD	
ZUMAMI	
BATTENBERG TIGA INDONESIA	
FISNACK	
KYLAFOOD	
UNIKAYO	
DAMORY	

Grup 2: Fokus pada pasar B2C, B2B,
Horeca

Brand	Mentor
KESU	Nilam Sari, Ermei Trisniarty, Inez Stefanie
NIAT BAIK BAKERY	
LA MORINGA INDONESIA	
YORRI EATERY	
AYAM ASOGU	
BOXMIE	
CHICK CHICK	
KEBAB N ME	

Grup 3: Fokus pada pengembangan dengan model kemitraan

Brand	Mentor
DOUGHZEN	Vincent Kusuma, Vita Datau, Samantha T.
KEBUN INKUNG	
SANFOOD BRILIAN	
SOPONGIRO	
APRILSWEETH	
BARA BUTTER INDONESIA	
JAPAMO	
JUICIBLE BY SURPLUS	
ODDITY COFFEE	
PALA PAPUA	
PASKALI	
STREET SUSHI	
TAMAMIE	

Grup 4: Fokus pada pengembangan pada sisi *impact, destination / value*

Rincian sesi *business development* yaitu sebagai berikut:

- *First Pitch*

Peserta secara bergiliran akan melakukan *pitching* pertama kepada grup mentor sesuai kategorinya, dengan alokasi waktu 5 menit *pitching*, dan 5 menit *feedback* mentor.

- *Communal Session*

Masing-masing mentor mengisi sesi komunal dengan materi sesuai kategori keahliannya.

- *One-on-One Session*

Masing-masing mentor memberikan sesi diskusi *one-on-one* kepada peserta selama 45 menit.

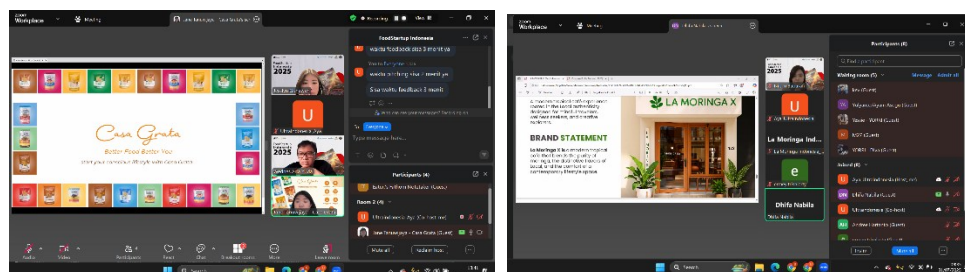
- *Second Pitch*

Peserta secara bergiliran akan melakukan *pitching* kembali kepada grup mentor.

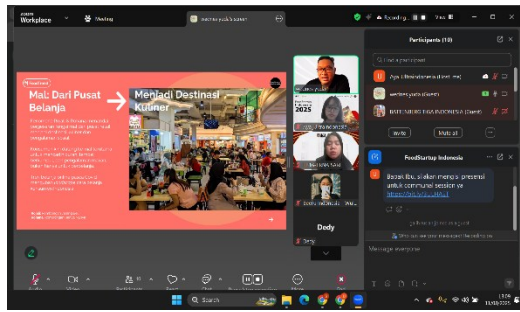
Dokumentasi

Proses *Business Development* FoodStartup Indonesia 2025:

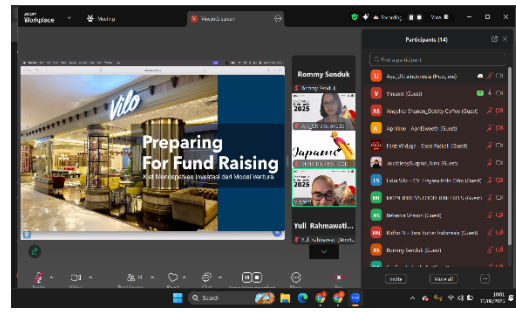
Sesi *First Pitch*:



Communal Session:

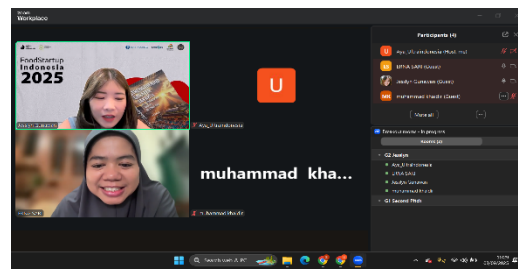
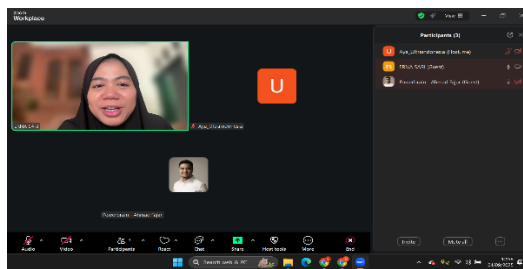


Communal session - Wednes Yuda



Communal session - Vincent Kusuma

One-on-One Session



5) Demoday

Forum *Showcase* dan *Final Pitching* untuk akses pasar dan pendanaan yang lebih besar. Rangkaian kegiatan *Demo Day* berupa:

- *Conference*
- *Product Demo/Showcase*;
- *Pitching Forum*;
- *Mentoring*
- *Investment/Partnership*

Kegiatan *Demo Day* FSI 2025 diselenggarakan oleh Deputy Bidang Industri dan Investasi bekerja sama dengan PT Ultima Rasa Akselerasi (ULTRA), Bank Indonesia, LPEI, Kemendag, dan didukung oleh calon investor seperti Salim Group dan Sweef Capital. Tahun ini, sebanyak 50 pelaku usaha berhasil lolos tahap

kurasi dan berhak mengikuti pendampingan dalam Demo Day FSI yang berlangsung pada 29–31 Oktober 2025 di Hotel Movenpick, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari perjalanan FSI 2025 yang diawali dari *open call* dengan 308 pendaftar, kurasi 50 *pitch deck* terbaik, *mentoring online*, dan *due diligence* (visitasi ke lokasi usaha).

Selama tiga hari kegiatan, para peserta mendapatkan bimbingan dari mentor profesional yang berpengalaman di industri makanan dan minuman, mencakup pengelolaan bisnis, strategi pengembangan produk, hingga peningkatan daya saing. Dari seluruh peserta, yang hadir dalam kegiatan demoday adalah sebanyak 33 pelaku usaha dan kemudian terpilih 10 finalis yang akan mendapatkan kesempatan melakukan *final pitching* di hadapan calon investor, pakar industri, jaringan pasar internasional, serta mitra strategis lainnya.

Demoday FSI 2025 diselenggarakan dengan tujuan untuk membuka potensi kerjasama, akses permodalan dan peningkatan kapasitas bagi 33 pelaku usaha makanan dan minuman (F&B) terpilih dari seluruh Indonesia, yang dilakukan melalui sesi *Government Talk*, *Conference*, *Mentorship*, dan *Final Pitch*. Kegiatan Demo Day FSI 2025 ini dihadiri oleh Menteri Pariwisata, juri dan mentor dari kalangan investor dan pakar industri, tamu undangan lintas K/L dan Asosiasi terkait, serta 33 usaha peserta FSI 2025.

Tujuan utama Demo Day FSI 2025 adalah agar pelaku usaha makanan dan minuman dapat berkembang dan tumbuh secara mandiri, dengan dipertemukan langsung kepada sumber-sumber akses permodalan alternatif dan juga akses pasar. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam mendukung restoran serta usaha F&B Indonesia untuk **"Go Global"**. Selain itu, kegiatan ini juga berfungsi sebagai ajang *showcase* produk, *forum pitching* akhir, dan penjurian untuk menentukan 3 usaha pemenang FSI 2025. Rangkaian acara Demoday FoodStartup Indonesia 2025 dimulai dengan rangkaian acara:

Sesi *Conference* (Konferensi)

a) *Government Talk* (panel discussion) dengan tema Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Usaha Restoran, Industri Makanan dan Minuman Indonesia “Go Global”.

- Kementerian Pariwisata
 - Capaian dan fokus strategis Kementerian Pariwisata tahun 2024 - 2025, dimana terjadi peningkatan signifikan jumlah wisatawan serta pertumbuhan tenaga kerja di sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata juga menyoroti program unggulan seperti Gerakan Wisata Bersih dan Tourism 5:0 AI & Digitalisasi.
 - Adanya sinergi pariwisata dan kuliner lokal sebagai penggerak ekonomi daerah. Kementerian Pariwisata melakukan pembinaan terhadap pelaku wisata desa dan UMKM dengan tujuan memperkuat ekosistem kuliner lokal serta mendukung restoran Indonesia untuk berekspansi ke luar negeri.
- Bank Indonesia

Fokus pemberdayaan ekonomi dan keuangan inklusif oleh Bank Indonesia meliputi tiga pilar utama, yaitu: peningkatan daya saing UMKM, perluasan akses keuangan, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Peran strategis Bank Indonesia dalam mendorong UMKM pangan dan minuman, dimana Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan sektor UMKM.
- LPEI

LPEI mendukung berbagai kategori pelaku usaha, mulai dari koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, hingga korporasi. LPEI menyediakan layanan non-finansial untuk memperkuat kapasitas ekspor UMKM seperti

CPNE (*Coaching Program for New Exporters*), Desa Devisa, dan *Marketing Handholding*.

- Kementerian Perdagangan

Inisiatif S'RASA, mengangkat kuliner dan rempah Indonesia ke panggung dunia. Kolaborasi lintas sektor untuk mendorong ekosistem kuliner ekspor meliputi dukungan logistik, *menu engineering*, pendanaan, promosi, dan pengembangan SDM.

b) Conference

Dilakukan selama 3 hari dengan narasumber dari K/L terkait dan praktisi serta profesional di bidang gastronomi.

- Bapak Pascal Sembel, *Director Unistellar*
 - Kolaborasi strategis antara *family office* dan pelaku F&B untuk mendorong ekonomi gaya hidup Indonesia
 - Transformasi *family office* dari penjaga aset menjadi penggerak pertumbuhan dan dampak sosial
- Bapak Junandar Panggabean, *Managing Director Vaya Constellar*
 - Tantangan dalam manajemen operasional dan strategi pemasaran UMKM F&B meliputi kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi, lokasi, serta pengelolaan hubungan pelanggan.
 - Strategi penetrasi pasar yang efektif dengan memanfaatkan berbagai *channel* distribusi, harga yang kompetitif dan promosi, peningkatan kualitas produk untuk membangun loyalitas pelanggan.
- Bapak Yan Rezky Fahza, *Director Bhavana Capital*
 - UKM berperan besar dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi kendala di tiga aspek utama: akses pembiayaan, kualitas produk, dan kesiapan pasar.
 - Kolaborasi dengan mitra permodalan memberikan manfaat seperti akses modal berkelanjutan, peningkatan kapasitas manajerial dan

ekspor, perluasan jejaring *buyer* internasional, serta peningkatan kepercayaan investor.

- Ibu Christine Besinga, *Head of Director* PT. E&C Productions
 - Kesuksesan global berawal dari kekuatan lokal: membangun identitas merek autentik, model bisnis yang *scalable* dan berkelanjutan, serta konsistensi kualitas dan pengalaman pelanggan.
 - Kolaborasi lintas pihak—pemerintah, diaspora, komunitas F&B, dan mitra internasional—menjadi kunci menciptakan jejaring, membuka akses buyer global, dan memperkuat citra produk Indonesia sebagai brand berkualitas, kreatif, dan berdaya saing tinggi.
- Bapak Rizki Firdaus, Direktur Bisnis dan Pemasaran, Smesco Indonesia
 - Pertumbuhan pesat ekonomi digital dan perubahan perilaku konsumen Indonesia, dimana konsumen kini lebih menghargai *brand* yang autentik dan memiliki nilai sosial, serta lebih mempercayai *review* dari pengguna dibandingkan iklan tradisional.
 - Bisnis perlu mengintegrasikan narasi merek dengan data konsumen, menginvestasikan pada AI dan analitik data, serta membangun ekosistem komunitas dan kreator lokal. Selain itu, memperluas jangkauan melalui retail media dan *live shopping* menjadi langkah penting untuk mempertahankan relevansi dan memperkuat kepercayaan konsumen.
- Bapak Indra Akbar Dilana, Ketua Tim Kerja Pengembangan IKM Makanan
 - Ditjen IKMA, Kementerian Perindustrian
 - Klasifikasi dan tantangan pengembangan IKM pangan di Indonesia. IKM kecil memiliki permodalan 1–5 miliar, menengah 5–10 miliar, dengan omzet tahunan 1–50 miliar; sedangkan 5 IKM atau lebih disebut sentra IKM. Tantangan utama pengembangan IKM pangan meliputi ketersediaan bahan baku, teknologi permesinan, kompetensi

SDM, penerapan standar dan keamanan pangan, serta persaingan harga jual.

- Peningkatan standar dan dukungan ekspor bagi IKM, seperti penerapan HACCP yang membantu IKM meningkatkan mutu produk, perlindungan konsumen, dan kepercayaan pasar. Pemerintah menyediakan berbagai platform ekspor seperti ecd.pom.go.id, inatrims.kemendag.go.id, dan macmap.org untuk mendukung akses informasi dan kepatuhan regulasi.
- Bapak Didik Joko Pursito - Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM
 - Peran dan tugas utama Badan POM dalam pengawasan pangan meliputi dua tahap utama: *Pre-Market Evaluation* (pemeriksaan sarana produksi dan evaluasi registrasi produk) serta *Post-Market Control* (pengawasan sarana produksi dan peredaran, evaluasi pangan ekspor–impor, pengujian sampel, serta pengawasan label dan iklan).
 - Dukungan Badan POM terhadap ekspor pangan olahan mencakup komunikasi dengan negara tujuan, pendampingan pelaku usaha ekspor, serta penerbitan surat keterangan ekspor. Selain itu, Badan POM juga melakukan pelatihan bagi UMKM *Go Export* untuk meningkatkan kesiapan dan daya saing produk di pasar internasional.
- Ibu Vita Datau - Founder Indonesia Gastronomy Network
 - Gastronomi bukan sekadar soal makanan atau industri kuliner, tetapi perpaduan antara seni, kreativitas, digitalisasi, dan harmoni lintas kategori.
 - Isu utama yang dihadapi sektor pangan global adalah *food loss* dan *food waste*, yang menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan dan sistem pangan dunia.
- Ibu Susi Julianti - Direktur PT Mandala Prima Makmur (Prospero Food)

- Perjalanan dan transformasi bisnis PT Mandala Prima Makmur. Dimulai dari usaha rumahan tanpa modal pada tahun 2001, berkembang melalui tahapan penting seperti pembangunan fasilitas produksi, sertifikasi, dan kemitraan strategis. ProsperoFood kemudian lahir sebagai merek unggulan yang terus berinovasi, bertahan di masa krisis, dan berhasil menembus pasar ekspor dengan dukungan pembiayaan dari LPEI serta program FoodStartup Indonesia.
- Keberhasilan dicapai melalui fokus pada kualitas dan pembelajaran berkelanjutan, keterbukaan terhadap informasi baru, serta kombinasi antara *passion*, kreativitas, dan teknologi.
- Ibu Agnes Mallipu – Country Director GAIN
 - Dampak dan ketimpangan sistem pangan terhadap lingkungan dan kesehatan, dimana sistem pangan saat ini mendorong pelanggaran terhadap lima batas planet utama: perubahan sistem lahan, degradasi keanekaragaman hayati, dan krisis sumber daya air tawar. Ketimpangan terlihat jelas, dimana 30% populasi terkaya menyebabkan 70% tekanan lingkungan, sementara hanya sebagian kecil populasi yang hidup dalam ruang aman dan berkeadilan.
 - Pola makan berbasis *Planetary Health Diet* menekankan keseimbangan antara pangan nabati dan hewani, dengan menyesuaikan konteks budaya dan identitas lokal serta mendorong inovasi kuliner sehat dan berkelanjutan.
- Ibu Adriani Onie – CEO & *Founder* Altira Innovation Platform & Investment Advisory
 - Pentingnya pemahaman bisnis dan pendanaan untuk strategi yang berorientasi pertumbuhan. Pemimpin bisnis harus memahami usahanya secara mendalam melalui rencana bisnis yang jelas, visi-misi yang kuat, serta strategi dan eksekusi yang terarah. Selain itu, penting

untuk memahami profil pendana, termasuk jenis pendanaan (*debt, equity, hybrid*), model bisnis dan pendapatan, serta tipe investor (individu, institusi, strategis, atau finansial).

- Agar bisnis siap didanai, pelaku usaha perlu merencanakan, mempersiapkan, dan mengeksekusi strategi dengan disiplin dan fokus. Banyak bisnis gagal berkembang karena tidak memiliki *mindset business-driven* — yaitu pola pikir yang menempatkan strategi dan keberlanjutan bisnis sebagai inti dari pertumbuhan dan pendanaan.

c) Sesi *Mentoring*

Sesi *mentoring* merupakan proses pendampingan selama dua hari, dimana peserta mendapatkan dua sesi *mentoring* masing-masing selama 15 menit dan bergiliran *pitching* untuk menerima umpan balik dari mentor. Produk peserta akan dipresentasikan kepada setiap kelompok mentor selama pendampingan dan dicicipi. Masing-masing peserta didampingi oleh 4-5 mentor dalam 1 ruangan. Peserta yang telah menyelesaikan sesi pendampingan akan kembali ke sesi konferensi.

Mentor yang berperan dalam sesi ini yaitu:

- Fadjar Hutomo, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata
- Bonnie Susilo, Co-Founder FoodStartup Indonesia & CEO Ultra Indonesia
- Faye Wongso, Founder & Chairperson KUMPUL
- Ermey Trisniarty, Founder Dapur Cokelat
- Inez Stefanie, Co-Founder & Partner Supernova Equatora Capital
- Nilamsari, CEO PT Nava Sari Kreasi
- Jesslyn Gunawan, Value Creation & PR Community Trihill Capital
- Erdi Rulianto, Co-Founder Timurasa
- Wednes Yuda, Co-Founder Cokelat nDalem Yogyakarta
- Vita Datau, Founder Indonesia Gastronomy Network

- Yan Rezky Fahza, Director Bhavana Capital
- Vincent Kusuma, Co-Founder & CEO Vilo Gelato
- Ahmad Fajar, Managing Director PT Berkah Ventura Investama
- Samantha Tedjosugondo, Vice President Sweef Capital
- Mariko Yoshihara, Founder & CEO ANGO Ventures
- Dennish Tjandra, VP Investment & Portfolio Growth SPIL Ventures
- Indra Akbar Dilana, Ketua Tim Kerja Pengembangan IKM Makanan - Ditjen IKMA, Kementerian Perindustrian
- Charlotte Kowara, Chief Empowering Officer Accelerice Indonesia
- Fajar Anugerah, Head of Venture Building Terratai Asia
- Mohammad Salim, Project Director Salim Group

d) Sesi *Final Pitch*.

Sesi *Final Pitch* untuk Top 10 FoodStartup Indonesia 2025 yang telah terpilih. Finalis maju satu persatu memaparkan penjelasan mengenai bisnis yang dimiliki. Finalis diberi waktu 3,5 menit untuk menjelaskan mengenai bisnisnya dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dari juri selama 5 menit. Sesi Final Pitch ini disaksikan oleh semua undangan, mentor, *speaker*, maupun peserta selain Top 10 FoodStartup Indonesia 2025.

Juri *Final Pitch* FoodStartup Indonesia 2025:

- Ibu Rizki Handayani – Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Pariwisata
- Ibu Angela Tanoesoedibjo – Co-CEO MNC Group
- Bapak Bonnie Susilo – CEO PT Ultima Rasa Akselerasi & Co-Founder FoodStartup Indonesia
- Bapak Mohammed Salim – Project Director, Salim Group
- Ibu Samantha Tedjosugondo – Vice President, Sweef Capital

- Paparan pertama dilakukan oleh **Ibu Tuti selaku CEO & Founder AranaSpice.**

Aranaspice adalah merek dagang dari PT. SARI BHUWANA NUSAJAYA, sebuah perusahaan yang bergerak sebagai pemasok dan produsen herbal, rempah-rempah, dan produk inovatif berbasis rempah. Misi mereka adalah menyediakan Rempah Otentik untuk Rasa Otentik (Authentic Spices for Authentic Taste). Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 2018 dan telah mengirimkan produk kepada eksportir dan pembeli internasional dari berbagai negara, termasuk Mesir, India, Jepang, Hongkong, Makau, Vietnam, dan Australia. Produk-produk mereka mencakup Turmeric Ground, Ginger Ground, Red Ginger Ground, Ground Spices Mix, dan juga Spice Chocolate. Arana Spice berkomitmen pada standar kualitas GMP & HACCP dan berusaha menjadi perusahaan yang berkelanjutan.

Keuangan dan Rencana Bisnis Masa Depan: Total kebutuhan pendanaan perusahaan adalah 1.53 Juta Rupiah. Alokasi pendanaan terbesar difokuskan untuk Bahan Baku (40%), Mesin Kemas Sachet Ground Spices (15%), dan Mesin Kemas Sachet Ginger Drink (15%).

- Paparan kedua dilakukan oleh **Bapak Galih selaku CEO & Founder Kylafood.**

Kylafood adalah perusahaan makanan instan tradisional Indonesia yang menghadirkan produk seperti seblak instan dengan harga terjangkau dan masa simpan panjang. Produk ini menjawab masalah sulitnya menikmati makanan tradisional yang umumnya butuh waktu, tenaga, dan biaya besar. Kylafood telah divalidasi pasar dengan lebih dari 740.000 ulasan positif dan penghargaan seperti 1st Winner Tokopedia Nyam! serta Top Inspiring Seller Shopee. Dengan penjualan lebih dari 2 juta item dan ratusan ribu pengikut di berbagai platform, Kylafood menargetkan ekspansi besar melalui distribusi ritel nasional seperti Alfamart, Indomaret, dan Family

Mart, serta ekspor internasional. Didukung oleh pertumbuhan industri makanan Indonesia dan tren pencarian tinggi terhadap seblak, Kylafood menargetkan penjualan mencapai Rp100 miliar pada tahun 2030

- Paparan ketiga dilakukan oleh **Ibu Eka selaku CEO & Founder Sanfood.**

Sanfood adalah perusahaan makanan sehat asal Indonesia yang fokus mengatasi masalah stunting dengan menyediakan produk organik rendah gula, garam, dan tanpa pengawet buatan, seperti ricequik, mac & cheese, hingga bubur bayi siap saji. Produk Sanfood dikembangkan melalui riset bersama akademisi dari UI dan IPB, memiliki sertifikasi lengkap, serta dipasarkan melalui kanal B2C (marketplace, retail, reseller) dan B2B (whitelabel, distributor, ekspor). Dengan lebih dari 2 juta produk terjual dan program edukasi gizi bagi jutaan keluarga, SanFood menargetkan peningkatan kapasitas produksi 10 kali lipat dan ekspansi ke 5 negara pada 2026, sambil menciptakan dampak sosial berupa peningkatan gizi anak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

- Paparan keempat dilakukan oleh **Bapak Dharma selaku CFO Mustofa Ibu Emi.**

Mustofa Ibu Emi adalah bisnis makanan siap saji yang berdiri sejak 2015, berawal dari resep rumahan seorang ibu di Ciamis. Produk utamanya, kentang mustofa, memiliki tekstur renyah, rendah minyak, tahan hingga dua tahun tanpa pengawet, dan telah bersertifikasi Halal, BPOM, PIRT, serta HACCP. Dengan kapasitas produksi lebih dari 25.000 pouch per bulan, produk ini tersedia di gerai Superindo, jaringan reseller nasional, dan telah diekspor ke beberapa negara Asia. Selain itu, Mustofa Ibu Emi juga menjalankan kerja sama maklon dengan berbagai brand. Pada 2025, omzet perusahaan mencapai lebih dari Rp1,8 miliar, dengan rencana ekspansi pasar ke Jepang, Australia, Singapura, dan Timur Tengah.

- Paparan kelima dilakukan oleh **Ibu Jane selaku CEO & Founder Casa Grata.**

Casa Grata adalah brand camilan sehat asal Indonesia yang berdiri sejak 2018, menawarkan berbagai snack manis dan gurih seperti crackers dan cookies berbahan alami untuk mendukung gaya hidup sadar dan sehat. Produk Casa Grata kini tersedia di lebih dari 100 toko di Indonesia dan dijual juga secara online serta ke hotel dan resort. Dengan pertumbuhan penjualan yang pesat dan ekspansi ke tiga negara, Casa Grata tengah mengajukan investasi sebesar Rp1 miliar untuk peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, dan distribusi global. Merek ini menargetkan pasar konsumen menengah ke atas yang aktif dan peduli kesehatan, serta tengah mempersiapkan sertifikasi HACCP untuk mendukung ekspor ke pasar internasional seperti Pakistan, Chile, Singapura, dan Malaysia.

- Paparan keenam dilakukan oleh **Ibu Hansni selaku CEO & Founder Doughzen.**

Doughzen adalah brand donat modern hasil kolaborasi ibu dan anak yang menghadirkan donat #superfluffy dengan perpaduan resep keluarga klasik dan topping kekinian. Dikenal lewat varian populer seperti Ovomelting for You dan Berry Cheesy, Doughzen berfokus pada kualitas bahan, inovasi rasa, serta pengalaman konsumen yang menyenangkan. Dengan strategi penjualan melalui dine-in, delivery, event, dan kemitraan franchise, Doughzen mencatat pertumbuhan pendapatan 119% dan net profit naik 15 kali lipat pada 2024. Brand ini kini hadir di berbagai pusat perbelanjaan besar seperti Summarecon Mall, Grand Indonesia, dan Pondok Indah Mall 3, serta menawarkan sistem kemitraan menarik dengan profit sharing 70:30 dan dukungan penuh dari franchisor.

- Paparan ketujuh dilakukan oleh **Ibu Ria selaku CEO & Founder Street Sushi.**

Street Sushi adalah brand sushi halal asal Indonesia yang menghadirkan sushi dengan cita rasa lokal, harga terjangkau, dan kualitas konsisten melalui kolaborasi dengan Chef Fahmi (MasterChef Indonesia). Berdiri sejak 2022, Street Sushi berkembang dari gerai kecil menjadi ekosistem sushi berskala nasional dengan 27 outlet aktif di berbagai kota dan pertumbuhan pendapatan hingga empat kali lipat dalam tiga tahun. Mengusung konsep “Sushi Selera Nusantara”, brand ini menawarkan beragam menu seperti sushi, ramen, bento, dan donburi. Street Sushi juga mengintegrasikan teknologi AI dalam manajemen franchise, lokasi outlet, dan sistem operasional, dengan visi menjadi ekosistem F&B berbasis AI terdepan di Indonesia serta menargetkan 2.000 mitra “Sushipreneur” dan pendapatan Rp20 miliar per tahun pada 2028.

- Paparan kedelapan dilakukan oleh **Bapak Wiko selaku CEO & Founder Fisnack.**

Fisnack adalah inovasi makanan bergizi berbasis kulit ikan hasil samping industri fillet yang diolah menjadi cemilan renyah dan sehat dengan konsep ramah lingkungan dan zero waste. Diproduksi oleh PT Fisnack Inovasi Pangan, produk ini memiliki aroma tidak amis, tidak berminyak, dan lebih bergizi dibandingkan snack lain. Fisnack juga memberikan dampak sosial melalui pemberdayaan ibu janda dan pemuda putus sekolah. Dengan strategi ekspor, perluasan pasar HOREKA, dan promosi digital, Fisnack menargetkan omzet hingga Rp30 miliar pada 2027, serta menjadikan dirinya sebagai brand kerupuk ikan premium nomor satu di Indonesia.

- Paparan kesembilan dilakukan oleh **Bapak Fariz selaku CEO Paskali.**

Sosis Paskali, diproduksi oleh CV Paskal Trijaya Food, adalah brand olahan daging yang telah berdiri lebih dari 40 tahun, menawarkan produk sosis, smoked meat, abon, dan nugget yang bergizi, lezat, dan higienis dengan harga terjangkau. Memiliki sertifikasi BPOM, Halal, dan NKV, Paskali

dikenal karena tekstur daging asli dan rasa autentik dari proses pengasapan tradisional. Dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata 40% per tahun dan jaringan distribusi di Jawa Barat dan Jabodetabek, Paskali aktif melakukan promosi melalui kids cooking class, chef demo, dan kolaborasi brand, serta menargetkan ekspansi nasional lewat strategi pemasaran digital dan modern trade.

- Paparan kesepuluh dilakukan oleh **Ibu Novita selaku CEO & Founder Niat Baik Bakery.**

Niat Baik Bakery adalah usaha roti dan kue asal Lombok yang mengusung misi sosial untuk memberdayakan perempuan korban pernikahan dini, KDRT, dan pelecehan melalui pelatihan baking dan peluang usaha. Berdiri tanpa modal, bisnis ini tumbuh lebih dari 380% dalam empat tahun dan kini menjual produk di Lombok, Sumbawa, dan Bali, dengan fokus pada pasar oleh-oleh wisatawan dan segmen keluarga. Selain berorientasi bisnis, Niat Baik juga menerapkan prinsip ESG seperti donasi roti sisa ke panti sosial dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Dengan rencana ekspansi ke kota lain dan sistem kemitraan seperti reseller, mini outlet, dan central kitchen, Niat Baik menargetkan pertumbuhan omzet hingga miliaran rupiah sambil terus membawa pesan bahwa setiap roti dapat memberi harapan dan kemandirian bagi perempuan.

e) *Sesi Awarding*

Acara *Awarding* diberikan oleh Menteri Pariwisata, Ibu Widiyanti Putri Wardhani kepada Top 3 FoodStartup Indonesia 2025. Adapun ketiga usaha yang menjadi pemenang FSI 2025 yaitu Juara I diraih oleh Casa Grata (camilan sehat bebas gluten berbahan lokal organik yang sukses menembus pasar global); Juara II diraih oleh Street Sushi (kreasi sushi halal dengan 80 menu fusion Jepang yang lezat dan terjangkau, lengkap dengan saus homemade

husus); dan Juara III diraih oleh Doughzen (donat kentang dengan rasa variatif yang telah memiliki beberapa cabang di lokasi strategis).



Dokumentasi
Mentoring Foodstartup Indonesia (FSI)

Terdapat beberapa tantangan yang menghambat *scale up* dan ekspor UMKM F&B. Tantangan utama bagi Industri Kecil Menengah (IKM) F&B meliputi ketersediaan bahan baku yang berfluktuasi, kondisi sanitasi yang belum memadai, dan rendahnya adopsi teknologi, yang secara langsung mempengaruhi kualitas dan konsistensi produk. Pelaku usaha juga menghadapi kendala dalam mengamankan properti yang sesuai dan modal yang fleksibel, serta kebutuhan krusial untuk memenuhi standarisasi internasional seperti HACCP, Halal, dan regulasi spesifik negara tujuan untuk siap ekspor.

Selama Demo Day FSI 2025, sebanyak 24 dari 33 peserta berhasil memperoleh ketertarikan kerjasama/dukungan/investasi/pembiayaan sejumlah Rp

156.450.314.000,-. Potensi investasi terbesar teridentifikasi pada *startup* seperti TAMAMIE (Rp 80 miliar), PAPUA GLOBAL SPICE (Rp 30 miliar,-), dan LA MORINGA (Rp 10 miliar). Selain pendanaan, *output* kegiatan ini juga menghasilkan berbagai *insight* strategis dari pembicara, termasuk pentingnya kemitraan *Family Office* dengan operator F&B, perlunya strategi penetrasi dan ekspansi pasar nasional yang berbasis data, dan peranan Gastronomi 5.0 yang menekankan inovasi, identitas, dan keberlanjutan.

Melalui keseluruhan rangkaian kegiatan, para peserta diharapkan dapat memaksimalkan potensi permodalan dan kolaborasi lintas sektor untuk membuka peluang kerja sama dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Pada akhirnya, program ini diharapkan turut memperkuat ekosistem wisata kuliner sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan.

Tabel 3. 7 Daftar Kerjasama Peserta Foodstartup Indonesia (FSI)

No	Nama UKM	Provinsi	Deskripsi	Potensi Nilai (Rp)	Pihak Yang Tertarik
1	APB SAMBAL	DKI Jakarta	Sambal kemasan praktis dengan cita rasa autentik Nusantara dalam beragam varian, dibuat dari bahan segar tanpa pengawet.		
2	APRILSWEETH	Jawa Barat	Brand dessert premium yang menawarkan cookies, brownies, dan cakes dengan rasa autentik dan dibuat fresh setiap hari.	3.500.000.000	Vincent Kusuma
3	ARAMU	Sumatera Utara	Minuman botanikal modern yang hadir dalam bentuk sachet siap minum, sirup, pasta, dan tisane, menawarkan cara praktis menikmati manfaat bahan alami	5.000.000.000	Kemenperin, Salim Group, Equatora, Sweef Capital,
4	ARANASPACE	Jawa Timur	Rempah premium yang diperoleh dari sumber terbaik di Indonesia, diolah dan didistribusikan ke pasar global untuk menghadirkan cita rasa autentik Nusantara.	1.163.000.000	Kemenperin, Sweef Capital, Salim Group, Bizhare, Equatora

No	Nama UKM	Provinsi	Deskripsi	Potensi Nilai (Rp)	Pihak Yang Tertarik
5	AYAM ASOGU	DKI Jakarta	Makanan olahan ayam bercita rasa Nusantara dengan branding yang fun dan menu autentik seperti goreng, bakar, rendang, kalio, hingga woku.		
6	BANANANIA	DIY	Produsen olahan pisang seperti keripik, tepung gluten-free, rambak, dan cookies yang diproses higienis dengan rasa lezat untuk dinikmati semua kalangan.	1.250.000.000	SPIL Venture
7	BARA BUTTER	Jawa Barat	Croissant premium dengan rasa autentik, dikembangkan dalam model social enterprise untuk mendukung reseller dan UMKM.		
8	CASA GRATA	DKI Jakarta	Camilan sehat vegan dan gluten-free berupa crackers dan cookies berbahan lokal bernutrisi, dipanggang sempurna untuk menemani gaya hidup sehat dan seimbang.	1.000.000.000	Terattai, Bhavana Capital, Sweef Capital, Salim Group
9	CHICK CHICK	Jawa Barat	Camilan ayam olahan bergaya jajanan Taiwan yang dibalut tepung renyah dan bumbu khas, menawarkan sensasi gurih yang memanjakan.	705.314.000	NSK
10	DOUGHZEN	DKI Jakarta	Donat kentang klasik yang lembut dengan sentuhan rasa modern yang dibuat dari resep keluarga, menjadi camilan manis favorit lintas generasi.	900.000.000	NSK, Salim Group, SPIL Venture, Bizhare, Unistellar, Trihil, Vincent Kusuma
11	FISNACK	Jawa Barat	Camilan kulit ikan premium yang diproses higienis dengan varian rasa kekinian, menjadi pilihan bergizi dan praktis untuk aktivitas sehari-hari.	1.000.000.000	Bhavana Capital, Salim Group, Bizhare

No	Nama UKM	Provinsi	Deskripsi	Potensi Nilai (Rp)	Pihak Yang Tertarik
12	GOGOFIELD	DKI Jakarta	Ragam camilan alami bebas gluten dan rendah indeks glikemik, tanpa minyak sawit, yang menawarkan rasa gurih-manis menyehatkan dengan harga terjangkau.		
13	JAPAMO	Papua	Cookies gluten-free berbahan sagu organik dari Papua dengan kemasan menarik, menyajikan pilihan rasa kekinian tanpa pengawet.	500.000.000	SPIL Venture
14	JUICIBLE	DKI Jakarta	Juice dan smoothie bar berkelanjutan yang mengolah buah imperfect menjadi minuman segar bernutrisi dengan sentuhan madu, sekaligus mengurangi food waste.		
15	KEBAB N ME	Yogyakarta	Kebab bercita rasa lintas budaya yang dipadukan sesuai selera Indonesia, menjadikan kuliner sebagai jembatan rasa dari berbagai daerah.		
16	KEBUN INKGUNG	Jawa Tengah	Destinasi kuliner bernuansa perkebunan di Semarang yang menyajikan makanan tradisional dari komunitas lokal, lengkap dengan pengalaman edukatif peternakan-perkebunan.		

No	Nama UKM	Provinsi	Deskripsi	Potensi Nilai (Rp)	Pihak Yang Tertarik
17	KOFFIKU	Jawa Timur	Kopi instan tanpa gula yang sehat dan dapat diseduh dingin, menjadi pilihan ramah bagi penderita diabetes maupun pecinta kopi praktis.	332.000.000	Vincent Kusuma
18	KYLAFOOD	Jawa Barat	Camilan bercita rasa Indonesia dengan berbagai varian yang cocok dinikmati kapan pun serta ideal sebagai buah tangan.	5.000.000.000	NSK, Faye Wongso, Bhavana Capital, Sweef Capital, Salim Group, Prosperofood
19	LA MORINGA	NTT	Produk sehat berbahan kelor dari NTT yang sugar-free dan gluten-free, sekaligus mendukung kesejahteraan petani lokal.	10.000.000.000	Sweef Capital,
20	MINANG KAKAO	DKI Jakarta	Cokelat bean-to-bar premium berbahan alami dan kakao terfermentasi baik, bercita rasa kompleks bernuansa cokelat, buah, dan bunga.	2.000.000.000	Timurasa, SPIL Venture
21	MUSTOFA EMI	Jawa Barat	Kentang mustofa berbumbu balado dengan topping protein alami seperti ayam, udang, dan teri, menghadirkan rasa gurih pedas yang unik.	700.000.000	Kemenperin, Timurasa, Sweef Capital, Salim Group
22	NARASI VANILLA	Sulawesi Utara	Produk vanilla asli Indonesia dalam bentuk pasta, extract, powder, dan beans untuk menyempurnakan aroma dessert & baking premium.	3.500.000.000	Unistellar
23	NIAT BAIK BAKERY	NTB	Aneka roti dan bolu yang dipanggang fresh setiap hari tanpa pemanis buatan dan pengawet, menghadirkan rasa rumahan berkualitas.	700.000.000	Kemenperin, Samantha, Faye Wongso

No	Nama UKM	Provinsi	Deskripsi	Potensi Nilai (Rp)	Pihak Yang Tertarik
24	ODDITY COFFEE	DKI Jakarta	Brand F&B yang membawa pengalaman kuliner dan kopi unik bernuansa Indonesia dalam ekspansi regional.		
25	PAPUA GLOBAL SPICE	Papua	Pala berkualitas tinggi bebas aflatoksin dan bebas aroma asap yang memenuhi standar keamanan pangan Eropa.	30.000.000.000	Terattai, Equatora, Bhavana Capital
26	PASKALI	Jawa Barat	Produsen sosis dan daging asap premium tanpa aditif, bertekstur padat dengan proses pengasapan tradisional dan kemasan modern.	900.000.000	Salim Group, Bizhare
27	RENDAN G GADIH	Sumatera Barat	Rendang Minang siap saji tanpa pengawet, diproses modern dengan resep keluarga serta tersedia dalam banyak varian rasa dan bahan.		
28	SANFOOD	Banten	Produsen makanan anak dan bumbu dapur berbahan alami berteknologi modern untuk menghasilkan produk yang aman, lezat, dan bergizi.	2.000.000.000	Salim Group
29	SOPONGIRO	Jawa Timur	Ekosistem produk Omega-3-6-9 berbasis nabati dalam bentuk minyak & bubuk protein dengan beragam pilihan kemasan praktis.	R&D dan distribusi	Timurasa, SPIL Venture, Prosperofood,
30	STREET SUSHI	DKI Jakarta	Sushi halal dengan 80+ menu fusion Jepang yang lezat dan terjangkau, lengkap dengan saus homemade khas.	1.500.000.000	Salim Group, Prosperofood
31	TAMAMIE	Banten	Mie topping ayam terlengkap di Indonesia yang dihasilkan dari peternakan sendiri, dan dijual dengan harga terjangkau.	80.000.000.000	NSK, SPIL Venture,
32	YORRI EATERY	Jawa Timur	Dessert vegan-friendly seperti banana bread, spread, brownies, dan cheese cake yang lezat serta mendukung kolaborasi petani lokal.	800.000.000	Ermey T., NSK

No	Nama UKM	Provinsi	Deskripsi	Potensi Nilai (Rp)	Pihak Yang Tertarik
33	ZUMAMI	Jawa Timur	Mi telur, mi sayur, dan mi instan panggang rendah minyak yang sehat, ramah anak, serta tersedia untuk private label.	4.000.000.000	Kemenperin

5. *Wonderful Indonesia Scale-up Hub (WISH) paket Tour Gastronomy*

Sektor pariwisata memiliki peran yang krusial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, untuk mencapai potensi maksimalnya usaha pariwisata di Indonesia perlu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan memperkuat kapasitas usaha. Kementerian Pariwisata melalui Deputy Bidang Industri dan Investasi menginisiasi sebuah program *Wonderful Indonesia Scale-up Hub (WISH)* paket tur gastronomi. Kegiatan ini juga di inisiasi sebagai bagian dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yaitu Pariwisata Naik Kelas melalui pemanfaatan pariwisata minat khusus sebagai daya tarik pada bidang gastronomi.

Program ini telah mendokumentasikan ke dalam **Katalog 15 Besar Peserta WISH Paket Tur Gastronomi** untuk digunakan sebagai instrumen promosi strategis Kementerian di *platform* seperti [Indonesia.travel](https://www.indonesia.travel), *event* dalam dan luar negeri ataupun juga dapat digunakan sebagai *channel* distribusi yang dapat dimanfaatkan oleh Asosiasi untuk menjual paket tur tersebut kepada konsumen.

Target peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para pelaku usaha *travel and tour operation* baik perusahaan/perorangan yang memiliki paket wisata tur gastronomi/kuliner. Kegiatan ini telah diselenggarakan pada tanggal 28 Mei - 10 Agustus 2025, diselenggarakan secara *online*.

Tujuan

- 1) Menjangkau Akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan exposure pariwisata Indonesia;

- 2) Memperkuat manajemen dan pengembangan usaha dalam meningkatkan kapasitas pengembangan bisnis dan membuka akses permodalan;
- 3) Meningkatkan kualitas produk dan layanan pariwisata sebagai upaya diversifikasi produk dan layanan yang lebih menarik;
- 4) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan usaha pariwisata;
- 5) Mendukung terwujudnya ekosistem pariwisata yang kuat dan berkelanjutan, serta turut berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja;
- 6) Mengidentifikasi tren pariwisata global, implementasi teknologi terkini, dan pengembangan produk/layanan yang inovatif akan meningkatkan daya saing usaha di pasar domestik dan internasional.

Tahapan Penyelenggaraan Program WISH

1) *Open Call*

Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun data base, mengidentifikasi pelaku pelaku usaha potensial khususnya yang memiliki paket tur siap jual pada bidang gastronomi dengan menetapkan kriteria khusus yang mendukung tercapainya tujuan prioritas Kemenpar yaitu Pariwisata Naik Kelas.

2) Tahap Kurasi dan Pengumuman 50 Besar Peserta

Identifikasi tahap awal melalui seleksi administrasi dan aspek kelayakan, dari total 103 pelaku usaha yang mendaftar, didapat 50 pelaku usaha yang memenuhi kriteria dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu *capacity building*.

3) Tahap *Capacity Building* Memperkuat *Value* Produk

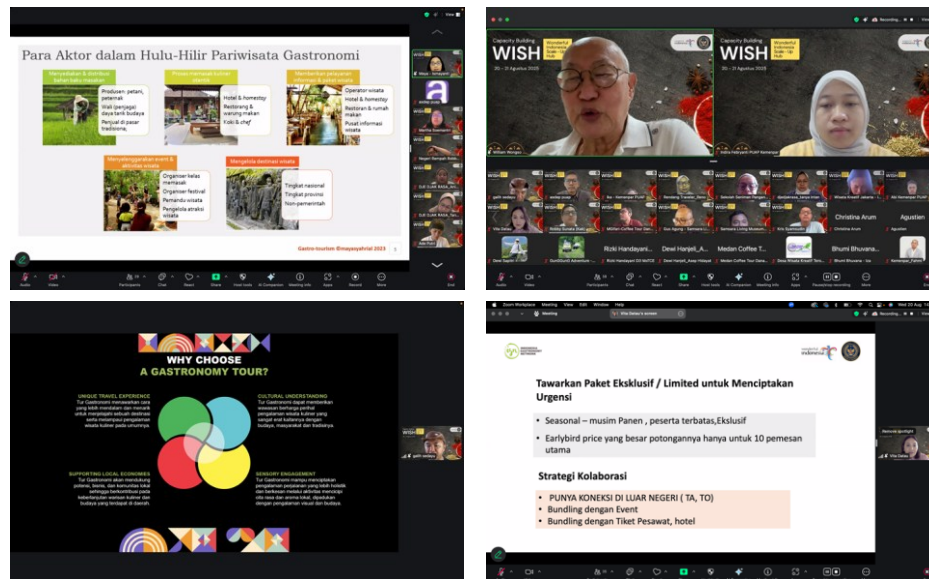
Pada tahap ini 50 pelaku usaha yang lolos, akan mendapatkan pembekalan oleh para mentor yang expert di bidangnya. Hal ini sebagai upaya mewujudkan pelaku usaha yang berdaya saing dan siap untuk memasuki pasar global.

Tema dan Narasumber *Capacity Building* Program WISH Paket Tour Gastronomy

Lingkup pengembangan kapasitas yang dilakukan adalah pengembangan usaha dan kesiapan para pelaku untuk mengakses pasar dan permodalan.

<i>Crafting World-Standard Gastronomy Experiences</i>	William Wongso – Komite Kuliner Indonesia
<i>Business Growth Strategies</i>	Vita Datau – Indonesia Gastronomy Network
<i>Designing Engaging Experiences</i>	Galih Sedayu – Indonesia Creative Cities Network
<i>Building Innovative Product</i>	Ismayanti – Akademisi Bidang Kuliner
<i>Gastronomic Tourism Branding and Storytelling</i>	Ade Putri – Culinary Storyteller
<i>Preferences audiences in Gastronomy content</i>	Martha – Arts & Culture Expert, Google
<i>A Recipe for Powerful Digital Sales</i>	Syarif Hidayatullah - Traveloka
<i>Conquering New Territories in Tourism Business</i>	Marcia Tirtawisata – Panorama Group
<i>Customizing Packages for Different Market Segments</i>	Hasiyana Ashadi – PT Marintur Indonesia

Dokumentasi *Capacity Building* Program WISH Paket Tour Gastronomy



4) Tahap Presentasi dan Wawancara

Pada tahap ini dari para peserta mempresentasikan *pitch deck* yang telah disusun dengan format yang sudah ditentukan oleh kurator yang terdiri dari Vita Datau, Ade Putri, Ibu Ismayanti, dan Bapak Galih Sedayu. Pada tahapan ini, peserta diberikan waktu 5 menit untuk paparan dan dilanjutkan sesi tanya jawab dan tanggapan dari para kurator.

5) Tahap Kurasi Lanjutan dan Pengumuman 15 besar peserta

Kurasi tahap kedua meliputi kekuatan storytelling produk yang dimiliki para pelaku. Selain itu para kurator memberikan masukan kepada narasi yang disajikan para peserta untuk dikembangkan kembali sehingga layak untuk didokumentasikan ke dalam katalog promosi. Dari hasil kurasi dan penilaian oleh para kurator, maka didapatkan 15 besar pelaku usaha hasil kurasi program WISH paket tur gastronomi 2025 sebagai berikut:

- Medan Coffee Tour Danau Toba – Ruang Warna Kreasi, Sumatera Utara
- Muaro Jambi Suvarnavipa Gastro Cultural Regenerative Tour – Sekolah Seniman Pangan, Jambi
- Belitung Culinary Adventure – Desa Wisata Terong, Bangka Belitung
- Rendang Traveler Gastronomy Tour – Rendang Traveler Uni Reno, D.K. Jakarta
- Food Heritage Walking Tour /Gastronomi Walking Tour – Wisata Kreatif Jakarta, D.K. Jakarta
- Spice Route Cultural Heritage Trip / Jelajah Negeri Rempah – Negeri Rempah Foundation, D.K. Jakarta
- Gastronomi Hanjeli Local food from Geopark Ciletuh Palabuhanratu – Desa Wisata Hajeli, Jawa Barat
- Telusur Rasa (Gastronomy Walking Tour Pasar Tradisional) – Jejak Rasa Nusantara / Dje Djak Rasa, D.I. Yogyakarta

- Boja the Magic Table – Bhumi Bhuvana, D.I. Yogyakarta
- Salak Agro Jeep Village Trail – Gunggung Adventure, Bali
- North Bali Gastronomy Journey – Pengalaman Rasa Nusantara, Bali
- Balinese Authentic Gastronomy Journey – Samsara Living Museum, Bali
- Menyusuri Budaya & Kuliner Pesisir Utara Kalimantan Barat – Yok Kita Tour Khatulistiwa, Kalimantan Barat
- Spice Island Tour with Janet DeNeefe – honeymoonguesthouse, Maluku
- Explore Cengkeh Afo Tour – Cengkeh Afo and Gamalama Spices, Maluku Utara

Setelah peserta mendapat masukan dari kurator, para peserta mengembangkan narasi storytelling yang baik, proses selanjutnya adalah mendokumentasikannya ke dalam satu media promosi yang dapat dimanfaatkan stakeholder terkait. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penyusunan katalog paket tur gastronomi yang berisi informasi lengkap meliputi profil usaha, informasi paket yang dijual dan storytelling yang menggambarkan destinasi dan cerita di balik sajian.

Katalog Peserta Program WISH paket Tour Gastronomy Tahun 2025



6. *Wonderful Indonesia Scale-up Hub (WISH) Bagi Pelaku Usaha Pariwisata*

Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan memperkuat kapasitas usaha bagi pelaku usaha pariwisata di Indonesia, Kementerian Pariwisata menginisiasi sebuah program yang bernama *Wonderful Indonesia Scale Up Hub (WISH)* sebagai katalisator untuk mengakselerasi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha pariwisata di seluruh Indonesia.

Dengan pelatihan dan pendampingan yang terstruktur, kolaborasi yang intensif dari lintas sektor, serta memanfaatkan integrasi teknologi, program WISH akan menjadi platform yang efektif untuk meningkatkan daya saing usaha pariwisata, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Tujuan

- 1) Meningkatkan daya saing produk dan kapasitas pelaku usaha pariwisata.
- 2) Memperkuat manajemen bisnis dan keuangan pelaku usaha pariwisata
- 3) Memperluas akses pasar dan promosi produk pariwisata Indonesia.
- 4) Memfasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan strategis.
- 5) Mendorong inovasi dan teknologi digital dalam operasional usaha.
- 6) Membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.
- 7) Mendukung terwujudnya ekosistem pariwisata yang kuat dan berkelanjutan, serta turut berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja;

Ruang Lingkup Program

- 1) Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Permodalan
 - Peningkatan kapasitas, pelatihan, dan *mentoring* dari para ahli di berbagai bidang, termasuk manajemen keuangan, operasional, inovasi produk dan layanan, serta strategi pengembangan bisnis.

- Forum bisnis dengan potensial kolaborator dan dengan berbagai lembaga keuangan terkemuka (bank dan non-bank) yang siap mendukung pertumbuhan usaha Anda melalui skema pembiayaan yang sesuai;
- Kemitraan dengan lembaga keuangan untuk membuka akses bagi pelaku usaha untuk mendapatkan layanan keuangan yang sesuai, bisa berupa pinjaman modal kerja, investasi, atau skema pembiayaan lainnya;

2) Pengembangan Akses Pasar

- Pendampingan untuk pengembangan produk, identifikasi market baru dan penguatan branding produk;
- Perluasan Jaringan Pasar melalui platform promosi terpadu, business matching, partisipasi dalam pameran pariwisata, dan pemanfaatan platform digital;
- *Matchmaking* dengan Industri terkait seperti agen perjalanan, operator tur, platform akomodasi, dan pihak terkait lainnya dapat memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha pariwisata.

Rangkaian Kegiatan

1) Forum Komunikasi

Identifikasi kebutuhan, skema kolaborasi, dan pemetaan mitra keuangan. Pada tahap ini juga akan dilakukan finalisasi rancangan program, sosialisasi program, dan dimulainya tahap open call peserta.

2) *Kick off* dan *Open Call*

Merupakan fase awal pelaksanaan program yang menandai secara resmi dimulainya seluruh rangkaian kegiatan.

3) *Capacity Building*

Pelatihan manajemen, digitalisasi, inovasi produk, strategi bisnis.

4) *Demo Day (Business Forum & Matching)*

Pertemuan *one-on-one* antara peserta dengan investor, lembaga pembiayaan, dan mitra industri.

5) *Monitoring & Evaluasi*

Penilaian pertumbuhan usaha dan efektivitas program.

Dokumentasi *Kick-off* Program WISH



7. *Capacity Building Wonderful Indonesia Scale-up Hub (WISH)*

Program *Capacity Building* dirancang untuk meningkatkan kapasitas serta daya saing pelaku usaha. Di tengah dinamika pertumbuhan industri dan persaingan pasar yang semakin ketat, penguatan kompetensi menjadi kebutuhan strategis agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam ekosistem bisnis yang lebih luas. *Capacity Building* diselenggarakan dalam format *webinar class* selama 3 hingga 4 hari. Kegiatan ini menghadirkan beragam topik pelatihan yang relevan, aplikatif, dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi pelaku usaha saat ini. Materi yang diberikan mencakup manajemen usaha, digitalisasi bisnis, inovasi produk, serta strategi bisnis yang efektif.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh kesempatan untuk memperluas wawasan dalam pengelolaan usaha, memahami pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta meningkatkan kemampuan inovasi sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan daya saing yang kuat. Dengan demikian, implementasi *Capacity Building* menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaku usaha binaan Program WISH tidak hanya menerima fasilitasi, tetapi juga memperoleh

peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Program ini diharapkan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta serta mendukung tujuan WISH dalam menciptakan pelaku usaha yang unggul, produktif, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam perencanaan program, Kemenpar bekerjasama dengan Kumpul sebagai *enabler* yang diharapkan dapat menghubungkan mitra-mitra potensial dengan pelaku usaha hasil seleksi program WISH.

Tujuan Capacity Building

- 1) Meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha agar mampu beradaptasi dengan dinamika industri, memenuhi standar pasar yang lebih luas, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
- 2) Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam manajemen usaha, digitalisasi, inovasi produk, pengemasan, *storytelling*, legalitas, serta strategi bisnis yang relevan dengan kebutuhan pasar.
- 3) Mendorong penguatan usaha pariwisata di sektor gastronomi, maritim, dan wellness tourism melalui peningkatan efisiensi operasional, kualitas produk, dan ketangguhan usaha dalam menghadapi pasar global. Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengakses peluang pasar dan pendanaan, termasuk pemahaman tentang investasi, permodalan, serta penyusunan proposal bisnis untuk menarik minat investor.
- 4) Membentuk ekosistem pelaku usaha yang unggul, produktif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi, pemberdayaan komunitas, serta pengembangan usaha yang memiliki daya tarik tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Capacity Building Tahap I

Tema: Meningkatkan Usaha Pariwisata yang Tangguh di Pasar Global

Pelaksanaan Capacity Building Tahap I berfokus pada penguatan kapasitas pelaku usaha pariwisata yang bergerak di sektor gastronomi, maritim, dan *wellness tourism*. Tujuan utama kegiatan ini adalah membangun ketangguhan usaha dalam

menghadapi pasar global melalui peningkatan keterampilan teknis, manajemen, dan strategi keberlanjutan. Materi pelatihan mencakup aspek-aspek praktis seperti pengemasan produk, *storytelling*, legalitas usaha, dan digitalisasi. Pembekalan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, serta mendorong keberlanjutan ekonomi komunitas.

Peserta adalah 127 pelaku usaha yang lolos Kurasi Tahap I (Administrasi & Operasional) dari 447 pendaftar yang memenuhi syarat.

Hari, tanggal : Rabu, Kamis, Selasa & Rabu, 10, 11, 16 & 17 September 2025

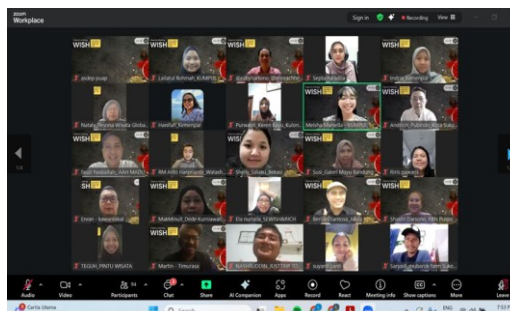
Waktu : 13.30 – 16.00 WIB

Tempat : Zoom Cloud

Tema dan Narasumber *Capacity Building* Tahap I program WISH Tahun 2025

Tema & Uraian	Narsum
I.Membangun Tata Kelola Usaha yang Tangguh dan Berkelanjutan. Membahas prinsip dasar dan strategi tata kelola bisnis yang baik agar UMKM mampu tumbuh lebih profesional, transparan, dan siap bersaing di pasar.	Rangga Dwi Basuki (Ketua Komite Tetap Kewirausahaan UMKM Bidang Jaringan Pasar KADIN)
II.Menguatkan UMKM Melalui Optimalisasi Rantai Pasok. Membahas bagaimana UMKM dapat terhubung dalam ekosistem rantai pasok, membangun kemitraan, dan meningkatkan efisiensi distribusi produk.	Erdi Rulianto (Chief of Business Development, Timurasa)
III.Strategi Menembus Pasar Retail Modern. Membahas peluang dan tantangan UMKM dalam memasuki jaringan retail modern, termasuk tips negosiasi, standard produk, dan strategi penjualan.	Wednes Aria Yuda (Founder & CTO of Cokelat n Dalem)
IV.Sinergi UMKM dalam Holding untuk Akselerasi Pertumbuhan. Membahas peluang dan tantangan UMKM dalam memasuki jaringan retail modern, termasuk tips negosiasi, standard produk, dan strategi penjualan.	Ester Jeanette (Co-founder & Chief Marketing Officer of Social Bread)

Dokumentasi *Capacity Building* Tahap I Program WISH Tahun 2025



Capacity Building Tahap II

Tema: Meningkatkan Nilai Usaha Pariwisata untuk Menarik Pasar dan Investor

Capacity Building Tahap II difokuskan pada upaya meningkatkan nilai usaha pariwisata agar lebih menarik bagi pasar dan investor, khususnya bagi pelaku usaha di sektor gastronomi, maritim, dan *wellness tourism*. Melalui agenda ini, peserta mendapatkan pembekalan keterampilan praktis seperti teknik *storytelling*, pemahaman terkait permodalan dan investasi, serta penyusunan proposal bisnis yang efektif untuk menarik minat investor. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, pelaku usaha diharapkan mampu mengembangkan bisnis yang lebih tangguh, efisien, serta memiliki daya tarik tinggi sehingga dapat bersaing di pasar global.

Peserta adalah 25 pelaku usaha yang lolos Kurasi Tahap II dari 127 pelaku usaha.

Hari, tanggal: Rabu, Kamis & Jumat, 8, 9 & 10 Oktober 2025

Waktu : 09.30 – 11.00 WIB

Tempat : Zoom Cloud

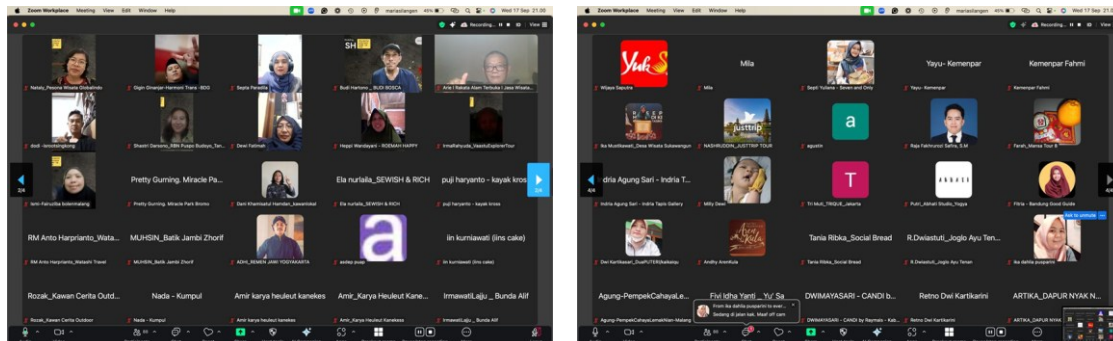
Tema dan Narasumber *Capacity Building* Tahap II program WISH Tahun 2025

Tema & Uraian	Usulan Narsum
I. Storytelling for Business. Membantu pelaku usaha memahami cara membangun narasi yang kuat tentang produk dan destinasi wisata.	Galih Sedayu (Founder Indonesia Creative Cities Network / ICCN)
II. Permodalan & Investasi. Membantu pelaku usaha dalam hal memahami berbagai sumber pembiayaan usaha, termasuk skema kemitraan dan modal ventura.	Faye Wongso (Founder & Chairperson KUMPUL)
III. Pembuatan Proposal/Deck. Membantu pelaku usaha dalam menyusun proposal bisnis atau pitch deck yang efektif dan menarik.	Yoris Sebastian (Creative Thinker & Founder OMG Consulting)

Pelatihan yang disusun secara terstruktur tidak hanya membekali UMKM dengan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong kolaborasi antar-pelaku dan pemangku

kepentingan. Kerja sama ini memperluas jejaring sekaligus mendukung penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan. Topik-topik yang relevan dengan perkembangan saat ini diharapkan dapat membantu peserta mengoptimalkan potensi usaha, meningkatkan daya saing, dan menciptakan dampak yang dapat direplikasi di berbagai daerah.

Dokumentasi *Capacity Building* Tahap II Program WISH Tahun 2025



8. Demoday *Wonderful Indonesia Scale-up Hub* (WISH)

Program *Wonderful Indonesia Scale-up Hub* (WISH) 2025 diselenggarakan sebagai upaya Kementerian Pariwisata untuk memperkuat ekosistem usaha pariwisata di Indonesia. Latar belakang program ini berangkat dari kebutuhan pelaku usaha untuk memperoleh akses permodalan dan akses pasar yang lebih kuat.

Program WISH menjadi salah satu wujud dukungan pemerintah dalam upaya menjembatani tantangan UKM pariwisata dalam mengembangkan usaha, sekaligus mendorong terbentuknya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, investor, komunitas wirausaha, dan mitra industri. Dengan demikian, program WISH bukan hanya wadah pendampingan, tetapi sebuah ekosistem berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan pariwisata yang inklusif.

Setelah melalui proses *opencall* dan kurasi dari ratusan pendaftar, terpilih 25 finalis yang mendapat pendampingan intensif. 25 pelaku usaha tersebut antara lain:

- 1) Joglo Ayu Tenan – Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Remen Jawi Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta

- 3) PT Salaku Cara Enak Makan Salak – DKI Jakarta
- 4) Borneo Escape – Kalimantan Tengah
- 5) PT. Yuksri Prima Indonesia – Jawa Timur
- 6) Renjana Enterprise – Sulawesi Selatan
- 7) Abhati Studio – Daerah Istimewa Yogyakarta
- 8) Rumah Budaya Nusantara (RBN) Puspo Budoyo – Banten
- 9) Diet Special Needs – Jawa Barat
- 10) Insan Wisata Kids – Daerah Istimewa Yogyakarta
- 11) Sewish & Rich – DKI Jakarta
- 12) Pranala Travel & Leisure – DKI Jakarta
- 13) PT. Gundonesia Sri Bhuwana – Jawa Tengah
- 14) Stella's Corner – Sumatera Utara
- 15) Rakata Alam Terbuka – DKI Jakarta
- 16) PT. Ririens Food Indonesia – Papua
- 17) PT Watashi Outdoor Indonesia a.k.a Watashi Travel – Jawa Barat
- 18) Manggis Travel – Sulawesi Utara
- 19) Indria Tapis Gallery – DKI Jakarta
- 20) Keren Kayu – Daerah Istimewa Yogyakarta
- 21) Batik Siger – Lampung
- 22) DigiTiket – Jawa Tengah
- 23) Kawanlokal – Jawa Barat
- 24) Seven and Only – Daerah Istimewa Yogyakarta
- 25) Family Sejahtera – Jawa Timur

Sebagai inti dari program pengembangan akses pasar dan akses permodalan sekaligus salah satu output utama program ini, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Demoday WISH. Demoday WISH mendatangkan para pelaku untuk bertemu langsung dengan para calon mitra dari Lembaga Pembiayaan, Asosiasi, Platform Digital hingga NGO. Dari 25 peserta yang lolos kurasi, 20 peserta

hadir sebagai berikut: Keren Kayu, Batik Siger, Digitiket, Kawanlokal, Seven and Only, serta Family Sejahtera berhalangan hadir mengikuti Demoday.

Demoday WISH 2025 dilaksanakan pada Selasa, 21 Oktober 2025, pukul 13.30 hingga 18.00 WIB. Acara berlangsung di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, sebuah lokasi yang dipilih karena kualitas fasilitas dan reputasinya, juga karena diselenggarakan bersamaan dengan KUMPUL *Connect for Change Summit* 2025, mendukung terselenggaranya pertemuan tingkat tinggi dengan investor, lembaga keuangan, dan mitra profesional. Lokasi premium tersebut memberikan lingkungan yang kondusif untuk *pitching* yang kredibel, *networking* yang intensif, serta menciptakan kesan profesional bagi calon investor terhadap para finalis yang tampil. Sebanyak 72,50% (29 sesi) dari business matching mendapatkan ketertarikan dari calon mitra. Sebanyak 30 sesi (75%) akan berlanjut komunikasi di luar acara, dengan 3 sesi diseriisi dengan *meeting* lanjutan. Program ini juga memperkuat database pelaku usaha pariwisata, yang terdokumentasikan pada katalog, pemberitaan, hingga platform industri Kemenpar. Setelah sesi *pitching* dilaksanakan, 19 (sembilan belas) pelaku usaha berhasil dipertemukan dengan calon mitra dalam 40 sesi *business matching*. Dari pertemuan tersebut, sebanyak 72,50% (29 sesi) mendapatkan ketertarikan dari calon mitra. Sebanyak 22,50% (9 sesi) netral dan hanya 5% (2 sesi) belum menemukan kecocokan. Pertimbangan utama para mitra didominasi oleh model bisnis (52,20%), ukuran dan potensi pasar (30%), dan skema timbal balik (8,11%). Sebanyak 30 sesi (75%) akan berlanjut komunikasi di luar acara, 3 sesi diseriisi dengan meeting lanjutan.

Terdapat sejumlah investor yang terlibat pada sesi *business matching* diantaranya Traveloka, Ataourin, Liburdulu, Dolan, KADIN, KADIN ITH, Bank Rakyat Indonesia, Kasir Pintar, Eresto, Supernova Ecosystem, Sweef Capital, Wahyoo Capital, NS Consulting, dan Bizhare.



Dokumentasi Demoday *Wonderful Indonesia Scale-up Hub* (WISH)

Melalui kegiatan ini, pihak penyelenggara *Asia New Travel Bootcamp* (ANTB 2026) mendapatkan informasi tentang *Demoday Wonderful Indonesia Scale-up Hub* (WISH) 2025 pada harian bisnis Okinawa yang ditulis oleh responden Jepang di Indonesia. *Asia New Travel Bootcamp 2026* (ANTB 2026) merupakan sebuah program yang di inisiasi oleh WithblueDMC bekerja sama dengan Okinawa Prefectural Government. Program ini bertujuan untuk membangun komunitas inovatif dalam industri pariwisata di seluruh negara Asia serta memfasilitasi kolaborasi terbuka antara industri partner, pembuat kebijakan, dan pengusaha. ANTB 2026 mengundang Deputy Bidang Industri dan Investasi sebagai panelis yang akan memberikan materi terkait '*How Travel Accelerator is nurturing innovator's community for quality tourism*' serta tertarik untuk berkolaborasi dengan program WISH, salah satunya dengan mengundang dan memfasilitasi kehadiran 2 (dua) orang pelaku usaha dari WISH, untuk mengikuti rangkaian kegiatan (*bootcamp & business forum*) di Ryukyu Shinpo Hall in Naha, Okinawa – Japan pada Februari 2026. Acara ini akan diikuti oleh para tamu undangan, pembicara dan pelaku usaha dari 8 negara diantaranya Japan, South Korea, Taiwan, Hong Kong, China, Thailand, Singapore, dan Malaysia.

Adapun 2 pelaku usaha dari Wonderful Indonesia Scale-up Hub (WISH) 2025 yang akan mengikuti kegiatan tersebut adalah:

1) Borneo Escape – Kalimantan Tengah

Usaha *tour and travel* yang fokus kepada *experiential tour based*. Produk wisata yang ditawarkan fokus kepada *eco-village* dan interaksi budaya masyarakat dayak, dalam aktivitasnya wisatawan diberikan edukasi konservasi orang utan yang dalam tahap pra-rilis. Perjalanan wisata dirancang dalam konsep *slow travel & mindfulness*.

2) Insan Wisata Kids – D.I Yogyakarta

Usaha *tour and travel* dengan target market *niche market*. Produk wisata yang ditawarkan memadukan antara ekowisata dan desa serta kearifan lokal yang

dapat dinikmati oleh anak & keluarga. Insan Wisata Kids juga menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama untuk mengedukasi dan berbagi pengetahuan dengan wisatawan.

9. Rasa Rempah Indonesia (S'Rasa)

Rasa Rempah Indonesia (S'Rasa) adalah sinergi antar Kementerian/Lembaga, Diaspora, Swasta dan UMKM yang bertujuan menjadikan rempah dan rasa dari Indonesia sebagai duta bangsa di kancan mancanegara. Program ini merupakan gerakan diplomasi kuliner global yang tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga menghadirkan identitas, cerita dan warisan budaya Indonesia melalui restoran Indonesia di berbagai negara.

Terdapat 6 Kementerian turut mendukung program Rasa Rempah Indonesia yang diatur melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), yaitu: Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian UMKM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata. Adapun PKS tersebut berlaku sejak tahun 2025 hingga 2029, pada 5 (lima) restoran Indonesia di 5 (lima) kota, yaitu Amsterdam, London, New York, Tokyo dan Sydney.

1) Hak dan Kewajiban Kementerian Pariwisata dalam PKS S'Rasa

Hak	Kewajiban
a. Merekomendasikan usaha jasa dan produk makanan dan minuman Indonesia yang siap ekspansi ke luar negeri untuk mengikuti program Rasa Rempah Indonesia b. menerima data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Program Rasa Rempah Indonesia dari PIHAK lain sesuai permintaan.	1. Mensinergikan pelaksanaan Program Rasa Rempah Indonesia dengan program Kementerian Pariwisata dalam upaya pengembangan usaha jasa dan produk makanan dan minuman berbasis budaya dan pariwisata Indonesia; 2. Melakukan Kurasi Peserta program Rasa Rempah Indonesia bersama dengan pihak lain; 3. Melakukan promosi Program Rasa Rempah Indonesia secara mandiri dan/atau bersama dengan pihak lain; dan 4. Memberikan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Program Rasa Rempah Indonesia kepada pihak lain sesuai permintaan.

2) Roadmap Rasa Rempah Indonesia



3) Rencana Aksi Rasa Rempah Indonesia - Kementerian Pariwisata

No	Aksi	Periode	Output	Outcome	Mitra
1	Pemetaan 7 sentra rempah unggulan (Aceh, Maluku, Jawa, dll)	Nov - Des 2025	Data Daerah Penghasil rempah yang terintegrasi dengan pariwisata	Database destinasi "Spice Location" terintegrasi	Dinas Pariwisata Daerah
2		Jan - Okt 2026	Video dokumenter setiap daerah		
3	Mengikutsertakan Program Srasa sebagai salah satu bagian dalam event-event internasional (ITB Berlin, WTM London, dll)	Jan-Des 2026	Kampanye "Rasa Rempah Indonesia" (untuk Restoran mitra) + SpiceUp to The World (untuk Rempah di daerah wisata)	Peningkatan awareness tentang Rempah (Srasa) terutama membawa produk minuman dan makanan di Program MICE luar negeri.	PCO, Kemendag, GAPMMI, Perwadag, Korporasi
4	Pelatihan Manajemen & Pelatihan Hospitality restoran mitra (Pelayanan Restoran) oleh Ahli	Jan - Mar 2026	Training manual & pelatihan staf	SDM restoran meningkat dalam layanan pelanggan berkelas internasional	PHRI, Akademisi bisnis, Konsultan F&B
5	Pembuatan TVC Promosi Program SRASA	Jan - Apr 2026	Video TVC 3 Versi Cerita, Durasi 3Menit, 60 Detik, 30 Detik, dan 10 Detik.	Placement pada media-media kampanye oleh kementerian lain	Vendor Production House
6	Evaluasi Kegiatan	Semester	Laporan evaluasi kinerja	Rekomendasi pengembangan, skalabilitas program	Internal

Launching S'Rasa (Rasa Rempah Indonesia) telah dilaksanakan pada hari Kamis 28 Agustus 2025 berlokasi di Sarinah- Thamrin, Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan dari 6 Kementerian/ Lembaga.

4) Dukungan Kolaborasi Kementerian Pariwisata dalam Program S'Rasa 2025

- Launching S'Rasa

Launching S'Rasa (Rasa Rempah Indonesia) telah dilaksanakan pada hari Kamis 28 Agustus 2025 berlokasi di Sarinah- Thamrin, Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan dari 6 Kementerian/ Lembaga.

- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 6 Kementerian

Penandatanganan dilakukan oleh pejabat eselon I terkait, disaksikan oleh Menteri / Wakil Menteri sekaligus menandai peluncuran Program S'RASA. Acara launching S'Rasa dilakukan secara Hybrid, dengan konsep Ambience Nuansa Wastra Nusantara dan dihadiri kurang lebih 150 orang. Kementerian Pariwisata turut mendukung seremonial peluncuran program dan logo S'Rasa melalui Opening Art Grand Launching "**Rasa Rempah Indonesia**" berdurasi: 7-8 menit oleh **Studio Kinarya GSP (Guruh Soekarno Putra)**, bertujuan menghadirkan perjalanan rempah Nusantara dari masa kejayaan perdagangan hingga menjadi identitas kuliner Indonesia. Setelah itu para hadirin dipersilahkan mencicipi masakan nusantara diantaranya: Coto Makassar, Pempek Palembang, Sate Ayam, Bakso dan lainnya, serta menyaksikan demo masak oleh chef Dedes Dwi Ratnasari.



Dokumentasi
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 6 Kementerian

- Kurasi Restoran Pilot Project Program S'Rasa

Sebagai salah satu tim kurator program S'Rasa, Kementerian Pariwisata turut berpartisipasi dalam penentuan kriteria peserta program S'Rasa, bersama tim kurator lainnya dari perwakilan 5 Kementerian, asosiasi dan profesional di bidang kuliner dan gastronomi. Adapun syarat dasar restoran dalam Pilot Project S'Rasa yang telah ditetapkan oleh para kurator, yaitu:

- Memiliki ijin usaha restoran sesuai peraturan setempat
- Telah berjalan minimal 1 tahun dan memiliki komitmen tetap akan berjalan
- Bersedia memberikan laporan keuangan jika membutuhkan dukungan akses pembiayaan
- Terbuka untuk semua Diaspora Indonesia
- Seluruh menu yang disajikan adalah menu Indonesia

Selain itu, kriteria dan skema penilaian restoran yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 3. 8 Kriteria dan Skema Penilaian Restoran

NO	KRITERIA UTAMA	BOBOT	SKOR MAKSIMAL
1	Manajemen & Keuangan	20%	20
2	Menu & Produk	20%	20
3	Legal & Regulasi	20%	20
KRITERIA SEKUNDER			
1	Lokasi & Demografi	10%	10
2	Kondisi Restoran	10%	10
3	Branding & Konsep	10%	10
4	Komunitas & Dukungan Lokal	10%	10

Setelah melalui proses kurasi, verifikasi dan wawancara pada program S'Rasa yang bertujuan meningkatkan ekspor produk melalui restoran Indonesia di luar negeri, maka telah terpilih 8 restoran pilot Project S'Rasa sebagai berikut:

- Sydney: pandawa dan Medan Ciak
- Amsterdam: Warung Barokah dan Toko Kalimantan
- New York: Jakarta Munch
- Tokyo: Kuta Bali Cafe dan Amanah Mande Padang
- London: Warung Madura

Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penilaian, meliputi:

- Legallitas
- Kondisi Restoran
- Menu dan produk yang dijual seluruhnya adalah menu khas Indonesia
- Branding dan konsep
- Lokasi dan demografi
- Komunitas dan dukungan lokal
- Perkiraan omzet

Program Rasa Rempah Indonesia (S'Rasa) bertujuan meningkatkan ekspor produk indonesia melalui peningkatan jaringan restoran Indonesia di luar negeri, meningkatkan posisi Indonesia sebagai destinasi gastronomi dunia melalui penguatan UMKM, inovasi produk, peningkatan kualitas dan standardisasi, serta perluasan akses pasar. Program ini sekaligus mendorong pelestarian kekayaan rempah Nusantara dan penguatan rantai nilai dari hulu ke hilir, sehingga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi sektor industri pengolahan pangan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PDRB serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

10. *Wonderful Indonesia Gourmet (WIG)*

Sebagai wujud dukungan pemerintah dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan melalui program unggulan Pariwisata Naik Kelas, Kementerian Pariwisata bersama Indonesia Gastronomi Network (IGN) menginisiasi sebuah festival gastronomi internasional dengan nama Wonderful Indonesia Gourmet (WIG). Melihat pergeseran

tren pariwisata global, Indonesia dipandang perlu memperkuat positioning Indonesia di peta gastronomi Dunia. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan *value* kuliner Indonesia lebih dari sekadar makanan tradisional dan menjadi pilar utama pariwisata berkualitas yang mampu menarik perhatian dunia, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan.

Ada tujuan penyelenggaraan program WIG yaitu Selain itu WIG diharapkan dapat mendukung tumbuhnya ekosistem yang menghubungkan semua rantai pasok dari hulu ke hilir (*from farm to table*), termasuk petani, nelayan, produsen rempah, UMKM, koki, dan restoran, sehingga menciptakan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Wonderful Indonesia Gourmet menjadi langkah awal bagi Kementerian Pariwisata untuk memperluas program, dengan menawarkan paket wisata kuliner di Jakarta, Bali, dan destinasi lainnya kepada wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Melalui program itu diharapkan akan banyak koki Internasional ternama untuk berkolaborasi dengan ikon kuliner Indonesia.

Wonderful Indonesia Gourmet adalah selebrasi atas keunikan dan keanekaragaman gastronomi Indonesia. Wonderful Indonesia Gourmet akan menjadikan gastronomi sebagai jendela pengenalan sekaligus pemantik rasa ingin tahu yang lebih jauh tentang alam, budaya, dan keramahan Indonesia. Melalui Wonderful Indonesia Gourmet, berharap kuliner Indonesia semakin dikenal dan diapresiasi oleh dunia. Gastronomi Indonesia dapat terus meningkatkan daya saing di kancah global dan berkontribusi dalam meningkatkan citra bangsa Indonesia.

Rangkaian kegiatan WIG diawali dengan peluncuran buku “*Indonesia Gourmet Guide*” yang berkolaborasi bersama Priceless. Buku ini akan menjadi panduan istimewa bagi wisatawan dalam menjelajahi kekayaan kuliner Indonesia, serta menghadirkan pengalaman cita rasa yang berkesan. Di tahap awal, terdapat 120 restoran yang telah terkurasi yang tersebar di dua kota Jakarta dan Bali.

WIG dilaksanakan di 2 kota, Jakarta dan Bali, mulai dari tanggal 25 September - 1 Oktober 2025. Di hotel Kempinski Jakarta untuk peluncuran buku dan The Meru Sanur untuk kegiatan Artisan Market dan Talkshow.

- **Talkshow**

Tujuan Kegiatan

- Talkshow Wonderful Indonesia Gourmet 2025 diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat posisi Indonesia pada peta gastronomi dunia dengan menjadikan kuliner sebagai identitas budaya sekaligus daya tarik pariwisata.
- Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membuka ruang kolaborasi strategis antara pemerintah, pelaku industri, asosiasi, akademisi, dan komunitas kreatif guna memperluas jejaring, memperkuat branding, serta mendorong peluang ekspor produk kuliner Indonesia ke pasar internasional.

Kegiatan talkshow mengundang narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku Industri Gastronomi nasional dan dari luar Indonesia, akademisi,

Tabel 10 Topik dan Narasumber Talkshow Wonderful Indonesia Gourmet (WIG)

pemerintah, expertise di dunia gastronomi, NGO dan supply chain. Daftar topik menarik yang diangkat beserta pemateri sebagai berikut:

Topic Session	Speakers
The Vision Roadmap for Wonderful Indonesia Gourmet (WIG)	Dheraaj Raina (Mastercard) Vinsensius Jemadu (Kemenpar) Kevindra Soemantri (WIG Committee) Vita Datau (Moderator)
Sesi ini menekankan pentingnya branding kuat, diplomasi internasional, konsistensi promosi, serta sinergi antar pemangku kepentingan agar WIG dapat bersaing dengan festival kuliner dunia.	

Indonesia's Next Chapter in Global Gastronomy

William Wongso (KKI)
Prycillia Amijo (COO Sarirasa Grup)
Gede Kresna (Rumah Intaran)
Edward Speirs (moderator)

Sesi ini menekankan perlunya pendidikan kuliner yang kuat, pemilihan ikon kuliner Indonesia, penyederhanaan menu untuk pasar global, serta penguatan narasi budaya dan ekologi dalam mempromosikan kuliner Indonesia.

Rethinking Restaurants in the Food Chain

Eelke Plasmeijer (Founder Locavore)
Ragil Imam Wibowo (owner Nusa Gastronomy)
Ade Putri
Irvan Helmi (Co-founder Anomali Coffee)
Reynaldi Kusumanegara (Moderator)

Sesi ini menekankan bahwa ekosistem kuliner berkelanjutan memerlukan penguatan distribusi bahan, dukungan riset untuk petani, edukasi konsumen, serta mekanisme sertifikasi yang lebih inklusif.

From Local Hero to Global Shelf: The Art of F & B Export

Helianti Hilman (Founder of Javara Indonesia)
Jamie Najmi (Co-founder of Maazarat Cheese)
Audrey Purwana (East Indies Gin)
Melody (Moderator)

Sesi ini menegaskan bahwa ekspor produk kuliner Indonesia memerlukan ekosistem kolektif, penguatan traceability, solusi atas hambatan logistik dan regulasi, serta strategi branding konsisten berbasis identitas lokal.

The Global Playbook: Strategy Storytelling and Stardom

Hans Christian (Owner of August)
Tim Brooke Webb
Will Goldfarb (Founder of Room 4 Desserts)
Kevindra Soemantri (Moderator)

Sesi ini menegaskan bahwa identitas rasa yang kuat, kualitas layanan, pembangunan ekosistem talenta, serta representasi yang inklusif merupakan faktor kunci untuk meningkatkan reputasi kuliner Indonesia di tingkat global.



Dokumentasi Artisan Market

Dampak yang dapat dirasakan dengan diselenggarakannya *Artisan Food Market* dalam rangkaian WIG adalah sebagai berikut:

1) Mendukung dan Mengangkat UMKM Lokal

Memberikan platform promosi dan penjualan bagi pelaku UMKM dengan audiens internasional, termasuk media, *Key Opinion Leader* (KOL), dan wisatawan mancanegara yang berpartisipasi dalam WIG, sehingga produk mereka dapat dikenal dan diakui secara global.

2) Memperkuat Rantai Pasok Gastronomi

Mendukung konsep pariwisata berkelanjutan dengan menghubungkan produsen bahan baku (hulu) dengan koki/restoran (hilir), mendorong penggunaan bahan-bahan lokal berkualitas tinggi, memberikan pengalaman gastronomi Indonesia yang dipromosikan berakar kuat pada bahan baku dan keahlian lokal.

3) Edukasi dan Pengalaman Wisata

Memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk belajar langsung tentang proses pembuatan, asal usul bahan, dan kekayaan rempah-rempah yang digunakan dalam produk kuliner Indonesia. Menawarkan pengalaman kuliner yang mendalam dan berbeda bagi wisatawan, melengkapi pengalaman bersantap di restoran premium yang juga masuk dalam WIG.

Wonderful Indonesia Gourmet (WIG) berperan dalam meningkatkan wawasan terhadap kuliner nusantara serta mendukung UMKM kuliner khas Indonesia. Melalui

program *Wonderful Indonesia Gourmet* (WIG) diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor kuliner, dan menarik lebih banyak wisatawan berdaya beli tinggi.

2. Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata

Tabel 3. 9 Capaian Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Juta Rp)	Realisasi ²	Capaian (%)
2	Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata	Nilai investasi sektor pariwisata Bali	11.588.448,83	16.052.380,42	138,52%
		Nilai investasi sektor pariwisata Greater Jakarta	16.240.176,28	23.744.721,75	146,21%
		Nilai investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau	1.538.191,03	2.011.716,61	130,78%
		Nilai investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta- Prambanan	806.249,89	1.363.228,87	169,08%
		Nilai investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	360.397,41	1.741.446,85	483,20%
		Nilai investasi sektor pariwisata Danau Toba	178.340,99	43.180,55	24,21%
		Nilai investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena	3.596.543,27	4.324.513,54	120,24%
		Nilai investasi sektor pariwisata Manado-Likupang	263.796,05	442.682,56	167,81%
		Nilai investasi sektor pariwisata Bangka Belitung	85.455,06	113.770,57	133,13%
		Nilai investasi sektor pariwisata Raja Ampat	29.723,50	81.815,43	275,26%
		Nilai investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	2.403.887,91	1.992.084,52	82,87%
		Nilai investasi sektor pariwisata Wakatobi	55.731,56	65.444,49	117,43%
		Nilai investasi sektor pariwisata Morotai	7.430,87	9.232,95	124,25%

Keterangan:

²Sumber: Kementerian Investasi BKPM dan diolah kembali oleh Deputi Bidang Industri dan Investasi

Capaian indikator Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif didapatkan melalui formula/cara hitung sebagai berikut:

1. Ambil data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Pariwisata;
2. Identifikasi Deliniasi Kabupaten/Kota yang masuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif;
3. Hitung Nilai Investasi Pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif

Tahun 2025 capaian nilai investasi sektor pariwisata di bagi kepada 10 lokasi Destinasi Prioritas dan Regeneratif, data nilai investasi sektor pariwisata didapatkan dari Kementerian Investasi/ BKPM dan diolah oleh tim Deputi Bidang Industri dan Investasi. Pada periode tahun 2025 ini, sebagian besar target nilai investasi sektor pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif sudah tercapai, dari 13 destinasi, 11 diantaranya sudah melampaui target, hal ini dapat di pengaruhi oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di destinasi-destinasi tersebut.

Selain itu, untuk Labuan Bajo dan Raja Ampat capaian nilai investasi sektor pariwisata cukup tinggi yaitu mencapai 483,2% dan 275,26%, hal ini antara lain dapat dipengaruhi oleh:

1. Labuan Bajo:

1) Status Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Labuan Bajo ditetapkan sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) oleh pemerintah, sehingga secara kebijakan mendapatkan prioritas dalam pembangunan infrastruktur, promosi dan kemudahan investasi. Status ini menciptakan kejelasan arah pengembangan jangka panjang yang menarik investor besar domestik maupun asing

2) Pembangunan Infrastruktur

Labuan Bajo memperoleh investasi signifikan untuk infrastruktur pariwisata seperti pelabuhan maritim, taman kota, jaringan jalan, fasilitas bandar udara, serta marina

yang menopang kegiatan wisata dan konektivitas transportasi. Sehingga Investor mendapat kepastian *return* melalui pembangunan amenitas penunjang yang komprehensif.

3) Labuan Bajo sebagai destinasi MICE

Pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi MICE telah meningkatkan daya tarik investasi sektor pariwisata melalui penciptaan permintaan terhadap fasilitas akomodasi dan venue berstandar internasional. Karakteristik wisatawan MICE yang memiliki tingkat belanja tinggi dan kebutuhan layanan premium mendorong ekspansi kapasitas usaha serta meningkatkan kelayakan finansial proyek hospitality. Kondisi tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi nilai investasi sektor pariwisata di wilayah tersebut.

4) Realisasi Investasi yang konsisten tumbuh

Data menunjukkan realisasi investasi di Labuan Bajo terus meningkat. Investasi ini banyak ditanamkan di sektor akomodasi, restoran, dan fasilitas pariwisata lain menunjukkan tren kuat investor menilai potensi pertumbuhan jangka menengah-panjang di wilayah ini.

5) Regulasi Daerah yang Mendukung

Pemerintah daerah, khususnya melalui Peraturan Daerah tentang penanaman modal dan tata ruang, mendukung proses perizinan yang lebih cepat dan insentif lokal yang membuat iklim investasi di Labuan Bajo semakin kondusif.

2. Raja Ampat:

1) Daya Tarik Alam yang Unik & Bernilai Global

Raja Ampat memiliki ekosistem laut tertinggi di dunia, dengan ribuan spesies koral dan biota laut yang menjadikannya salah satu destinasi selam dan ekowisata premium internasional. Hal ini memposisikan kawasan ini sebagai magnet bagi investor yang tertarik pada usaha wisata premium (*resor, live-aboard, diving center, eco-resort*). Potensi alam ini menciptakan nilai komersial tinggi terhadap investasi pariwisata yang fokus pada pengalaman unik wisata alam air.

2) Kebijakan Pemerintah Mendukung Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah pusat dan daerah menempatkan Raja Ampat dalam prioritas pengembangan pariwisata berkelanjutan termasuk melalui *Master Plan* pariwisata dan dukungan infrastruktur. Fokusnya adalah ekowisata berkualitas yang mempertahankan nilai konservasi lingkungan sambil memberikan manfaat ekonomi.

3) Kebijakan Lingkungan dan Penciptaan Iklim Investasi yang Jelas

Pemerintah pusat mencabut izin kegiatan pertambangan di kawasan yang sensitif secara ekologis, menegaskan komitmen perlindungan lingkungan dan pariwisata sebagai prioritas. Hal ini memperjelas batasan penggunaan lahan, sehingga investor tidak khawatir terhadap perubahan regulasi ekstraktif yang dapat mengguncang citra pariwisata.

4) Pertumbuhan Wisata Minat Khusus

Pertumbuhan wisata minat khusus (*special interest tourism*) di Raja Ampat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong nilai investasi dan kualitas belanja wisatawan. Karakter destinasi yang eksklusif dan berbasis konservasi membuat model pengembangannya berbeda dari destinasi *mass tourism*.

Namun terdapat 2 destinasi yang masih belum mencapai target yaitu Danau Toba dan Bromo Tengger Semeru, beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:

1) Danau Toba:

- Kepastian regulasi dan tata kelola: perizinan dan urusan lahan bisa cukup kompleks, investor butuh kepastian hukum dan stabilitas kebijakan jangka panjang.
- Infrastruktur belum merata: Bandara Silangit sudah berkembang, tapi konektivitas lanjutan (jalan, pelabuhan, transport lokal) belum sepenuhnya optimal.
- Fasilitas pendukung (air bersih, pengolahan limbah, listrik di beberapa titik) masih perlu peningkatan.

- *Return on Investment* (ROI) cenderung lambat: tingkat okupansi hotel masih fluktuatif dan kunjungan wisatawan cenderung musiman.

2) Bromo Tengger Semeru:

- Status Kawasan Konservasi (Taman Nasional): sebagian besar area BTS berada dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang memiliki pembatasan ketat terhadap pemanfaatan ruang.
- Aksesibilitas dan Konektivitas: meskipun relatif dekat dari Surabaya dan Malang, BTS belum memiliki Bandara internasional di kawasan inti destinasi, infrastruktur terintegrasi, akses yang masih berbasis darat serta kondisi geografis pegunungan membatasi investasi skala besar.
- Pola kunjungan wisatawan: karakteristik kunjungan di BTS didominasi oleh *one day trip* dan lama tinggal (*length of stay*) relatif pendek.

Secara keseluruhan capaian nilai investasi pariwisata di 10 destinasi pariwisata prioritas dan 3 destinasi regeneratif tahun 2025 adalah sebesar Rp 51.986.219,11 Juta atau 51,98 Triliun, angka ini merupakan 70,66% dari capaian realisasi investasi sektor pariwisata nasional tahun 2025.

Tercapainya target program kerja yang telah ditentukan, tentu saja tidak terlepas dari berbagai faktor internal maupun faktor eksternal yang mendukung tercapainya realisasi investasi pariwisata, antara lain:

- a) Deputi Bidang Industri dan Investasi aktif dalam melakukan promosi kepada calon investor PMA maupun PMDN
- b) Deputi Bidang Industri dan Investasi melaksanakan event promosi pariwisata dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait seperti *Roundtable Discussion*, *Bilateral Meeting* dan *One on One meeting*
- c) Menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan asosiasi atau lembaga terkait
- d) Deputi Bidang Industri dan Investasi melakukan pendampingan perizinan berusaha untuk mendorong kepemilikan perizinan berusaha bagi pelaku usaha sektor pariwisata

Namun dalam proses pencapaian target tersebut terdapat beberapa kendala yang muncul antara lain:

- a) Masih terdapat regulasi yang tumpang tindih di Kementerian/Lembaga/Instansi maupun yang belum mendukung.
- b) Belum ada kepastian regulasi dan dukungan insentif yang khusus mendukung investasi di sektor pariwisata
- c) Masih kurangnya variasi peluang investasi pariwisata yang siap ditawarkan terutama bidang wisata tematik
- d) Pemerintah daerah masih banyak yang belum paham kewenangannya terkait perizinan dan pengawasan pelaku usaha pariwisata.
- e) Selain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Badan Pelaksana Otorita (BPO), pemerintah daerah kurang memahami potensi dan peluang investasi utama di masing-masing daerah.
- f) Terdapat banyak perizinan yang tidak sesuai / salah dari awal perencanaan sehingga saat operasional ditemukan banyak pelanggaran-pelanggaran.
- g) Rendahnya pengawasan perizinan dan belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
- h) Masih rendahnya konektivitas dari dan ke destinasi investasi (belum tersedia penerbangan langsung dan penerbangan internasional).
- i) Belum optimalnya infrastruktur di dalam dan luar kawasan destinasi.
- j) Belum terintegrasinya promosi investasi dan minimnya dokumen investasi yang tersedia.
- k) Perlu adanya insentif tambahan yang berbeda untuk investor yang bergerak di sektor pariwisata karena proses bisnis yang berbeda dengan industri lainnya khususnya dalam mendatangkan wisatawan.
- l) Belum adanya pendampingan satu pintu dari hulu ke hilir untuk membantu calon investor dalam hal perizinan dan pemberian insentif di KEK Pariwisata (peran administrator KEK yang belum optimal dimana proses perizinan dan pemberian

insentif tidak dilakukan secara langsung oleh administrator KEK tetapi masih melibatkan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya).

Langkah-langkah dan strategi yang dapat diambil untuk menjawab tantangan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a) Menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan investasi pariwisata seperti peraturan mengenai kriteria *tax allowance*.
- b) Membuat panduan insentif dan perizinan yang mudah dipahami oleh investor
- c) Melakukan pemetaan berbagai peluang investasi di daerah yang sudah siap dipromosikan.
- d) Promosi investasi yang lebih terpadu dengan berkolaborasi berbagai pihak.
- e) Peningkatan jejaring dan memperluas penyampaian informasi kepada calon potensial investor.
- f) Meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengkonsolidasikan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait regulasi yang menghambat pengembangan investasi pariwisata.
- g) Pembentukan tim satgas lintas Kementerian dan Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap praktik perizinan bersama pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait.
- h) Komitmen seluruh Kementerian/Lembaga dalam mengakselerasi optimalisasi destinasi terkait peluang investasi yang akan dipromosikan.

Untuk mendukung sasaran Meningkatkan Investasi Sektor Pariwisata dengan indikator kinerja Nilai investasi sektor pariwisata di Destinasi Regeneratif dan Destinasi Prioritas, Deputi Bidang Industri dan Investasi memiliki strategi pengembangan investasi yang bersifat sebagai pengungkit yang dapat menjadi penunjang dalam peningkatan jumlah investasi pariwisata, yang meliputi:

a. Penyusunan Strategi Investasi - Konsultasi *Discussion* Revisi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Revisi Peraturan Presiden No. 49/2021 merupakan amanat penataan turunan aturan terkait dari PP 28/2025 yang telah terbit. Konsultasi publik revisi Perpres 49/2021 dilakukan untuk mendapatkan solusi terbaik perlindungan usaha pariwisata lokal melalui pengaturan bidang usaha penanaman modal pariwisata serta tidak menghambat pertumbuhan industri. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025 di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk dan *zoom meeting* (hybrid).

Dalam konsultasi publik ini terdapat 6 bidang usaha yang menjadi fokus pembahasan yaitu:

- 1) Angkutan Laut dalam Negeri untuk Wisata (PP 28/2025 membuka untuk usaha besar, Perpres 49/2021 membatasi komposisi PMA sebesar 49%);
- 2) Hotel Melati (PP 28/2025 membuka untuk usaha besar dan menutup untuk usaha mikro, dalam Perpres 49/2021 dialokasikan untuk koperasi dan UMKM);
- 3) Aktivitas Agen Perjalanan Wisata (PP 28/2025 menutup dari usaha besar, dalam Perpres 49/2021 dialokasikan untuk koperasi dan UMKM);
- 4) Villa (PP 28/2025 menutup untuk usaha besar dan PMA, dalam Perpres 49/2021 dialokasikan untuk koperasi dan UMKM);
- 5) Pondok Wisata (PP 28/2025 menutup untuk usaha besar dan PMA, dalam Perpres 49/2021 dialokasikan untuk koperasi dan UMKM);
- 6) Jasa Pramuwisata (PP 28/2025 menutup untuk usaha besar dan PMA, dalam Perpres 49/2021 dialokasikan untuk koperasi dan UMKM).

Pada sektor angkutan laut wisata, berbagai pihak menilai pembatasan PMA 49% menyulitkan karena mayoritas pasar adalah wisatawan asing. Para pelaku industri menilai PMA memiliki akses pemasaran dan modal lebih kuat untuk meningkatkan standar layanan, namun perlindungan untuk kapal kecil tetap perlu. Isu tumpang tindih regulasi, kebutuhan klasifikasi khusus kapal wisata, serta insentif fiskal seperti

PPNBM juga turut mencuat sebagai penghambat pertumbuhan. Pembahasan hotel melati menekankan bahwa pembukaan untuk PMA harus dibatasi secara tegas, terutama dari sisi nilai investasi minimum dan kelas hotel. Pelaku industri mengusulkan ambang investasi asing minimal Rp100 miliar dan membatasi keterlibatan asing hanya pada segmen hotel berbintang untuk menjaga ruang usaha pelaku UMKM lokal. Sementara itu, pada agen perjalanan wisata, meskipun 90% pelaku adalah UMKM, pelaku industri mengakui bahwa keterlibatan asing dapat meningkatkan profesionalitas. Namun, sektor ini menghadapi tantangan besar dari OTA dan maraknya biro perjalanan ilegal, sehingga diperlukan regulasi khusus yang lebih jelas, termasuk rencana penambahan KBLI baru untuk OTA.

Untuk villa dan pondok wisata, isu utama adalah praktik penyewaan properti oleh WNA yang menciptakan ketimpangan ekonomi dan berpotensi menggeser pelaku lokal. Meskipun beberapa pelaku lokal menyerahkan pengelolaan ke pihak asing sebagai upaya penyelamatan usaha, mayoritas asosiasi menilai sektor ini perlu tetap ditutup bagi PMA karena karakteristiknya yang mikro dan berbasis kepemilikan pribadi. Pada jasa pramuwisata, berbagai asosiasi menyoroti rendahnya pengawasan serta maraknya pemandu ilegal yang merugikan citra pariwisata Indonesia. Mereka menilai bahwa usaha ini tidak tepat dikategorikan berisiko rendah dan membutuhkan pembaruan standar, lisensi, serta penguatan regulasi. Sebagai tindak lanjut, Deputy Bidang Industri dan Investasi akan mengirimkan permintaan data dan survei konfirmasi kepada asosiasi terkait, serta menginventarisasi isu-isu yang membutuhkan pengaturan lanjutan, baik melalui standardisasi usaha maupun penyusunan aturan turunan lainnya.

Melalui forum diskusi ini, diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif, melalui perencanaan yang terarah promosi investasi menjadi lebih efektif, minat investor meningkat, realisasi penanaman modal terdorong, dan pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.



b. Penyusunan Startegi Investasi - *Forum Group Discussion* Revisi Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata yang berdaya saing, termasuk hotel, homestay dan villa, sambil tetap melindungi pelaku lokal. Masukan dari pemangku kepentingan dianggap penting untuk memastikan revisi Perpres tidak berdampak negatif bagi industri, khususnya di Bali yang menerima 55% wisatawan ke Indonesia. Tantangan utama yang diangkat adalah maraknya akomodasi ilegal, pengawasan OTA yang belum berizin, serta angkutan wisata seperti yacht yang belum tertata. Dalam pembahasan mengenai angkutan laut wisata (KBLI 50113), berbagai pihak menyoroti pentingnya batasan PMA 49% untuk melindungi pelaku lokal dan mencegah penyalahgunaan bendera asing, penghindaran pajak, serta ketidakjelasan tata kelola kapal. Pemerintah menilai bahwa FDI tetap dibutuhkan, namun harus disertai perlindungan, pengawasan ketat, regulasi teknis, serta asas keadilan dalam perpajakan dan keselamatan. Investor menekankan perlunya mekanisme bisnis dan pembayaran yang transparan, sementara asosiasi meminta konsistensi kebijakan agar tidak membingungkan pelaku usaha.

Pada sektor villa (KBLI 55193), berbagai persoalan muncul terkait status UMKM, maraknya villa liar, penyalahgunaan izin, serta absennya aturan arsitektur lokal. Para pelaku menilai banyak villa yang secara nilai investasi jauh melampaui definisi UMKM

dan tidak memenuhi standar akomodasi wisata. Pemerintah menyoroti konsentrasi PMA yang tinggi di Bali dan menegaskan perlunya audit perizinan, tata kelola yang lebih ketat, seleksi investasi yang berdampak sosial-lingkungan, dan regulasi yang menjaga identitas budaya Bali. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, terutama dalam sektor real estate dan villa, menjadi isu penting yang harus dibenahi.

Pada pembahasan pondok wisata/homestay (KBLI 55130), asosiasi menolak PMA masuk ke sektor homestay karena dianggap sebagai ruang interaksi budaya yang seharusnya dikelola masyarakat lokal. Pemerintah menyoroti tantangan pembiayaan pelaku homestay dan pentingnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, berbasis budaya, dan mendukung SDGs. Pelaku menegaskan kebutuhan perlindungan UMKM tanpa menutup akses investasi secara total, serta perlunya regulasi yang jelas berdasarkan RIA agar revisi Perpres benar-benar menyelesaikan masalah. Secara keseluruhan, diskusi menekankan perlunya batasan dan pengawasan PMA yang proporsional, regulasi yang berpihak pada UMKM, kejelasan definisi dan kategori usaha, serta tata kelola yang konsisten. Pemerintah diharapkan memastikan pengaturan investasi berjalan seimbang antara kepentingan nasional, keberlanjutan pariwisata, perlindungan budaya, dan daya tarik bagi investor, sambil memperbaiki perizinan, pengawasan, dan sinkronisasi regulasi lintas sektor.



c. Penyusunan Strategi Investasi Lainnya

Telah dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung penyusunan strategi investasi seperti **Rapat Koordinasi Teknis Dinamika Ekonomi Terhadap Investasi Pariwisata** pada tanggal 2 Mei 2025. Kegiatan ini membahas mengenai

analisis dampak dinamika perekonomian global dan domestik terhadap arus investasi di sektor pariwisata Indonesia serta analisis mitigasi risiko dan pemetaan peluang investasi pariwisata dalam menghadapi tantangan makro ekonomi.

Diskusi Kelompok Terpumpun Peran Insentif Fiskal dan Non Fiskal Terhadap Peningkatan Investasi Pariwisata di Indonesia pada tanggal 27 Mei 2025. Pada kegiatan ini Pemerintah menilai insentif fiskal dan non-fiskal menjadi kunci percepatan investasi menuju target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, namun pemanfaatannya di sektor pariwisata masih rendah akibat minimnya sosialisasi, kompleksitas prosedur, dan berbagai kendala implementasi, termasuk isu HGB di KEK dan maraknya usaha ilegal. BKPM dan DJP menegaskan pentingnya penyederhanaan alur OSS, kepastian regulasi, serta penyesuaian insentif agar lebih mudah diakses, terutama bagi usaha menengah, sementara pelaku usaha menyoroti beban pajak, perubahan aturan daerah, tingginya biaya transportasi, serta dampak pembangunan terhadap UMKM. Secara keseluruhan, diskusi menyimpulkan perlunya penguatan informasi, perbaikan mekanisme fasilitas, penegakan ketertiban usaha, serta kebijakan investasi pariwisata yang lebih selektif dan berorientasi pada *quality tourism*, khususnya di Bali.

Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Program Peningkatan Investasi Pariwisata di 10 DPP dan 3 DR pada tanggal 5 November 2025. Pada kegiatan ini Kementerian Pariwisata dan Bank Indonesia sepakat pentingnya memperkuat investor mapping, event mapping, serta interest mapping agar promosi lebih tepat sasaran. Kendala yang ada saat ini adalah koordinasi di daerah, terutama antara Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal yang menjadi perhatian utama, termasuk perlunya keterlibatan langsung kepala daerah untuk menjamin komitmen proyek. Keduanya melihat banyak peluang program bersama, baik diantara instansi maupun lintas kementerian, untuk memperkuat ekosistem investasi pariwisata nasional.

Rapat Koordinasi Teknis Sinkronisasi Strategi Peningkatan Kesiapan Investasi dan Destinasi pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dan 3 Destinasi Pariwisata

Regeneratif pada tanggal 26-27 November 2025. Pembahasan lintas daerah dan kementerian menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penyesuaian target, penguatan SDM dan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, serta diversifikasi produk wisata untuk mendorong pemerataan investasi dan percepatan pencapaian RPJMN 2025–2029.



d. Promosi Investasi Pariwisata

1. *World Expo 2025* di Osaka Jepang

Kementerian Pariwisata melalui Deputy Bidang Industri dan Investasi melaksanakan rangkaian kegiatan di Osaka dan Tokyo pada 1–4 Juni 2025 sebagai bagian dari partisipasi di *World Expo Osaka 2025*. Kegiatan utama adalah *Indonesia Tourism Investment and Business Forum* yang digelar pada 3 Juni 2025 dengan tema *Health and Wellness Tourism* dan dihadiri 68 peserta dari berbagai lembaga Jepang dan Indonesia. Forum menampilkan sambutan pejabat, pemaparan peluang investasi pariwisata Indonesia, serta presentasi proyek health & wellness oleh beberapa perusahaan Indonesia. Sesi business meeting menghasilkan minat konkret dari sejumlah perusahaan Jepang untuk menjajaki kerja sama, mulai dari pengembangan fasilitas kesehatan, franchise spa, pelatihan terapis, hingga rencana site visit investasi senior living.

Selain forum investasi, Kementerian Pariwisata juga berkolaborasi dengan Mustika Ratu dalam workshop spa bertema Javanese Massage di Paviliun Indonesia pada 1–2 Juni 2025. Workshop ini menarik sekitar 35 peserta per hari dan memberikan demonstrasi pijat serta spa tradisional Indonesia sebagai bagian dari promosi *wellness tourism*. Sejumlah peserta menyampaikan minat terhadap peluang pembukaan spa serta kerja sama produk wellness di Jepang dan Suriname.

Di Tokyo, delegasi Indonesia mengadakan *business meeting* dengan Medical Excellence Japan (MEJ) pada 4 Juni 2025, dihadiri berbagai pihak dari pemerintah Jepang, asosiasi kesehatan, dan perusahaan medis. Pertemuan membahas peluang kolaborasi untuk pengembangan investasi wisata kesehatan, termasuk penghubungan proyek Indonesia dengan jaringan perusahaan anggota MEJ, pengembangan pengalaman wellness, serta rencana co-creation dalam desain lifestyle wisata kesehatan masa depan. MEJ mengusulkan penyelenggaraan seminar hybrid di Jakarta, sementara Kementerian Pariwisata menilai perlunya koordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta reaktivasi MoU terkait wisata kesehatan.

Tindak lanjut dari seluruh rangkaian kegiatan mencakup fasilitasi pertemuan lanjutan antara perusahaan Indonesia dan calon investor Jepang, penyampaian hasil pertemuan MEJ kepada Kementerian Kesehatan, serta dorongan percepatan penandatanganan kembali MoU antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan guna memperkuat pengembangan *Health and Wellness Tourism* di Indonesia.



2. *Tourism Investment Meeting di Seoul*

Penyelenggaraan Tourism Investment Meeting pada 8 September 2025 di Seoul bertujuan memperkenalkan peluang investasi pariwisata Indonesia serta memperkuat kerja sama dengan Republik Korea. Kegiatan ini menghadirkan enam pemilik proyek dari Indonesia yang menawarkan peluang investasi di sektor hospitality, kesehatan, dan wellness. Dari sisi Korea, hadir 32 calon investor dari 20 perusahaan lintas sektor. Acara dibuka oleh Menteri Pariwisata yang menekankan peluang besar investasi pariwisata berkelanjutan, wellness tourism, dan ekowisata di Indonesia. Perwakilan Kementerian Kesehatan juga menyampaikan informasi mengenai peluang dan regulasi investasi di sektor kesehatan.

Kegiatan dilanjutkan dengan presentasi proyek dan sesi networking, menghasilkan sejumlah minat investasi baru. Di antaranya, ketertarikan Daewoong Pharma terhadap lot H6 KEK Sanur; minat SONO International, DAOL Asset Management, RAD Mac, dan Hotel Lotte terhadap proyek La Mariposa; diskusi Teta Derma Estika dengan JK Medical Group dan Atop Company; serta rencana partisipasi Daewoong Development dalam iSWAM Congress. Selain itu, Hotel Lotte juga menunjukkan minat pada proyek InJourney Destination Management, sementara Atop Company meminta informasi lebih lanjut terkait prosedur perizinan tenaga medis asing.

Di luar acara utama, Menteri Pariwisata melakukan pertemuan strategis dengan beberapa mitra Korea. Dalam high-level meeting dengan CEO Lotte Hotel, Lotte menyampaikan minat besar untuk memperluas investasi sektor perhotelan di Indonesia, namun membutuhkan data pasar yang lebih komprehensif. Kementerian Pariwisata, KBRI Seoul, dan IIPC berkomitmen memfasilitasi tindak lanjut, termasuk mempertemukan Lotte dengan mitra potensial seperti InJourney. Pertemuan lanjutan antara PT TWCBP dan Hotel Lotte juga telah berlangsung.

Pada luncheon meeting dengan Chairman SK Securities, dibahas peluang kerja sama investasi pada sektor pariwisata, infrastruktur, dan pembiayaan hijau. SK Securities menyampaikan kesiapan mendukung proyek strategis termasuk pengembangan

lahan KBRI, pembiayaan ramah lingkungan melalui Green Finance Center, serta peluang kerja sama dalam proyek transportasi massal dan waste-to-energy. Selain itu, dibahas peluang investasi pendidikan terkait meningkatnya minat warga Korea untuk menyekolahkan anak di sekolah internasional Indonesia. Sejumlah tindak lanjut diusulkan, antara lain eksplorasi pembiayaan GFC, dukungan climate mitigation, potensi kerja sama pendidikan, dan investasi perhotelan.



3. *Tourism Investment Meeting di Beijing*

Kegiatan *Wonderful Indonesia Investment Meeting* Beijing pada 10 September 2025 di Four Seasons Beijing dihadiri lebih dari 50 peserta, termasuk pejabat tinggi Indonesia, enam pemilik proyek dari sektor pariwisata dan kesehatan, serta 20 perusahaan calon investor asal Tiongkok. Para pemilik proyek mempromosikan tujuh peluang investasi, mulai dari wellness tourism, pengembangan kawasan KEK Sanur, hingga proyek bandara dan destinasi budaya. Para peserta dari Tiongkok berasal dari sektor hospitality, transportasi, kesehatan, konstruksi, hingga media. Pemaparan peluang investasi mendapat sambutan positif dari investor Tiongkok, yang menunjukkan ketertarikan melalui berbagai pertanyaan terkait skema pengelolaan, pola kerja sama, dan potensi nilai investasi. Antusiasme berlanjut pada sesi one-on-one meeting, menghasilkan sejumlah potensi kerja sama signifikan. Malang Health Tourism Board berdiskusi dengan WestVac Biopharma mengenai rencana pengembangan pusat perawatan lansia di Malang. PT Perdesti Global Medicom menjajaki kerja sama dengan beberapa perusahaan, termasuk joint venture

bernilai hingga USD 50 juta untuk pengembangan wisata kesehatan. SMT menjalin komunikasi dengan berbagai perusahaan Tiongkok dengan potensi investasi sekitar Rp 630 miliar, sementara PT TWC Borobudur–Prambanan mendiskusikan kerja sama promosi budaya dan investasi wisata berbasis Buddhism.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan *Letter of Intent* antara Mayapada Group dan *Bioeconomy Committee of China Asia Economic Development Association* untuk kerja sama investasi kesehatan dan kebugaran senilai sekitar USD 10 juta. Selain itu, beberapa perusahaan Tiongkok seperti CTRIP menyampaikan minat berinvestasi pada pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia, yang akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Deputy Bidang Industri dan Investasi.



4. Pembuatan Bahan Promosi Investasi Pariwisata

Selaras dengan visi pembangunan kepariwisataan dalam Perpres No. 50 Tahun 2011, industri pariwisata memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan destinasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Deputy Bidang Industri dan Investasi berperan strategis dalam meningkatkan realisasi investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja, devisa negara, serta *multiplier effect* bagi masyarakat. Namun, rendahnya realisasi investasi asing menunjukkan perlunya peningkatan promosi dan penyediaan informasi yang lebih meyakinkan bagi investor global.

Untuk mendukung pencapaian target investasi pariwisata, Deputy Bidang Industri dan Investasi berkomitmen memperkuat promosi investasi secara terencana, baik di

dalam maupun luar negeri. Salah satu langkah strategis adalah penyusunan bahan promosi investasi, termasuk pembuatan video promosi, pengambilan gambar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, dan penyuntingan materi visual agar lebih menarik bagi investor. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat investor asing, memperluas jaringan kemitraan, menampilkan peluang investasi potensial, serta meningkatkan awareness seluruh pemangku kepentingan terhadap proyek strategis di sektor pariwisata.

Ruang lingkup kegiatan meliputi persiapan data dan koordinasi dengan KEK serta Badan Otorita, penyusunan storyboard, pengumpulan dan pengambilan gambar, pengisian suara Menteri Pariwisata, hingga proses penyuntingan akhir. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan metode swakelola dan kontraktual. Manfaat kegiatan ini diharapkan dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata, investor, serta pengelola kawasan pariwisata sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem investasi pariwisata Indonesia.



5. Kegiatan Promosi Investasi Lainnya

Deputi Bidang Industri dan Investasi juga telah mengadakan kegiatan-kegiatan promosi lainnya yaitu Investment Dialogue 2025 di Puri Santrian Bali pada tanggal 17 Juli 2025 dan Dialogue Bali Foreign Investor Association pada tanggal 2 Oktober 2025 dihadiri oleh 16 Pengusaha. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan iklim investasi pariwisata melalui perbaikan regulasi, kebijakan

inklusif dan berkelanjutan, pembentukan asosiasi investor asing, serta penguatan koordinasi pemerintah dan investor.

Hasil dari kegiatan ini adalah Bali Foreign Investor Associations (BFIA) perlu memperkuat proposal dan melakukan konsolidasi lintas K/L (Kemenpar, Kementerian Investasi/BKPM, Kemenko Ekon, Kementerian Imigrasi, GIPI, BI) untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah bersama sebelum peresmian dan pengakuan BFIA oleh Pemerintah RI.



Melalui seluruh rangkaian kegiatan promosi investasi pariwisata yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, harapannya dapat memberikan manfaat penting dalam meningkatkan nilai investasi pariwisata karena berfungsi memperkenalkan potensi, peluang dan daya tarik destinasi pariwisata kepada calon investor secara luas dan terarah. Promosi investasi juga memperluas jejaring kemitraan, mempercepat proses pengambilan keputusan investasi, serta mendorong realisasi penanaman modal di sektor pariwisata, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi.

e. Pendampingan dan Advokasi Investasi

1. Pendampingan Literasi Perizinan Berusaha melalui OSS Berbasis Risiko

Investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di sektor pariwisata yang memiliki multiplier effect tinggi. Pariwisata memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan sumber daya alam dan

kreativitas, sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, penciptaan citra bangsa, peningkatan daya saing, serta dampak sosial positif. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, dibutuhkan investasi yang mampu menggerakkan kegiatan ekonomi lain dan membuka lapangan kerja secara lebih luas.

Dalam rangka mempermudah kegiatan berusaha dan investasi, pemerintah menerbitkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta PP Nomor 28 Tahun 2025 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kebijakan ini menyederhanakan proses perizinan dengan mewajibkan seluruh layanan dilakukan melalui sistem OSS berbasis risiko. Sistem ini terintegrasi dengan berbagai basis data nasional seperti kependudukan, perpajakan, AHU Online, keimigrasian, BPJS Ketenagakerjaan, dan tata ruang, sehingga pelaku usaha tidak perlu mengurus izin ke berbagai instansi secara terpisah. Meski demikian, masih banyak pelaku usaha pariwisata yang belum mengetahui kemudahan ini dan belum memiliki legalitas usaha sesuai ketentuan.

Melihat kondisi tersebut, kegiatan Fasilitasi Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata melalui OSS dirancang untuk membantu pelaku usaha dalam memahami proses perizinan. Tujuan utamanya adalah memberikan pendampingan langsung, meningkatkan pemahaman pentingnya legalitas, serta mendorong pelaku usaha dan calon pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS berbasis risiko.

Ruang lingkup kegiatan ini sangat relevan karena masih banyak pelaku usaha maupun calon investor pariwisata yang belum memahami mekanisme pendaftaran perizinan dalam sistem OSS versi terbaru sesuai PP 28/2025. Melalui kegiatan pendampingan ini, peserta dibekali pengetahuan dasar yang diperlukan sebelum memulai usaha di sektor pariwisata. Penerima manfaatnya meliputi para pelaku usaha pariwisata, calon investor, serta pemerintah pusat dan daerah yang berkepentingan dalam penguatan ekosistem perizinan dan investasi pariwisata.

Sebanyak **65 Badan Usaha** telah melakukan pendampingan yang telah dilakukan pada kegiatan berikut:

- 1) Fasilitasi Pendampingan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (untuk akomodasi alternatif yang telah dipetakan) - Bali
- 2) Kegiatan Literasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata melalui *Online Single Submission* Berbasis Risiko di Kota Cilacap, Jakarta, dan Medan



Melalui kegiatan pendampingan dan advokasi investasi, investor didukung dalam pemenuhan perizinan dan penyelesaian kendala teknis maupun administratif, serta memastikan adanya kepastian regulasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Dengan berkurangnya hambatan dan risiko investasi, kepercayaan investor meningkat, realisasi proyek pariwisata dapat dipercepat, dan pada akhirnya mendorong peningkatan nilai investasi serta pengembangan sektor pariwisata.

2. Advokasi Rencana Investasi

Pelaksanaan kegiatan Advokasi Peningkatan Realisasi Investasi Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan realisasi investasi di sektor pariwisata yang dilakukan melalui berbagai cara, seperti memperkuat regulasi yang mendukung, memberikan insentif menarik bagi investor, dan meningkatkan promosi potensi investasi pariwisata Indonesia. Selain itu fokus Pemerintah saat ini dalam pengembangan sektor pariwisata pada 10 destinasi pariwisata prioritas dan 3 destinasi pariwisata regeneratif. Namun masih banyak potensi-potensi di daerah lainnya yang juga layak untuk dijadikan prioritas pengembangan salah satunya melalui penetapan Kawasan

Ekonomi Khusus yang diharapkan menjadi lokomotif dalam menggerakkan ekonomi regional. Kegiatan advokasi rencana investasi yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Rapat Advokasi Progress KEK Pariwisata (**14 Badan usaha**)
- 2) Rapat Advokasi rencana investasi (**4 badan usaha**)
- 3) Pengawasan dan kegiatan lainnya (**68 badan usaha**)



f. Transformasi Usaha Pariwisata Berkelanjutan

1. Pendampingan Kemitraan dan Insentif Pariwisata Berkelanjutan

Forum Jejaring Usaha Pariwisata Berkelanjutan

Forum Jejaring Usaha Pariwisata Berkelanjutan dilaksanakan pada Kamis, 15 Mei 2025, bertempat di Harris Vertue Harmoni Hotel, Jakarta, pukul 09.00–16.00 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya strategis Kementerian Pariwisata untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab. Forum dihadiri secara hybrid oleh sekitar 65 peserta luring dan 102 peserta daring, yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi industri pariwisata, NGO, kawasan ekonomi khusus pariwisata, industri pengelolaan sampah dan energi terbarukan, konsultan, lembaga pembiayaan dan ventura, serta akademisi dari berbagai politeknik pariwisata.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Asisten Deputy Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan dan pembukaan oleh Deputy Bidang Industri dan Investasi, dilanjutkan dengan dua sesi diskusi panel. Sesi pertama membahas

sinergi pemerintah dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan sebagai pilar pembangunan nasional, dengan penekanan pada urgensi penerapan prinsip keberlanjutan mengingat tingginya kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim. Diskusi menyoroti peran strategis sektor pariwisata dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional melalui pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, termasuk penguatan tata kelola, rantai pasok, pengembangan SDM, penerapan ekonomi sirkular, infrastruktur hijau, diversifikasi produk pariwisata, serta penguatan kebijakan dan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah.

Sesi kedua membahas kolaborasi pembiayaan hijau untuk akselerasi transformasi industri pariwisata, dengan fokus pada peran *green financing* dalam mendukung proyek dan inisiatif pariwisata berkelanjutan. Dalam diskusi ini disampaikan berbagai tantangan pembiayaan yang dihadapi pelaku usaha pariwisata, khususnya UMKM, serta pentingnya pengembangan skema pendanaan yang lebih fleksibel, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik usaha pariwisata. Forum juga menegaskan peran Kementerian Pariwisata sebagai *hub* sinkronisasi untuk mengkoordinasikan berbagai sumber pembiayaan, termasuk peran BPD LH, pendanaan donor, dana bergulir, dan instrumen pembiayaan hijau lainnya guna mendukung transformasi industri pariwisata berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, forum ini menegaskan bahwa pariwisata memiliki potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan berkelanjutan, serta membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum jejaring usaha pariwisata berkelanjutan menjadi wadah strategis dalam membangun kolaborasi lintas sektor, merumuskan arah kebijakan, serta mendorong implementasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Tindak lanjut dari kegiatan ini mencakup penyusunan rencana aksi pengembangan *green financing* dari aspek

regulasi dan implementasi, serta pemetaan sumber-sumber pendanaan dalam ekosistem transformasi industri pariwisata berkelanjutan.



2. Fasilitasi Usaha Pariwisata Berkelanjutan

3) Literasi Pengelolaan Sampah pada Industri Pariwisata dalam mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Blora

Kegiatan telah dilaksanakan pada hari Jumat, 25 April 2025, pukul 07.30–14.00 WIB, bertempat di Aula C Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

Kegiatan literasi ini diikuti oleh sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pelaku usaha pariwisata yang terdiri atas pengelola daya tarik wisata kampung tematik, hotel, restoran, dan kafe (HOREKA) binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Blora. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku industri pariwisata mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dengan mendorong agar sampah tidak seluruhnya dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), melainkan dikelola terlebih dahulu di tingkat usaha, sehingga hanya residu sampah yang tidak dapat diolah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Di tengah kondisi perekonomian global yang bergejolak, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Melalui kegiatan literasi ini, diharapkan pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Blora memperoleh wawasan dan peluang baru dalam pengelolaan sampah yang bernilai tambah dan ramah lingkungan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Blora menyampaikan harapan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan memperoleh pengetahuan yang aplikatif terkait pengelolaan sampah. Meskipun Kabupaten Blora saat ini belum berada dalam kondisi darurat sampah, Pemerintah Daerah menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di sektor pariwisata.

Materi utama disampaikan oleh perwakilan Kementerian Pariwisata yang menekankan perlunya perubahan pendekatan pengelolaan sampah dari pola *kumpul–angkut–buang* menjadi pengelolaan mandiri oleh industri pariwisata. Pengelolaan sampah diarahkan pada pemilahan sampah organik yang dapat diolah menjadi maggot, sampah anorganik yang dapat didaur ulang, serta pengolahan lainnya sebelum residu akhir dibuang ke TPA. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengelolaan sampah di tingkat daerah serta mencegah timbulnya permasalahan lingkungan di masa mendatang.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai kesadaran pariwisata dan psikologi pelayanan bagi pemandu wisata dalam pengelolaan sampah. Materi tersebut menekankan pentingnya kesadaran wisata sebagai bagian dari upaya menciptakan iklim pariwisata yang kondusif, selaras dengan nilai-nilai Sapta Pesona, khususnya dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Selain itu, pemandu wisata diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada wisatawan melalui penyampaian *do's and don'ts*, panduan, serta edukasi literasi pengelolaan sampah. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber untuk menggali lebih lanjut penerapan pengelolaan sampah berkelanjutan di sektor pariwisata Kabupaten Blora.



4) **Pelatihan Desa Wisata & Pokdarwis Literasi Ekonomi Sirkular di Kabupaten Blora**

Dalam rangka mendukung penguatan pariwisata berkelanjutan berbasis desa, Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Industri dan Investasi melaksanakan kegiatan *Pelatihan Desa Wisata dan Pokdarwis Literasi Ekonomi Sirkular pada Industri Pariwisata dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan* di Kabupaten Blora pada Kamis, 15 Mei 2025, bertempat di Aula C Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi pelaku desa wisata terhadap konsep ekonomi sirkular sebagai pendekatan dalam memperpanjang siklus hidup produk dan sumber daya keanekaragaman hayati, sekaligus mengurangi limbah dan polusi. Konsep ekonomi sirkular diperkenalkan sebagai strategi yang dapat diimplementasikan secara kontekstual sesuai dengan kearifan lokal masing-masing desa wisata di Kabupaten Blora, sehingga mampu mendukung penciptaan industri pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 75 perwakilan pokdarwis dan pelaku usaha desa wisata binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Blora. Desa wisata dipandang memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis masyarakat. Literasi ekonomi sirkular dinilai tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing desa wisata. Ekonomi sirkular merupakan pendekatan penting dalam mendorong industri pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin dalam sistem ekonomi. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat

meminimalkan dampak kerusakan lingkungan dan sosial, sekaligus mendukung peningkatan daya saing pariwisata serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam konteks desa wisata, ekonomi sirkular dipandang sebagai upaya kembali pada akar kearifan lokal, karena pada dasarnya masyarakat desa telah memiliki nilai-nilai luhur dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Berbagai contoh penerapan ekonomi sirkular di desa wisata, antara lain pengelolaan dan daur ulang sampah menjadi produk bernilai, penggunaan produk souvenir tanpa plastik, pemanfaatan bahan lokal untuk kuliner khas, serta pengembangan aktivitas wisata yang berkontribusi pada pemulihan lingkungan. Penerapan ekonomi sirkular diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan, menarik minat wisatawan yang berorientasi pada wisata alam, mendukung keberlanjutan jangka panjang, serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.

Peningkatan pemahaman dan praktik pengelolaan sampah yang baik oleh pelaku usaha pariwisata menurunkan risiko lingkungan, meningkatkan kualitas destinasi, serta memperkuat citra pariwisata berkelanjutan. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan dan minat investor, memperbaiki kelayakan proyek pariwisata, dan pada akhirnya mendorong realisasi serta peningkatan nilai investasi di sektor pariwisata.



3. *Wonderful Indonesia Award* – Kategori Sustainable Hotel

6) *Kick Off* dan Sosialisasi

Dalam rangka memperkuat implementasi pariwisata berkelanjutan pada sektor perhotelan, Kementerian Pariwisata melaksanakan kegiatan *Kick Off* dan Sosialisasi *Wonderful Indonesia Award* (WIA) 2025 Kategori *Sustainable Hotel* pada 29 September 2025 di Fairfield by Marriott Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, asosiasi perhotelan, serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk mendorong penerapan prinsip keberlanjutan di industri perhotelan melalui peningkatan efisiensi energi dan air, pengelolaan sampah dan limbah, serta pengurangan *food loss* dan *food waste* sebagai kontribusi sektor pariwisata terhadap pengendalian perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan *Wonderful Indonesia Award* kategori Sustainable Hotel, pemerintah menegaskan bahwa ajang ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai instrumen percepatan implementasi prinsip *Blue, Green, and Circular Economy* (BGCE) dalam pembangunan pariwisata nasional. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku usaha perhotelan, khususnya hotel bintang tiga yang mayoritas dikelola oleh UMKM, agar lebih siap dalam menerapkan standar green hotel secara bertahap. Selain mendorong peningkatan kinerja lingkungan, WIA juga memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha berupa efisiensi biaya operasional, peningkatan reputasi usaha, perluasan akses promosi melalui pameran pariwisata, serta peluang nominasi pada ajang ASEAN Green Hotel Award guna memperkuat daya saing perhotelan Indonesia di tingkat regional dan internasional.

Dalam kegiatan ini juga disampaikan pentingnya penyelarasan antara kebijakan Kementerian Pariwisata dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ditekankan bahwa implementasi program lingkungan tidak dilakukan dalam pendekatan saling menyalahkan, melainkan melalui penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor. Pengelolaan lingkungan di sektor perhotelan membutuhkan dukungan berbagai instansi pemerintah, mengingat aspek lingkungan bersifat lintas sektor, termasuk energi, pengelolaan limbah, dan tata kelola daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi indikator Green Hotel Award dengan indikator PROPER agar tidak terjadi perbedaan standar penilaian yang berpotensi menimbulkan praktik *green washing*. Pendampingan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan peningkatan pemahaman pemerintah daerah terhadap PROPER menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi program ini di lapangan.

Selain itu, kegiatan ini menegaskan bahwa pengembangan *green hotel* harus memperhatikan tantangan global yang memengaruhi sektor pariwisata, seperti perubahan iklim, krisis geopolitik, serta dinamika ekonomi global. Penerapan prinsip keberlanjutan dipandang sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar tren, mengingat sebagian besar wisatawan global semakin mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam memilih akomodasi. Hotel yang menerapkan prinsip *green hotel* dinilai memiliki keunggulan kompetitif melalui penurunan jejak karbon, efisiensi sumber daya, penguatan keterlibatan komunitas lokal, serta peningkatan transparansi dan tata kelola usaha. Penerapan prinsip tersebut juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, antara lain melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, penguatan peran UMKM dalam rantai pasok, pengurangan emisi karbon, dan berkurangnya timbulan sampah.

Secara keseluruhan, *Kick Off* dan Sosialisasi *Wonderful Indonesia Award 2025* Kategori Sustainable Hotel menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam industri

pariwisata. Melalui kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan, WIA diharapkan mampu menjadi katalis dalam mendorong transformasi industri perhotelan yang lebih ramah lingkungan, berdaya saing, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan pariwisata nasional yang berkualitas dan berkelanjutan.

- 7) Kurasi
- 8) Verifikasi Lapangan
- 9) Pleno
- 10) Awarding Night



4. Strategic Dialogue Pengelolaan Sampah dan *Food Loss and Waste* (FLW)

11) *Strategic Dialogue* Pengelolaan Sampah dan FLW Labuan Bajo

Kegiatan *Strategic Dialogue* Pengelolaan Sampah dan FLW di Labuan Bajo dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan pusat dan daerah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta mitra pembangunan. Dialog ini menyoroti tantangan utama pengelolaan sampah dan FLW seiring pesatnya pertumbuhan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas dan premium. Peningkatan kunjungan wisatawan yang telah melampaui jumlah penduduk setempat menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan, terutama di sektor perhotelan, kapal wisata (liveaboard), dan kawasan pesisir. Isu utama yang mengemuka meliputi keterbatasan kapasitas TPA, rendahnya pemilahan sampah

di sumber, tingginya timbulan sampah organik dari sektor horeka dan kapal wisata, serta lemahnya koordinasi dan penegakan regulasi.

Pentingnya pergeseran paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul–angkut–buang menuju pendekatan pengelolaan mandiri di sumber melalui TPS3R, biocomposting, pemanfaatan food surplus, serta penguatan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Praktik baik dari sektor swasta, seperti hotel dan operator wisata yang telah melakukan pemilahan, carry back policy, dan kerja sama dengan vendor pengolah sampah, dipandang perlu direplikasi dengan dukungan regulasi, insentif, dan pengawasan yang lebih kuat. Selain itu, penguatan rantai pasok pangan lokal, pencatatan dan audit timbulan sampah, serta penerapan reward and punishment dinilai krusial untuk menekan dampak lingkungan dan menjaga citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata berkualitas dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan site visit ke Hotel Ta’aktana dan LOB Aruna Odyssey untuk melihat langsung implementasi praktik keberlanjutan. Hotel Ta’aktana menunjukkan penerapan pengelolaan sampah dan FLW yang terintegrasi, efisiensi perencanaan pangan, pemanfaatan bahan baku lokal, serta pelaporan lingkungan melalui sistem internal. Sementara itu, Aruna Odyssey telah menerapkan pemilahan sampah dasar dan kebijakan membawa kembali sampah ke darat sesuai ketentuan internasional (MARPOL), meskipun masih diperlukan penguatan jejaring pengolahan lanjutan dan penghitungan emisi karbon. Hasil dialog dan kunjungan ini menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor, dukungan kebijakan, serta penguatan kapasitas daerah agar pengelolaan sampah dan FLW dapat menjadi fondasi utama pariwisata Labuan Bajo yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



12) *Strategic Dialogue* Pengelolaan Sampah dan FLW Batam

Strategic Dialogue Tata Kelola Usaha Pariwisata Berkelanjutan di Destinasi Regeneratif Batam telah dilaksanakan pada 3 Oktober 2025 di Artotel Batam dengan melibatkan Kementerian Pariwisata, Kemenko Bidang Perekonomian, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, asosiasi usaha, akademisi, komunitas, NGO, serta pelaku usaha pariwisata. Dialog ini bertujuan memperkuat sinergi multipihak dalam mendorong transformasi tata kelola usaha pariwisata berkelanjutan menuju pendekatan pariwisata regeneratif, khususnya di Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi prioritas nasional. Kegiatan ini menegaskan peran strategis sektor pariwisata dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional, antara lain kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,9–5 persen, devisa USD 32–39 miliar, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

Dialog menyoroti tantangan utama pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Batam, khususnya tingginya timbulan sampah dan *food loss and waste* (FLW) yang berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca serta tekanan lingkungan. Sektor pariwisata diidentifikasi sebagai salah satu penyumbang sampah harian yang perlu ditangani melalui pendekatan hulu–hilir, perubahan perilaku pelaku usaha dan wisatawan, serta penguatan kebijakan daerah. Pemerintah Kota Batam melalui program *Hospitality Goes Green* mendorong industri pariwisata menerapkan praktik ramah lingkungan, efisiensi energi dan air, pengelolaan sampah, serta pengurangan limbah makanan, yang terbukti tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan tetapi juga meningkatkan daya saing usaha dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam perspektif pariwisata regeneratif, dialog menegaskan pentingnya pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai inti pembangunan destinasi. Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip dipandang memiliki potensi kuat sebagai model *blue economy* berbasis konservasi mangrove,

ekowisata, dan ekonomi kreatif masyarakat pesisir. Mangrove diposisikan sebagai aset karbon biru strategis yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim sekaligus sumber nilai ekonomi baru melalui ekowisata dan produk turunan bernilai tambah. Namun demikian, tantangan berupa polusi sampah laut lintas batas, keterbatasan akses permodalan, serta lemahnya kepastian legalitas kawasan masih menjadi hambatan utama pengembangan destinasi berbasis komunitas.

Hasil diskusi menegaskan perlunya tindak lanjut konkret berupa penguatan sinergi multipihak dan dukungan regulasi yang berpihak pada keberlanjutan. Pemerintah daerah mendorong percepatan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis destinasi regeneratif, sementara Kementerian Pariwisata diusulkan untuk mengembangkan sertifikasi *Green Hotel* berstandar nasional sebagai instrumen transformasi usaha pariwisata. Selain itu, perlindungan dan pengembangan Desa Wisata Bakau Serip sebagai *pilot project* resmi dipandang strategis untuk memperkuat model pariwisata regeneratif di Kepulauan Riau. Dukungan BP Batam melalui penyediaan infrastruktur hijau, pemanfaatan aset alam dan budaya, serta penguatan kawasan konservasi laut menjadi faktor kunci dalam membangun ekosistem pariwisata yang inklusif, rendah karbon, dan berdaya saing global.



13) *Strategic Dialogue* Pengelolaan Sampah dan FLW Semarang

Rapat Koordinasi Usaha Pariwisata Berkelanjutan dengan tema “Transformasi Usaha Pariwisata menuju Sektor Pariwisata Rendah Karbon” telah dilaksanakan

pada 31 Juli 2025 di Hotel Patra Semarang & Convention. Kegiatan ini melibatkan perwakilan Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah provinsi dan kota, asosiasi usaha pariwisata, pelaku industri, start-up pengelolaan sampah, serta akademisi. Rapat bertujuan untuk menghimpun masukan dari pemangku kepentingan daerah terkait tantangan dan praktik pengelolaan lingkungan di sektor pariwisata, khususnya pengelolaan sampah, *food loss and waste* (FLW), serta upaya penurunan emisi karbon. Diskusi menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pariwisata rendah karbon sejalan dengan agenda global pengendalian perubahan iklim dan hasil COP26 Glasgow, serta mendorong peningkatan kinerja kepatuhan lingkungan sektor pariwisata yang tercermin dalam penilaian PROPER.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa tantangan utama pengembangan usaha pariwisata berkelanjutan di Jawa Tengah dan Kota Semarang meliputi tingginya timbulan sampah dari sektor hotel, restoran, dan desa wisata, keterbatasan kapasitas pengelolaan di tingkat usaha, belum optimalnya pemanfaatan surplus makanan akibat ketiadaan payung hukum yang jelas, serta tingginya biaya pengelolaan sampah melalui pihak ketiga. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai inisiatif, antara lain pembentukan satgas sampah, penerapan roadmap pengelolaan sampah hulu-hilir, pengembangan ekonomi sirkular di desa, serta gerakan penyelamatan pangan. Namun demikian, diperlukan penguatan sinergi lintas sektor, kebijakan yang lebih tegas, kampanye edukatif kepada pelaku usaha dan wisatawan, serta insentif bagi pelaku usaha yang telah menerapkan praktik berkelanjutan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, dilakukan *site visit* ke Hotel Patrajasa Semarang dan Desa Wisata Lerep untuk melihat praktik terbaik pengelolaan usaha pariwisata berkelanjutan. Hotel Patrajasa menunjukkan penerapan pengolahan air limbah mandiri melalui IPAL, pemilahan sampah, serta pengendalian *food overproduction* di dapur. Sementara itu, Desa Wisata Lerep

menampilkan pengelolaan pariwisata berbasis edukasi dan ekologi melalui TPS3R, bank sampah, serta penghijauan yang mendukung konsep pariwisata berkelanjutan. Rapat ini menegaskan pentingnya pengembangan *Online Single Portal* (OSP) Dekarbonisasi sebagai wadah penghitungan emisi karbon usaha pariwisata sekaligus instrumen insentif untuk mendorong transformasi menuju sektor pariwisata yang rendah karbon, inklusif, dan berdaya saing.



3. Meningkatnya Kualitas Governansi Deputy Bidang Industri dan Investasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (Juta Rp)	Realisasi ³	Capaian (%)
3	Meningkatnya Kualitas Governans Deputy Bidang Industri dan Investasi	Indeks Kualitas Governans Pada Deputy Bidang Industri dan Investasi (nilai)	78,6	89,87	114,34%

³Data sementara, masih terdapat komponen yang belum ada nilainya

Indeks Kualitas Governans (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang mencerminkan efektivitas, akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta kapasitas institusi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Indikator Meningkatnya Kualitas Governansi Deputy Bidang Industri dan Investasi diperoleh melalui formula/cara hitung sebagai berikut:

Nilai Indeks Kualitas Governans dihitung dengan pembagian 3 (tiga) komponen aktivitas Kedeputian Bidang Industri dan Investasi, antara lain:

- Nilai SAKIP dengan bobot nilai 40
- NKA dengan bobot nilai 20
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan bobot nilai 40

Dihitung dengan rumus: $(40 \times A/100) + (20 \times B/100) + (40 \times C/100)$

Keterangan:

A = Nilai SAKIP Kedeputian

B = NKA Kedeputian

C = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada Kedeputian

Meningkatnya Kualitas Governans Deputy Bidang Industri dan Investasi merupakan pendukung sasaran strategis 2 yaitu “Meningkatnya kualitas governans kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur”.

Realisasi sasaran Meningkatkan Kualitas Governans Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025 dengan indikator Nilai Indeks Kualitas Governans Pada Deputy Bidang Industri dan Investasi adalah 89,87. Untuk mendukung sasaran Meningkatkan Kualitas Governans Deputy Bidang Industri dan Investasi, Deputy Bidang Industri dan Investasi melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

a. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual Indikator Kinerja Utama Sekretariat Deputy Bidang Industri dan Investasi

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan telah diterbitkannya RPJMN ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian

Pariwisata 2025-2029. Penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan hal yang penting dalam penyusunan rencana strategis Kementerian, Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur kinerja Kementerian Pariwisata dan menjadi bagian penting dalam rencana strategis yang ditetapkan (*Cascading* IKU beserta target terdapat pada lampiran rencana strategis).

Berdasarkan *timeline* penyusunan rencana strategis, bulan April 2025 merupakan waktu untuk pembahasan cascading IKU penetapan manual IKU, sasaran program, sasaran kegiatan beserta targetnya serta konfirmasi /finalisasi narasi rencana strategis untuk selanjutnya di bulan Mei 2025 akan dilakukan FGD Penyusunan Rencana Strategis Internal dan *Public Hearing*, serta di Bulan Juni merupakan target Penetapan rencana strategis Kementerian Pariwisata. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri PPN/Bapenas No. 10 tahun 2023 tentang tata cara penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 -2029 Pasal (16) bahwa Kementerian/Lembaga menetapkan rancangan Rencana Strategis K/L menjadi Rencana Strategis K/L dengan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan paling lambat 5 bulan setelah RPJMN diundangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan masukan terhadap cascading IKU Deputy Bidang Industri dan Investasi serta penyusunan manual IKU agar dapat menjadi bahan masukan rencana strategis Kementerian Pariwisata, untuk itu dilaksanakan kegiatan FGD Penyusunan IKU dan Manual IKU Deputy Bidang Industri dan Investasi pada tanggal 9 Mei 2025 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Eselon I, Eselon II, Kepala Bagian / Kepala Bidang Perencanaan dan Pegawai/Staf yang menangani bidang perencanaan di seluruh unit Eselon II di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi. Acara ini dihadiri oleh Narasumber Ibu Kurleni Ukar (Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi), Bapak Bagus Prihmono Aji (Konsultan Perencana), Bapak Addin Maulana (BRIN), Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Kegiatan FGD ini dibuka oleh Ibu Rizki Handayani selaku Deputy Bidang Industri dan Investasi. Hasil dari kegiatan ini berupa Rancangan Awal Cascading IKU Deputy Bidang Industri dan Investasi sebagai masukan rencana strategis Kementerian Pariwisata 2025 - 2029. Dalam Acara ini dapat dilihat peran serta pimpinan dari level Eselon I dan Eselon II dalam menentukan IKU (Indikator Kinerja Utama) Deputy Bidang Industri dan Investasi.



b. Kegiatan Penyusunan dan Review RTP Deputy Bidang Industri dan Investasi

Dalam rangka menindaklanjuti permintaan dari Sekretaris Kementerian Pariwisata perihal Pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Pariwisata Tahun 2025 bahwa seluruh satker diminta menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP dan membuat laporan pemantauan dan pengendaliannya atas sasaran kegiatan, sasaran program dan sasaran strategis. Sehubungan dengan hal tersebut diselenggarakan Acara Penyusunan dan Review RTP Deputy Bidang Industri dan Investasi, tanggal 20 Juni 2025 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta

Kegiatan ini dihadiri Eselon I, seluruh pejabat Eselon II, Kepala Bagian / Kepala Bidang Perencanaan dan Pegawai/Staf yang menangani bidang perencanaan di seluruh unit Eselon II di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi. Acara ini dihadiri oleh Narasumber Bapak Sumarmo (BPKP) dan Bapak Fuadin Abid (BPKP), Tim pengendali teknis Kementerian Pariwisata dan Tim Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata. Kegiatan penyusunan dan review RTP ini

bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan dalam pengendalian internal, serta untuk merencanakan tindakan yang diperlukan guna mengurangi risiko, baik risiko strategis maupun operasional, sehingga dapat menjadi acuan bagi pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan penguatan sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu dalam acara ini juga dilakukan review oleh BPKP dan Tim Pengendali Teknis Kementerian Pariwisata terhadap Dokumen RTP yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja Eselon II Deputy Bidang Industri dan Investasi.

Hasil dari kegiatan ini berupa saran dan masukan dari BPKP dan tim pengendali teknis Kementerian Pariwisata terhadap dokumen RTP yang telah disusun oleh masing-masing unit kerja Eselon II di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi antara lain: a) Harus ada penyeragaman dalam pengisian visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan di dokumen RTP, sehingga dapat mengacu pada Rencana Strategis Kementerian apabila Rencana Strategis Eselon I belum disusun; b) Kegiatan yang dimasukkan dalam Dokumen RTP adalah di level komponen untuk, sehingga diperlukan pemetaan kembali komponen mana yang sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja; c) Memastikan keselarasan antara kertas kerja dan dokumen RTP; d) Memastikan waktu yang ditulis lebih spesifik, begitupun dengan pic dan timeline pelaksanaan; e) Dokumen, RTP yang disusun cukup di level Eselon I (Kedeputian) tetapi lampirannya mencakup seluruh unit kerja.



c. Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran

Menindaklanjuti Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S 356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2026 agar kementerian Lembaga melakukan penguatan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja dan belanja yang lebih berkualitas dalam penyusunan Renja K/L TA 2026 dengan memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2026 serta arah kebijakan fiskal dan pokok-pokok kebijakan belanja K/L TA 2026 untuk itu Sekretariat Deputy Bidang Industri dan Investasi menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran tanggal 11 Juli 2025 di Hotel Santika Hayam Wuruk, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri Eselon I, Eselon II, Kepala Bagian / Kepala Bidang Perencanaan dan Pegawai/Staf yang menangani bidang perencanaan di seluruh unit Eselon II di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi. Acara ini dibuka oleh Ibu Rizki Handayani (Deputy Bidang Industri dan Investasi) dan dihadiri oleh Bapak Heri Syafroni (Direktorat Anggaran Bidang Ekonomi dan Kemaritiman .Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan), Bapak Krisman Natalius Gea (Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan), Bapak Awan Supriyatno (Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan), Ibu Eva Noer Cholis Rohmiati (Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah Kementerian PPN/BAPPENAS), Bapak Rizal P.Munthe (Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Kementerian PPN/BAPPENAS). Acara ini memiliki beberapa tujuan antara lain: a) Mendapatkan masukan dari Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian Keuangan dalam rangka merumuskan program kerja dan anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran; b) Melakukan review terhadap RENJA DBII yang telah disusun apakah sudah mengakomodir prioritas pembangunan Tahun 2026 sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN 2025 -2029; c) melakukan review

terhadap kesesuaian pemanfaatan KRO/RO dengan pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian Output dalam Perencanaan dan Penganggaran; d) Sosialisasi PMK 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026 agar Dokumen Rencana Anggaran Biaya TA 2026 yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



d. Kegiatan *Kick Off* Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Deputy Bidang Industri dan Investasi menyelenggarakan Rapat Kick Off Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025 di Hotel Red Top Tanggal 21 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Eselon I, seluruh Eselon II, Kepala Bagian / Kepala Bidang Perencanaan dan Pegawai/Staf yang menangani bidang perencanaan di seluruh unit Eselon II di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi. Acara ini dibuka oleh Ibu Rizki Handayani (Deputy Bidang Industri dan Investasi) dan dihadiri Ibu Vivi Sitinjak (Kementerian PAN dan RB), Tim Pengendali Teknis Kementerian Pariwisata dan Ketua Tim Pelaporan Biro Perencanaan dan Keuangan selaku Narasumber. Acara ini memiliki beberapa tujuan antara lain: a) Sosialisasi Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja oleh Kementerian

PAN RB; b) Evaluasi Penilaian SAKIP Deputy Bidang Industri dan Investasi oleh Tim Pengendali Teknis Kementerian Pariwisata; c) Sosialisasi rencana strategis Kementerian Pariwisata 2025 – 2029 dan Arahan Penyusunan Laporan Kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam Acara juga dibahas Langkah-langkah dalam penyusunan Laporan Kinerja yang meliputi:

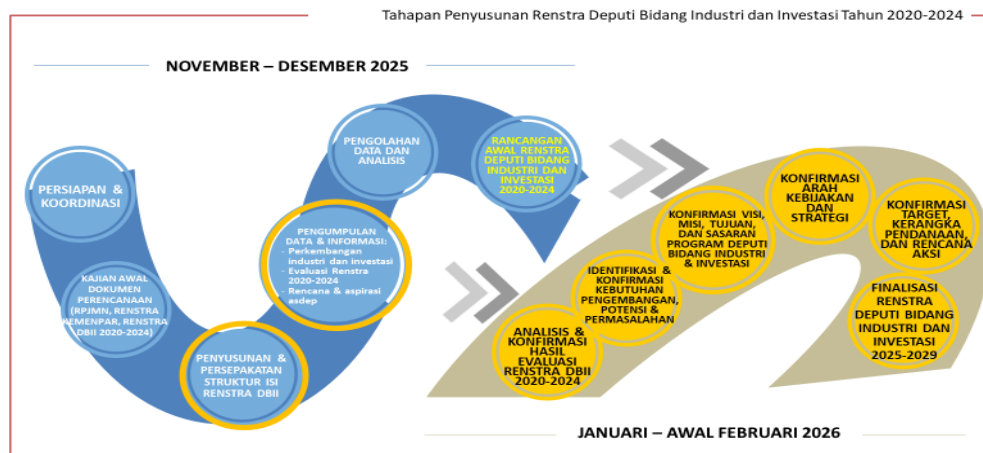
- 1) Mencermati Perubahan Rencana Strategis, IKU, Anggaran TA 2025
- 2) Penyusunan Revisi PK Tahun 2025 sesuai IKU, target dan anggaran sesuai Rencana Strategis 2025-2029 yang akan ditetapkan dan selanjutnya perubahannya diajukan kembali kepada Biro Renkeu
- 3) Pengumpulan Data
Mengumpulkan data kinerja dan program strategis yang menunjang penyusunan Laporan Kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.
- 4) Penyusunan Draft Awal Laporan Kinerja
Dalam Penyusunan Draft Awal konsep laporan kinerja 2025 agar menyesuaikan dengan PK perubahan paling terakhir ditandatangani dan memperhatikan hasil reviu Laporan Kinerja yang telah dikeluarkan Inspektorat sebagai bahan pertimbangan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025.
- 5) *Time line* Penyusunan Laporan Kinerja



e. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa diperlukan dokumen perencanaan strategis untuk mendukung penilaian SAKIP Deputy Bidang Industri dan Investasi, maka Sekretariat Deputy Bidang Industri dan Investasi bekerjasama dengan Tim P2Par ITB untuk menyusun Rencana Strategis Deputy Bidang Industri dan Investasi.

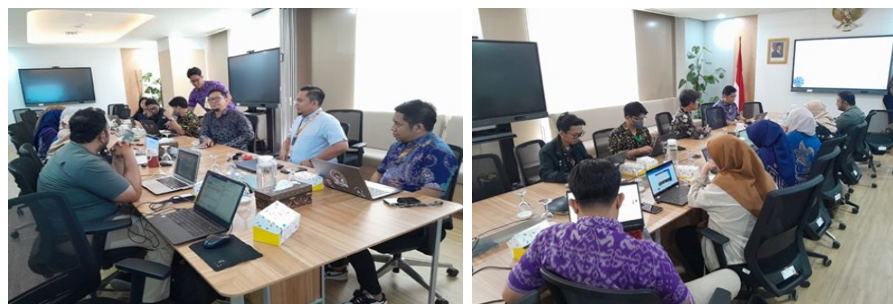
Timeline penyusunan RENCANA STRATEGIS DBII 2025 – 2029:



Kegiatan yang telah dilakukan untuk menyusun Rencana Strategis:

- 1) Telah dilakukan pengumpulan masukan / data primer (*in-depth interview*) dengan mengundang pejabat Eselon II, kepala bidang perencanaan masing-masing asdep, dan semua ketua tim kelompok kerja di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi tanggal 9 - 17 Desember 2025.

- a. Dokumentasi *in-depth interview* Asdep Manajemen Industri



b. Dokumentasi *in-depth interview* Asdep Manajemen Investasi



c. Dokumentasi *in-depth interview* Asdep Standardisasi dan Sertifikasi Usaha



d. Dokumentasi *in-depth interview* Asdep Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan



e. Dokumentasi *in-depth interview* Asdep Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan



- f. Dokumentasi in-depth interview Sekretariat Deputy Bidang Industri dan Investasi



- 2) Telah dihasilkan draft RENCANA STRATEGIS Deputy Bidang Industri dan Investasi yang dapat diunduh pada link berikut:

<https://kemenpar.id/renstradbii>

- 3) Telah dilakukan pembahasan draft Renstra dengan tim P2PAR ITB pada Jum'at, 30 Januari 2026 dan tindaklanjutnya agar masing-masing Asdep memberikan masukan terhadap draft Renstra tersebut.
- 4) Dokumen RENCANA STRATEGIS Deputy Bidang Industri di targetkan untuk selesai pada Februari 2026

- f. **Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Pejabat Eselon I, II dan III di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi**
- Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Sekretariat Deputy Bidang Industri dan Investasi mengadakan kegiatan rapat dalam kantor dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan tujuan: 1) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Januari 2025 dan pada Desember 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan disusun sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata No 7 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025 -2029 tanggal 12 Desember 2025.



g. Kegiatan Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Organisasi melalui Aplikasi PERSI TW1 -TW4

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi mengadakan kegiatan rapat dalam kantor dalam rangka Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Organisasi melalui Aplikasi PERSI. Aplikasi PERSI merupakan aplikasi internal Kementerian Pariwisata yang digunakan untuk mengukur capaian organisasi per triwulan, untuk kemudian

data penilaian tersebut diintegrasikan ke aplikasi simpeg (e-kinerja) untuk menjadi nilai organisasi. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 4 (Empat) kali di tiap triwulan sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pengisian aplikasi PERSI bagi para operator PERSI di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi. Kegiatan ini juga mengundang Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai pemilik Aplikasi PERSI untuk melakukan verifikasi pelaporan. Selain digunakan untuk pengukuran kinerja organisasi, data pengisian pelaporan pada Aplikasi PERSI juga diintegrasikan ke Aplikasi E-Monev milik Kementerian PPN/Bappenas untuk mengukur capaian level outcome, output, dan level komponen dari Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pariwisata.



h. Workshop Aplikasi Coretax dan Optimalisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2025

Dalam rangka pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, pemerintah telah melaunching aplikasi Coretax yang wajib diimplementasikan sejak tahun 2025, oleh sebab itu setiap satuan kerja diwajibkan dalam melakukan administrasi perpajakan yang cepat, akurat, transparan, dan patuh pada pelaporan. Selain sosialisasi aplikasi Coretax, kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan *good governance* melalui optimalisasi nilai IKPA yang tercermin akselerasi belanja dan pencapaian target seperti pemenuhan capaian output satuan kerja, penyerapan anggaran, dan mengevaluasi pemanfaatan anggaran pada triwulan I serta memperbaiki kelemahan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, tanggal 17 April 2025 dan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, tim Pengelola Keuangan dan Operator Pajak di lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi. Narasumber yang hadir pada acara ini antara lain: Ibu Ninik Andriani (Asisten Penyuluh Pajak KPP Pratama Jakarta Gambir I), Bapak Imron (Account Representative KPP Pratama Jakarta Gambir I), Bramastoro Rio Pratama (Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir, KPPN Jakarta VI). Hasil dari Kegiatan sebagai berikut: 1) Administrasi pajak dilakukan di aplikasi coretax seperti pembuatan billing pajak dimana pada tahun 2024 billing pajak terpusat pada bendahara pengeluaran, dan pada tahun 2025 billing pajak dibuat oleh masing masing BPP dan dilakukan pembayaran dan penyetoran langsung pada aplikasi coretax. 2) Perlunya pengurangan UP satuan kerja untuk mempercepat revolving GUP, 3) Kendala utama penyerapan adalah menumpuknya pencairan anggaran di akhir tahun, penting untuk menyegerakan penyerapan sesuai dengan pedoman yang ada. 4) Pelaksanaan anggaran memerlukan kolaborasi dari tim keuangan/pencairan dengan tim perencanaan dan penganggaran terutama dalam hal revisi DIPA dan RPD, 5) Pengisian capaian output dilakukan di link yang sudah dibuat oleh tim pelaksana anggaran atau keuangan oleh masing masing asisten deputi dan akan diisi di SAKTI oleh PIC tim keuangan.



i. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui proses pengadaan yang transparan,

akuntabel, efisien, dan efektif, kita turut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan penggunaan anggaran negara yang optimal demi kemaslahatan masyarakat. Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) berperan penting dalam mewujudkan layanan publik yang prima dan mendukung pemerataan pembangunan. Proses ini mencakup kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan hingga selesainya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan adanya SDM yang kompeten, proses PBJP dapat berjalan optimal, sehingga proyek-proyek pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Peraturan ini terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, para pengelola pengadaan perlu terus dibekali pemahaman terkini mengenai aturan tersebut. Pelatihan ini menjadi wadah untuk memastikan bahwa setiap pengadaan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir risiko penyimpangan, korupsi, atau kerugian negara. Pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh serta untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para pegawai dalam proses pengadaan. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi dasar para pegawai untuk mengembangkan keterampilan teknis dalam pengadaan, membangun integritas dan akuntabilitas, serta pembekalan untuk siap dalam menghadapi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Deputy Bidang Industri dan Investasi dan dilaksanakan pada tanggal 28 - 29 Juli 2025 yang bertempat di Ibis Harmoni Jakarta. Peserta yang hadir sebanyak 40 peserta yang merupakan perwakilan dari masing – masing unit Eselon II di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi. Narasumber dalam acara pelatihan ini antara lain: 1) Ibu Ketsia Aprilliany Laya (Widyaiswara Ahli Madya Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP), 2) Tri Susanto (Widyaiswara Ahli Madya Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP), 3) Budi

Bowo Laksono (Widyaiswara Ahli Muda Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP), dan 4) Tino Yuka Aldila (Widyaiswara Ahli Muda Pusat Pelatihan SDM PBJ). Hasil dari kegiatan ini yaitu sebanyak 19 peserta telah lulus ujian sertifikasi barang/jasa dari 38 peserta yang mengikuti ujian sertifikasi barang dan jasa yang diadakan oleh LKPP.



j. Kegiatan *Capacity Building* Deputi Bidang Industri dan Investasi

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah terus mendorong agenda Reformasi Birokrasi. Inti dari reformasi ini bukan hanya pada perubahan sistem, tetapi pada transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk beralih dari pola pikir administratif menuju pola pikir yang berbasis kinerja, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan *capacity building* menjadi sarana krusial untuk tidak hanya menghafal nilai-nilai tersebut, tetapi menginternalisasikannya ke dalam perilaku kerja sehari-hari agar tercipta budaya kerja yang seragam di seluruh lini instansi. Instansi pemerintah saat ini beroperasi di lingkungan yang sangat dinamis (VUCA: *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Perkembangan teknologi digital dan perubahan ekspektasi masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat dan transparan menuntut ASN untuk terus melakukan *upskilling* (peningkatan keterampilan) dan *reskilling* (pelatihan baru). Tanpa pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, instansi akan tertinggal dalam memberikan solusi bagi permasalahan publik.

Hambatan terbesar dalam birokrasi seringkali adalah adanya "ego sektoral" atau sistem kerja yang terkotak-kotak (*silo mentality*). Keberhasilan program strategis instansi sangat bergantung pada sejauh mana antar-bidang atau antar-seksi dapat

berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif. Pengembangan kapasitas melalui pendekatan *experiential learning* (belajar melalui pengalaman) diperlukan untuk mencairkan kekakuan komunikasi dan membangun kepercayaan (*trust*) antarpegawai. Adanya beban kerja yang tinggi dan rutinitas birokrasi seringkali memicu kejenuhan yang berdampak pada penurunan produktivitas. *Capacity building* berfungsi sebagai sarana *recharge* energi bagi pegawai, meningkatkan motivasi intrinsik, serta memperkuat keterikatan pegawai (*employee engagement*) terhadap organisasi.

Tujuan dilaksanakannya *capacity Building* antara lain: 1) Meningkatkan Kompetensi Manajerial dan Sosio-Kultural: Memperkuat kemampuan memimpin dan berinteraksi dalam keberagaman; 2) Membangun Budaya Kerja Adaptif: Agar instansi lebih lincah dalam merespons perubahan regulasi dan kebutuhan masyarakat; 3) Optimalisasi Koordinasi: Menciptakan alur kerja yang lebih harmonis dan minim hambatan komunikasi dan Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektoral yang menghilangkan sekat-sekat birokrasi (*silo mentality*); 4) Internalisasi *Core Values* BerAKHLAK secara mendalam pada setiap jenjang jabatan di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi.

Kegiatan *Capacity Building* Deputy Bidang Industri dan Investasi dilaksanakan di Hotel Aston Bogor Nirwana Residence tanggal 19-21 Januari 2025 dan diikuti oleh 157 pegawai di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi. Selain kegiatan terkait tim building dan motivasi, dalam kegiatan ini juga membahas Visioning Deputy Bidang Industri dan Investasi serta paparan dari tiap Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi terkait program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan pengenalan tim/kelompok kerja yang ada pada masing-masing unit Eselon II dan juga dihadiri oleh Narasumber dari Kementerian PPN /Bappenas yang membawakan paparan terkait Arah Kebijakan Industri dan Investasi dalam RPJMN.



k. Kegiatan Forum Satu Data Deputy Bidang Industri dan Investasi

Kegiatan Forum Satu Data Deputy Bidang Industri dan Investasi, dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2025 di Aone Hotel Jakarta dan diikuti 60 peserta yang merupakan perwakilan Asdep dan PIC Satu Data di Lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi. Kegiatan Forum Satu Data Deputy Bidang Industri Dan Investasi 2025 ini dibuka oleh Ibu Rizki Handayani selaku Deputy Bidang Industri dan Investasi. Narasumber dari kegiatan ini antara lain: Bapak Indera Dewanto (Kepala Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata), Bapak Budi Supriyanto (Asdep Manajemen Industri, Kementerian Pariwisata), dan Bapak Eka (Konsultan IT). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait tata kelola data serta membahas dan menyinergikan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan data di bidang Pariwisata khususnya pada sektor Industri dan Investasi di lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi. Hal ini sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran data. Usulan daftar data di Deputy Bidang Industri dan Investasi untuk tahun 2025 mencakup 12 item, sementara data yang ada di portal Satu Data Kementerian Pariwisata terdiri dari 2 kategori: data publik dan data privat. Data prioritas meliputi data destinasi, SDG, dan standar pariwisata berkelanjutan. Tujuan utama dari Satu Data Pariwisata adalah untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan oleh Kementerian dan antar instansi, baik pusat maupun daerah. Hal ini diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data, sehingga perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan berbasis data dapat terwujud, serta mendukung sistem statistik nasional. Inisiatif ini merupakan amanat dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019, yang mengharuskan integrasi data dari masing-

masing Kementerian/Lembaga agar dapat dioperasikan dan diakses oleh seluruh Kementerian/Lembaga.

Deputi Bidang Industri dan Investasi telah menugaskan Asdep Manajemen Industri untuk mengawal urusan data, dan diperlukan tools pendukung terkait dengan pengolahan data tersebut agar data dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di akhir tahun. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan hasil dalam menjamin ketersediaan data yang berkualitas, akurat, dan terpadu di bidang pariwisata, menyediakan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dan mendorong optimalisasi layanan digital administrasi pemerintahan melalui aplikasi terpadu.



I. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara di Lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi

Barang Milik Negara (BMN) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Seiring dengan meningkatnya volume dan nilai aset negara setiap tahunnya, pengelolaan BMN menuntut ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (yang telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Penatausahaan BMN meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan adalah kunci utama dalam siklus pengelolaan BMN. Penatausahaan yang tertib bukan sekadar kewajiban

administratif, melainkan fondasi bagi: 1) Penyajian Laporan Keuangan yang akurat dan auditabel (meraih opini WTP dari BPK). 2) Pengamanan aset negara secara hukum dan fisik. 3) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran.

Pengelolaan BMN merupakan bagian integral dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Oleh karena itu, diperlukan kepedulian dari seluruh pegawai agar pengelolaan BMN dilakukan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Pengelolaan ini juga berperan penting sebagai dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran ke depan. Saat ini, pengelolaan BMN didukung oleh dua aplikasi utama, yaitu SAKTI untuk pencatatan dan pelaporan keuangan, serta SIMAN untuk manajemen aset. Pengelolaan ini didasarkan pada berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/Daerah. Selain itu, terdapat juga PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi di lingkungan kementerian dan lembaga, serta PMK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan BMN. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merupakan kementerian yang struktur organisasinya mengalami perubahan setiap lima tahun. Sekitar 10 hingga 15 tahun yang lalu, perubahan dan pergeseran organisasi terjadi cukup sering, sehingga penempatan unit kerja berpindah-pindah. Setiap perubahan organisasi tersebut tentu diikuti oleh pemindahan aset yang harus dikelola secara tertib dan akuntabel. Menghadapi perubahan struktur organisasi yang dinamis, dibutuhkan konsolidasi dan penyegaran berkala bagi para pengelola BMN di setiap unit kerja. Ketelitian dan sinergi antara pihak sangat diperlukan agar pengelolaan BMN dapat berjalan secara optimal, terlebih pasca berpisahnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui perubahan nomenklatur. Saat ini terjadi banyak aktivitas transfer barang

masuk dan keluar, khususnya dari Biro Umum ke lantai 10. Hal ini perlu diinventarisasi dengan melibatkan seluruh PIC BMN.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka perlu dilaksanakan Sosialisasi Penatausahaan BMN. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola BMN, serta memastikan seluruh proses penatausahaan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pengelolaan aset negara yang profesional dan akuntabel. Diharapkan implementasi pengelolaan BMN tidak hanya dilakukan oleh pengelola saja, namun juga disosialisasikan kepada seluruh pegawai agar tercipta kesadaran bersama akan pentingnya pengelolaan aset negara secara baik, efisien, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini dilaksanakan 6 Agustus 2025 dan diikuti oleh Para PPK dan Operator BMN di lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi dan dihadiri oleh Narasumber yaitu Kepala Seksi BMN KPKNL Jakarta 3 (Bapak Endro), Penata Layanan Operasional tk.IV KPKNL Jakarta 3 (Ibu Vera L Tania), Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III (Bapak Muhammad Rosyadi Akbar), Pengelolaan Barang Jasa Ahli Muda Biro Umum Kemenpar (Bapak Rhino), Biro Perencanaan dan Keuangan (Bapak Rizaldi).



m. Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Deputy Bidang Industri dan Investasi

Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi merupakan amanat regulasi sekaligus kebutuhan strategis dalam rangka mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan

berorientasi pada hasil. RUP diharapkan mampu menjadi dokumen komperhensif yang mampu meminimalkan potensi kendala hukum dan administratif, serta mendukung perencanaan pengadaan yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat mutu. Selain itu, RUP memiliki peran strategis dalam mendorong efektivitas pemaketan pengadaan, optimalisasi penyerapan anggaran, serta peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan pelibatan Usaha Mikro dan Kecil, serta Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 9 Desember 2025 di Hotel Arya Duta Lipo Village Kab Tangerang, dan dibuka oleh Bapak Rudi Arman Sidauruk selaku Kepala Bagian Umum, SDM, Hukum dan Organisasi, yang dinarasumberi oleh Bapak M. Q. Siddiq Zam dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Ibu Punggi Trimas Agustina dari Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), seta diikuti oleh 60 peserta meliputi Pengendali Teknis Inspektorat Kementerian Pariwisata, dan Kepala Bidang di lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi, Para Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi, dan Tim Sekretariat Deputy Bidang Industri dan Investasi. Acara ini bertujuan untuk menyusun Rencana Umum Pengadaan Deputy Bidang Industri dan Investasi dengan fokus pembahasan Evaluasi Rencana Umum Pengadaan 2025 dan Penginputan Rencana Umum Pengadaan 2026. Acara ini dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, sekaligus sebagai upaya mendorong transformasi budaya pengadaan dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menuju perencanaan yang lebih strategis dan berkualitas. Maka dengan adanya forum ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk memverifikasi usulan kegiatan, menyelaraskan prioritas program, serta memastikan

ketepatan perencanaan anggaran pada seluruh satuan kerja sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Hasil dari kegiatan ini antara lain: 1) Untuk menindaklanjuti RUP, seluruh unit kerja perlu memperkuat kualitas perencanaan pengadaan dengan memastikan bahwa identifikasi kebutuhan dilakukan lebih tajam, realistis, dan selaras dengan prioritas program. Pemanfaatan aplikasi SIRUP harus dioptimalkan melalui peningkatan pemahaman teknis PPK, KPA, dan operator sehingga proses perencanaan hingga pengumuman paket berjalan lebih akurat dan efisien; 2) Percepatan pelaksanaan tender dini menjadi fokus utama guna mencegah penumpukan realisasi pengadaan di akhir tahun. Oleh karena itu penyusunan timeline pengadaan dan monitoring rutin di setiap satuan kerja. Selain itu, peningkatan capaian Produk Dalam Negeri dan pelibatan UMKK harus selalu didorong melalui pemilihan metode pengadaan yang sesuai, penajaman tagging PDN dan UMKK, serta penyesuaian pemaketan; 3) Dari sisi administrasi, PA dan KPA perlu memastikan bahwa RUP diumumkan paling lambat 31 Maret dan setiap revisi dilakukan secara terkontrol. Kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan juga perlu ditingkatkan melalui bimbingan teknis dan pelatihan lanjutan. Seluruh proses ini memerlukan koordinasi internal yang lebih solid agar kualitas perencanaan pengadaan di lingkungan Kementerian Pariwisata semakin sistematis, tepat waktu, dan akuntabel.

n. Kegiatan Rapat Evaluasi dan Penajaman Program Kerja Deputi Bidang Industri dan Investasi

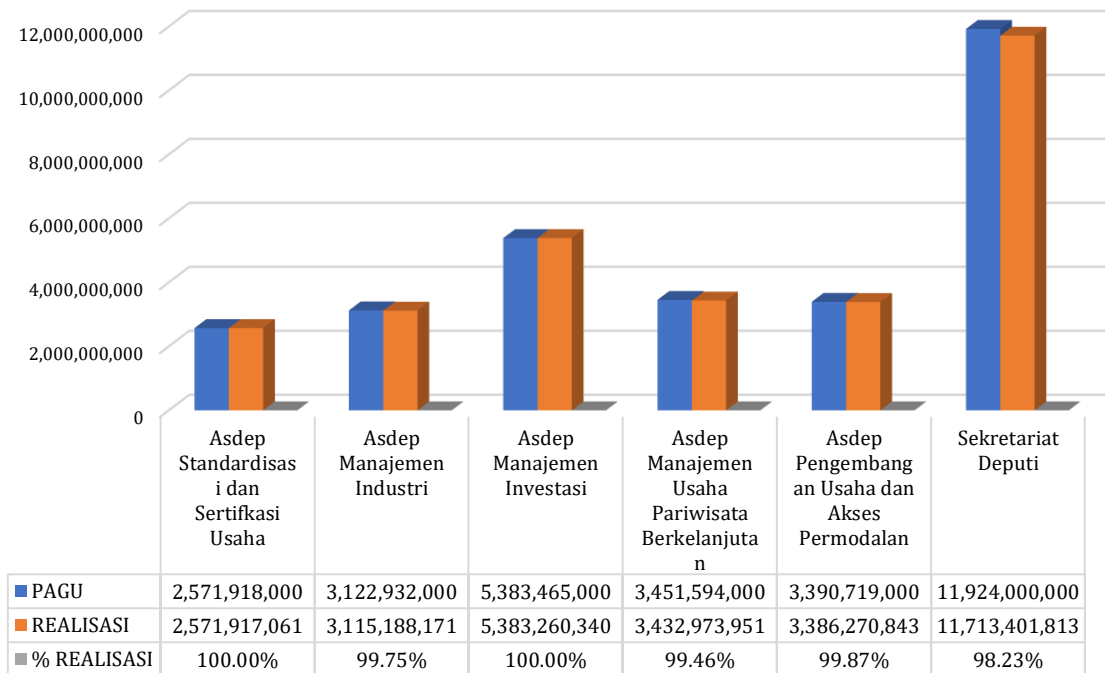
Rapat Evaluasi Tahun Anggaran 2025 dan Penajaman Program Tahun Anggaran 2026 Deputi Bidang Industri dan Investasi dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Bandung Jawa Barat dan dihadiri oleh 157 pegawai ASN di lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi. Rapat ini sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menyusun perencanaan program yang lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui evaluasi pelaksanaan program tahun 2025, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan peluang perbaikan guna memperkuat

strategi pelaksanaan program di tahun 2026 agar lebih terarah, efektif, dan relevan dengan prioritas nasional. Kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar unit kerja untuk menjawab isu-isu strategis di bidang industri dan investasi pariwisata. Kegiatan ini juga bertujuan menyelaraskan rencana kerja dengan tujuh program unggulan Kementerian Pariwisata untuk tahun 2026, yaitu: Destinasi Wisata Bersih, Keselamatan Berwisata, Pariwisata Naik Kelas, Event by Indonesia, Desa Wisata, Tourism 5.0: Perizinan Event, dan Visit Indonesia 2027. Program ini akan diturunkan ke Deputy dan selanjutnya ke masing-masing Asisten Deputy melalui penajaman peran dan penyusunan matriks program. Rapat ini sekaligus menjadi sarana apresiasi kepada seluruh pegawai atas kontribusi dalam pelaksanaan program tahun 2025 serta dorongan untuk terus menghadirkan inovasi dan peningkatan kinerja. Melalui diskusi dan paparan Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, diharapkan tersusun program tahun 2026 yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing untuk mendukung pengembangan industri dan investasi pariwisata secara berkelanjutan.



3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Realisasi anggaran Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Deputy Bidang Industri dan Investasi Tahun 2025

No	Unit Kerja	Pagu Dipa	Blokir	Pagu yang dapat Dimanfaatkan	Realisasi SP2D	%	% Pagu dimanfaatkan
		(a)	(b)	(c)	(d)	(d/a)*100	(d/c)*100
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI		30,596,871,000	752,243,000	29,844,628,000	29,603,012,179	96.75%	99.19%
1	Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	2,571,918,000	0	2,571,918,000	2,571,917,061	100.00%	100.00%
2	Manajemen Industri	3,122,932,000	0	3,122,932,000	3,115,188,171	99.75%	99.75%
3	Manajemen Investasi	5,383,465,000	0	5,383,465,000	5,383,260,340	100.00%	100.00%
4	Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan	3,451,594,000	0	3,451,594,000	3,432,973,951	99.46%	99.46%
5	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan	3,390,719,000	0	3,390,719,000	3,386,270,843	99.87%	99.87%
6	Sekretariat Deputy	12,676,243,000	752,243,000	11,924,000,000	11,713,401,813	92.40%	98.23%

Pada tahun 2025 Deputi Bidang Industri dan Investasi mendapat anggaran sebesar **Rp 30.596.871.000** (Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dan setelah *Automatic Adjustment* pagu yang dapat dimanfaatkan menjadi sebesar **Rp 29.844.628.000** (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dari pagu tersebut terealisasi sebesar **Rp 29,603,012,179** (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tiga Juta Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau **99,19 %** dari pagu yang dapat digunakan.

3.3 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Deputi Bidang Industri dan Investasi memiliki 157 pegawai yang tersebar di Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi, Asisten Deputi Manajemen Industri, Asisten Deputi Manajemen Investasi, Asdep Standardisasi dan Sertifikasi Usaha, Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan dan Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan. Pegawai di lingkungan Deputi Bidang Industri dan Investasi telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah disusun.

Terkait dengan sarana dan prasarana di lingkungan Deputi Deputi Bidang Industri dan Investasi telah berjalan dengan efisien. Hal ini dapat dilihat dari pegawai Deputi Bidang Industri dan Investasi dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya tepat waktu tanpa adanya penambahan jam lembur atau bekerja diluar hari kerja, sehingga sarana dan prasarana yang dipakai seperti listrik, internet, air, BBM kendaraan tidak terjadi pemborosan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi SDM dan efisiensi BMN Deputi Bidang Industri dan Investasi tergolong baik.

3.4 KINERJA LAIN-LAIN

Selain capaian kinerja utama, Deputy Bidang Industri dan Investasi juga terdapat beberapa capaian lainnya, antara lain:

1. Pilah Data dalam rangka Pendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) dilingkungan Deputy Bidang Industri dan Investasi

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan, peran dan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh perempuan dan laki-laki. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui PUG, Kementerian Pariwisata mendorong pembangunan yang lebih inklusif, responsif dan tepat sasaran dengan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Melalui Pedoman Menteri Nomor PDM/3/HK.01.01/MK/2024 dan SK Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Pariwisata, Deputy Bidang Industri dan Investasi saat ini telah melakukan pemilahan data pada pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja dan telah dilaporkan melalui penginputan pada aplikasi popin.kemenpar.go.id Kementerian Pariwisata.

2. Kegiatan *Strategic Dialogue* Pengelolaan Sampah dan *Food Loss and Waste* dalam rangka dukungan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Kegiatan *Strategic Dialogue Food Loss and Waste* berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*), serta mendukung SDG 13 (*Climate Action*), dan SDG 2 (*Zero Hunger*). Melalui penguatan kolaborasi dan praktik pengelolaan pangan berkelanjutan di sektor pariwisata, kegiatan ini mendorong efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, serta peningkatan daya saing industri yang berkelanjutan.

3.5 EVALUASI INTERNAL

Secara umum, capaian program Kedeputan Bidang Industri dan Investasi menunjukkan kinerja cukup baik. Deputi Bidang Industri dan Investasi telah menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan pada dokumen laporan kinerja sebelumnya, antara lain:

1. Mendokumentasikan keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan kinerja (melalui kegiatan: Perjanjian Kinerja, Penyusunan RENSTRA, dan FGD IKU dan Manual IKU), pengukuran kinerja (melalui kegiatan: Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Organisasi Triwulan melalui aplikasi PERSI);
2. Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pemantauan terhadap rencana aksi per triwulan serta digunakan untuk mengendalikan kinerja atau menyusun alternatif perbaikan (melalui kegiatan: *Monitoring* dan Evaluasi Capaian Rincian Output dan Komponen Rencana Kerja/RENJA pada Aplikasi PERSI Per Triwulan, pelaporan Rencana Aksi Nasional per Triwulan);
3. Mempublikasikan Renstra dan Lakin ke portal website kemenpar.go.id.
Terkait rekomendasi ini ditindaklanjuti dengan mengirimkan nodin ke Biro Komunikasi agar RENSTRA dan Laporan Kinerja Deputi Bidang Industri dan Investasi dapat dipublikasikan pada website kemenpar.go.id;
4. Dalam rangka internalisasi dan peningkatan pemahaman nilai-nilai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja pada seluruh pegawai di lingkungan Deputi Bidang Industri telah dilakukan upaya sebagai berikut: melakukan bimbingan teknis pengisian SKP/ e-kinerja dan e-talenta melalui aplikasi simpeg.kemenpar.go.id bagi seluruh pegawai, melakukan proses dialog kinerja sebelum pengisian SKP, sedangkan dalam hal pengukuran kinerja organisasi telah dilakukan bimbingan teknis pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi melalui Aplikasi PERSI per Triwulan dengan mengundang Biro Perencanaan dan Keuangan selaku verifikator tingkat kementerian;

5. Meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Industri dan Investasi supaya mendapat nilai maksimal pada tahun berikutnya.

Upaya yang telah dilakukan antara lain menelaah dan menindaklanjuti catatan LHE AKIP Tahun 2024 dan melakukan perbaikan dari tiap komponen penilaian AKIP Tahun 2024.

Capaian sasaran dan indikator kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena tahun 2025 merupakan tahun pertama penggunaan indikator baru sesuai dengan periode dokumen perencanaan tahun 2025-2029.

Selain itu, berikut analisis atas peningkatan kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi. Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi dapat tercapai dikarenakan:

- a. Koordinasi dan hubungan kerja sama yang baik antara Deputy Bidang Industri dan Investasi dengan para *stakeholder* baik instansi, tim pakar dari perguruan tinggi, pelaku industri pariwisata maupun masyarakat;
- b. Komitmen pimpinan dan pegawai di Deputy Bidang Industri dan Investasi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Strategi pelaksanaan kegiatan ditengah kebijakan efisiensi anggaran;
- d. Kebijakan yang difasilitasi oleh Deputy Bidang Industri dan Investasi didukung oleh tingginya minat dan kebutuhan para pelaku industri pariwisata.

Dalam capaian program kegiatan Deputy Bidang Industri dan Investasi terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Penerapan Kebijakan Efisiensi Anggaran oleh Kementerian Keuangan;
2. Belum optimalnya tata kelola usaha pariwisata;
3. Belum optimalnya penerapan standar keselamatan dan keamanan pada transportasi pariwisata;

4. Keterbatasan akses pembiayaan dan belum optimalnya ekosistem pendanaan pariwisata;
5. Tingkat kepatuhan dan partisipasi pelaku usaha pariwisata dalam penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup dan mekanisme penilaian kinerja lingkungan masih belum optimal.
6. Data capaian PDRB dan nilai investasi sektor pariwisata didapatkan dari BPS dan Kementerian Investasi/BKPM, sehingga membutuhkan waktu untuk mendapatkan dan mengolah kembali data tersebut.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka solusi yang dilakukan oleh Deputy Bidang Industri dan Investasi antara lain:

1. Kebijakan Efisiensi Anggaran

Dengan adanya kebijakan efisiensi Anggaran oleh Kementerian Keuangan yang menyebabkan adanya penurunan alokasi anggaran Deputy Bidang Industri dan Investasi sehingga diperlukan strategi dalam melaksanakan kegiatan agar target kinerja Deputy dapat tetap tercapai antara lain:

- 1) Membatasi Pertemuan/Kegiatan di Hotel menjadi Non Tatap Muka/Hybrid/Online menggunakan zoom atau menjadi kegiatan dalam kantor menggunakan ruangan rapat yang tersedia;
 - 2) Menggabungkan pelaksanaan yang seharusnya 2 kegiatan menjadi 1 kegiatan;
 - 3) Pembatasan Perjalanan Dinas Luar Kota dan Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi;
 - 4) Kegiatan diarahkan dalam mencapai IKU Deputy, dan mengurangi kegiatan yang kurang berdampak pada capaian IKU Deputy;
 - 5) Pembatasan Surat/dokumen yang dicetak dan mengoptimalkan digitalisasi dokumen untuk mengurangi biaya cetak/ Alat Tulis Kantor;
- #### 2. Melakukan Tata Kelola *Online Travel Agent* (OTA) sehingga akan semakin banyak pencantuman usaha akomodasi pariwisata yang legal dan berstandar;

3. Melakukan pengawasan terhadap penerapan standar keselamatan dan keamanan serta kolaborasi lintas sektor guna menjamin keselamatan wisatawan dan meningkatkan daya saing industri pariwisata;
4. Melakukan peningkatan literasi keuangan dan kesiapan usaha, diversifikasi sumber pembiayaan, penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan dan investor, serta pengembangan skema penjaminan dan pembiayaan inovatif guna meningkatkan akses permodalan dan mendorong pertumbuhan investasi sektor pariwisata;
5. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha pariwisata pada pengelolaan sirkular ekonomi rangka mendukung pariwisata berkelanjutan;
6. Berkoordinasi intensif dan terstruktur dengan BPS dan Kementerian Investasi/BKPM melalui mekanisme berbagi data berkala.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Deputy Bidang Industri dan Investasi menuju *good governance* mengacu pada Rencana Strategis Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2025 Deputy Bidang Industri dan Investasi mendapat anggaran sebesar Rp 30.596.871.000 (Tiga Puluh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dan setelah *Automatic Adjustment* pagu yang dapat dimanfaatkan menjadi sebesar Rp 29.844.628.000 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp 29.603.012.179 (Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tiga Juta Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau 99,19 % dari pagu yang dapat digunakan.

Pencapaian kinerja dan anggaran organisasi merupakan perwujudan atas perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Akan tetapi akan selalu ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan. Sebagian besar indikator kinerja dapat dipenuhi dengan baik tetapi sebagian juga ada yang masih berada di bawah target. Hasil dari laporan kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi

ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengambil kebijakan untuk peningkatan kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi tahun yang akan datang.

Demikianlah laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Tahun 2025.

4.2 REKOMENDASI

Dari capaian tahun 2025, dapat direkomendasikan beberapa langkah penting sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang antara lain:

- a. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi yang implementatif lintas kedeputian kedeputian, K/L, dan *stakeholder* agar program yang dijalankan *inline* untuk mencapai target RPJMN.
- b. Mengoptimalkan kembali perencanaan dan koordinasi dengan sektor terkait agar pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai target dan timeline.
- c. SDM yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya untuk meningkatkan target kinerja.
- d. Komitmen tinggi dalam pelaksanaan dan perencanaan penganggaran.
- e. Berkoordinasi dan mendorong peran pemerintah daerah untuk meningkatkan pdrb dan nilai investasi sektor pariwisata.